



RLPPD

(RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH)
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I CAPAIAN KINERJA MAKRO.....	I.1
A. Dasar Hukum	I.1
B. Gambaran Umum Daerah.....	I.5
 BAB II RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN	
DASAR.....	II.1
A. Urusan Pendidikan.....	II.1
B. Urusan Kesehatan	II.14
C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II.99
D. Urusan Perumahan Rakyat.....	II.126
E. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.....	II.137
F. Urusan Sosial	II.154
 BAB III HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN	
PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	III.1
A. Hasil EPPD	III.1
B. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya.....	III.5
 BAB IV RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN	
ANGGARAN DAERAH.....	IV.1
 BAB V INOVASI DAERAH	V.1



BAB II

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

A. URUSAN KONKUREN

1. RINGKASAN URUSAN WAJIB

1) Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

1. Prioritas Urusan Wajib

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Pendidikan di Provinsi Lampung Tahun 2019 dilaksanakan oleh *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung*. Program prioritas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tahun 2019 meliputi:

- a) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- b) Program Wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
- c) Program Pendidikan Menengah;
- d) Program Pendidikan Luar Biasa;
- e) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
- g) Program Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan;
- h) Program Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;
- i) Program Pendidikan Tinggi;
- j) Program Kegiatan Belajar Mengajar.

2. Program dan Kegiatan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Urusan Pendidikan pada tahun 2019 telah melaksanakan sebanyak **13 Program** dengan **53 Kegiatan**, yaitu :



a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan:

- 1) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
- 2) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- 3) Penyediaan alat tulis kantor;
- 4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 5) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 6) Penyediaan peralatan rumah tangga;
- 7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 8) Penyediaan makanan dan minuman;
- 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;
- 11) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan:

- 1) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- 2) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- 3) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan:

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pegawai/Aparatur.

d) Program Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan:

Publikasi dan gebyar pendidikan anak usia dini (PAUD).

e) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Bermutu

Kegiatan:

- 1) Pembinaan siswa berprestasi TK/SD/SMP dan LPI;
- 2) Manajemen pelaksanaan bantuan BOS SD/SMP;
- 3) Penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah.

f) Program Pendidikan Menengah

Kegiatan:

- 1) Operasional SMK unggulan Negara Bumi Ilir Lampung Tengah;
- 2) Operasional SMAN olahraga Lampung di Kota Metro;
- 3) Pengembangan wawasan pendidikan menengah;



- 4) Pengembangan wawasan pendidik menengah umum kejuruan;
- 5) Peningkatan mutu kelembagaan sekolah menengah atas;
- 6) Wokshop pembinaan pramuka bagi SMA/SMK;
- 7) Peningkatan mutu kelembagaan sekolah menengah kejuruan;
- 8) Biaya Operasional Sekolah Nasional;
- 9) Peningkatan kegiatan belajar mengajar SMA;
- 10) Peningkatan kegiatan belajar mengajar SMK.

g) Program Pendidikan Luar Biasa.

Kegiatan:

- 1) Peningkatan mutu pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PK-PLK) dikdas;
- 2) Peningkatan mutu pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PK-PLK) dikmen.

h) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan:

- 1) Peningkatan mutu melalui guru berprestasi;
- 2) Peningkatan mutu PTK dikdasmen;
- 3) Peningkatan kesejahteraan guru honor murni tenaga pendidik/kependidikan.

i) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Kegiatan:

- 1) Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan;
- 2) Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan;
- 3) Pelaksanaan publikasi pembangunan pendidikan;
- 4) Koordinasi program UKS Provinsi Lampung;
- 5) Lampung mengajar;
- 6) Pelayanan kependidikan wilayah I;
- 7) Pelayanan kependidikan wilayah II;
- 8) Pelayanan kependidikan wilayah III;
- 9) Pelayanan kependidikan wilayah IV;
- 10) Pelayanan kependidikan wilayah V.

j) Program Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk Pendidik

Kegiatan:

- 1) Pengembangan TIK untuk pendidikan;
- 2) Peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK untuk pendidikan;
- 3) Pengembangan layanan informasi teknologi publik untuk pendidikan;



4) Pengembangan media pembelajaran berbasis TIK.

k) Program Pendidikan Tinggi

Kegiatan:

Peningkatan mutu PTN/PTS.

l) Program Pendidikan Agama dan Budi Pekerti

Kegiatan:

Peningkatan kualitas siswa terhadap pemahaman agama dan budi pekerti.

m) Program Kegiatan Belajar Mengajar

Kegiatan:

- 1) Peningkatan mutu sarana dan prasarana SMK (DAK);
- 2) Peningkatan mutu sarana dan prasarana SMA (DAK);
- 3) Peningkatan mutu sarana dan prasarana SLB (DAK).

3. Pencapaian Program dan Kegiatan

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 98,36%.

Capaian:

- 1) Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
- 2) Tersedianya jasa administrasi keuangan;
- 3) Tersedianya alat tulis kantor;
- 4) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan;
- 5) Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 6) Tersedianya peralatan rumah tangga kantor;
- 7) Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 8) Tersedianya konsumsi pada setiap kegiatan rapat kantor;
- 9) Tersedianya honorarium PTHL dan jasa kebersihan seba;
- 10) Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
- 11) Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 83,33%.

Capaian:

- 1) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas;
- 2) Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor;



3) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian:

Terlaksananya kegiatan bimtek pengelolaan keuangan dan asset bagi bendahara dan pengelola barang SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

d) Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Anak Usia Dini, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian:

Tersosialisasinya program pendidikan anak usia dini dan terkoordinasinya program PAUD di Provinsi Lampung.

e) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Bermutu, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian:

- 1) Terlaksananya kegiatan lomba-lomba siswa SD, SMP di bidang iptek/sains, seni budaya dan olahraga;
- 2) Terlaksananya kegiatan monitoring BOS SD/SMP di 15 Kab/kota se provinsi Lampung;
- 3) Terlaksananya bimtek pendataan dan helpdesk operator ujian nasional.

f) Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Menengah, terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian:

- 1) Tersedianya dana operasional SMK unggulan Negara Bumi Ilir Lampung Tengah;
- 2) Tersedianya dana operasional SMA N Olahraga Lampung di kota Metro;
- 3) Terlaksananya kegiatan lomba-lomba kesiswaan di bidang akademik, olahraga dan kesenian jenjang SMA;
- 4) Terlaksananya kegiatan lomba-lomba kesiswaan di bidang akademik, olahraga, dan kesenian jenjang SMK;
- 5) Terlaksananya kegiatan workshop sosialisasi manajemen BOS dan penyaluran dana BOSDA jenjang SMA;



- 6) Terlaksananya kegiatan workshop sosialisasi manajemen BOS dan penyaluran dana BOSDA jenjang SMK;
- 7) Terselenggaranya program bantuan operasional sekolah nasional jenjang SMA/SMK se Provinsi Lampung;
- 8) Terselenggaranya kegiatan pembinaan kepramukaan terhadap guru SMA dan SMK;
- 9) Pembayaran retensi sarpras jenjang SMA tahun 2018;
- 10) Pembayaran retensi sarpras jenjang SMK tahun 2018.

g) Program Pendidikan Luar Biasa

Program Pendidikan Luar Biasa, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian:

- 1) Terlaksananya kegiatan lomba-lomba siswa SLB di bidang seni dan olahraga;
- 2) Tersedianya dana pembayaran konsumsi siswa SLB se Provinsi Lampung.

h) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian:

- 1) Terlaksananya kegiatan lomba guru berprestasi dan seleksi calon kepala sekolah jenjang SMA/SMK;
- 2) Terselurnya dana tunjangan profesi, tambahan penghasilan, tunjangan khusus, dan tersusunnya standar operasional pembelajaran disekolah;
- 3) Terselurnya insentif guru honor murni jenjang SMA/SMK se Provinsi Lampung.

i) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Manajemen Layanan Pendidikan, terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian:

- 1) Terlaksananya monitoring, evaluasi, analisis pelaksanaan program dan penyusunan dokumen dinas;
- 2) Terlaksananya manajemen informasi pendidikan;
- 3) Terlaksananya kegiatan kehumasan, hari-hari besar nasional/daerah, pameran pembangunan pendidikan;
- 4) Terlaksananya koordinasi program UKS se provinsi Lampung;
- 5) Jumlah tenaga pengajar jenjang SMA/SMK yang diperbantukan di daerah terpencil;



- 6) Tersedianya dana administrasi perkantoran UPTD wilayah I;
- 7) Tersedianya dana administrasi perkantoran UPTD wilayah II;
- 8) Tersedianya dana administrasi perkantoran UPTD wilayah III;
- 9) Tersedianya dana administrasi perkantoran UPTD wilayah IV;
- 10) Tersedianya dana administrasi perkantoran UPTD wilayah V.

j) Program Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk pendidikan.

Program Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian:

- 1) Terlaksananya KBM berbasis TIK, dan fasilitas penunjang studio dan pusat sumber belajar (PSB) berbasis TIK;
- 2) Terlaksananya bimtek pemanfaatan TIK berbasis internet dan pelaksanaan kuis Ki Hajar tingkat provinsi;
- 3) Terlaksananya pengelolaan website Dinas Pendidikan sosialisasi, peliputan lomba kihajar, dan pelaksanaan program radio streaming untuk pendidikan;
- 4) Terpenuhinya konten pembelajaran berbasis TIK dan berbasis mobile untuk sekolah.

k) Program Pendidikan Tinggi

Program Pendidikan Tinggi, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian:

Tersedianya dana beasiswa bagi siswa dan perguruan tinggi.

l) Program Pendidikan Agama dan Budi Pekerti

Program Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian:

Terlaksananya kegiatan pentas pendidikan agama siswa SD/SMP/SMA/SMK se Provinsi Lampung.

m) Program Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

Program Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian:

- 1) Terlaksananya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana jenjang SMK;
- 2) Terlaksananya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana jenjang SMA;
- 3) Terlaksananya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana jenjang SLB.



4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional

PEGAWAI		PENDIDIKAN		PANGKAT/ GOL		JUMLAH PEJABAT			
Status	Jlh	Kualifikasi	Jlh	Pangkat	Jlh	Eselon	Jlh	Jabatan	Jlh
PNS	425	S3	-	IV/d	1	IV	25	Pengawas sekolah	175
PTHL	138	S2	39	IV/c	1	III	129	Pamong Belajar	14
		S1	66	IV/b	3	II	34	Guru PLB	46
		D4	0	IV/a	20				
		D3	7	III/d	31				
		D2	0	III/c	31				
		D1	2	III/b	50				
		SMA	68	III/a	17				
		SMP	5	II/d	5				
		SD	3	II/c	15				
				II/b	8				
				II/a	6				
				I/d	-				
				I/c	2				
				I/b	-				
				I/a	-				
PNS	425		190		190		190		235

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019 **Urusan Pendidikan** sebesar:

Alokasi : Rp.657.874.499.410,-

Realisasi : Rp.635.791.284.212,-

Persentase Realisasi : 96,64%

6. Proses Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mekanisme sebagai berikut :

- Sosialisasi program tahun berjalan dan rencana program tahun berikutnya ke kabupaten/kota dan instansi terkait;
- Rapat koordinasi teknis;
- Penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD);
- Musrenbang Provinsi;
- Fasilitasi dan koordinasi Musrenbang kab/kota dan pusat/nasional;
- Penyusunan RKPD;
- Penyusunan KUA dan PPAS;
- Finalisasi dan Penetapan PPA;
- Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);



- a) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	KURANG
1	AC	59		
2	Almari Kayu	9		
3	Almari Besi	71		
4	Amplifier	1		
5	Brankas	1		
6	CCTV	1		
7	Filing cabinet (Besi)	94		
8	Filing Kayu	5		
9	Genset	1		
10	Gerobag Roly	2		
11	Handycam	10		
12	Kamera digital	19		
13	Hardisk External	3		
14	Kursi Kayu	11		
15	Kursi Kerja	38		
16	Kursi Putar/biro	341		
17	Kursi Rapat	146		
18	Kursi Tamu	18		
19	Kursi Besi/Metal	220		
20	Laptop/Note book	88		
21	LCD Projector	25		
22	Layar LCD Proyektor	4		
23	Lemari Arsip	24		
24	Lemari Besi	73		
25	Meja Kerja	62		
26	Meja Komputer	9		
27	Meja Rapat	17		
28	Mesin Penghancur Kertas	26		
29	Mesin Absen Elektronik	3		
30	Mesin Pompa Air	2		
31	Mesin Tik Elektronik	4		
32	Mesin Tik Manual	42		
33	Komputer PC	19		
34	Minibus (AVV)	1		
35	Minibus (Inova)	1		
36	Overhead Projector	4		
37	Printer	32		
38	Rak Besi/Arsif	2		
39	Sarung Bantal dan Sprei	150		
40	Sikat Mushollah	8		



NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	KURANG
41	Sound System	4		
42	Server	2		
43	Talo Balak	1		
44	Televisi	1		
45	Vacum Cleaner	2		
46	Wereless	10		

8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dari segi anggaran dan program adalah sebagai berikut:

- Ketersediaan dana pada kas daerah yang terbatas sehingga beberapa kegiatan capaiannya tidak mencapai 100%;
- Mutu pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung masih perlu ditingkatkan;
- Belum optimalnya koordinasi antar lintas sektor dan lintas program baik di Kabupaten/Kota maupun di Provinsi;

Solusi

- Dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan program dan kegiatan, maka program peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilaksanakan secara konsisten dan terukur di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung perlu dipertimbangkan.
- Diperlukan landasan hukum dan kebijakan yang lebih jelas dan terarah untuk meningkatkan kualitas koordinasi dan kerjasama antar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota beserta jajarannya.

9. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

a) Capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI	%
Meningkatnya pendidikan masyarakat jenjang menengah	APK SM/Sederajat	78	84.66	108.54
	APM SM/Sederajat	70	64.13	91.61
	Rata-rata Lama Sekolah	7.84	7.86	100.26



b) Penghargaan

NO	IKK	URAIAN	DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
1	Penghargaan dari Pemerintah yang diterima tahun 2019	Jumlah penghargaan dari Pemerintah yang diterima pada tahun 2019	Penghargaan yang diterima sebanyak 11 (lima belas) yang terdiri dari: Ashifa Zahra Banowati, Juara III bidang lomba Karate Putri SD Tahun 2019 M. Rafi Al-Kahfi, Juara III bidang lomba Renang Putra SD Tahun 2019 Bardha Oktavia Zaipiana, Juara III bidang lomba IPA SD Tahun 2019 Nadin Ayla Roviqo, Juara III bidang lomba IPA SD Tahun 2019 M. Rafi Asto Husodo, Juara II bidang lomba karate putra SMP Tahun 2019 Seno Abdul Rahman, Juara III bidang lomba bulu tangkis Putra SMP Tahun 2019 Linuhung Wiguna, Juara III bidang lomba renang putrid SMP Tahun 2019 Denzel Elden Wijaya, Juara II bidang lomba matematika SMP Tahun 2019 Ariel Hadi Pradana, Juara II bidang lomba IPS SMP Tahun 2019 Lusiana, Juara III bidang lomba IPS SMP Tahun 2019 M. Nadhif Nur Khairi, Juara III bidang lomba IPS SMP Tahun 2019	11 (sebelas) Penghargaan	Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.1. urusan wajib/ pilihan tahun 2019
			M. Zainal, Juara III bidang lomba Prototype modeling SMK Tahun 2019 Andrian Rangga Saputra, Juara III bidang lomba Electrical Installation SMK Tahun 2019 Lukas Setiawan, Juara H.I bidang lomba Marketing Online SMK Tahun 2019 Lucy Sintawati, Juara III bidang lomba Silat Putri SMK Tahun 2019		

c) Program Unggulan

Program unggulan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019:

1) Lampung Mengajar

Dalam rangka meminimalisir disparitas (kesenjangan) layanan mutu pendidikan antar daerah perkotaan dengan daerah terpencil, terisolir, tertinggal, terluar, atau daerah yang secara geografis sulit dijangkau. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung telah menetapkan kebijakan strategis melalui kegiatan "Lampung Mengajar".

Tujuan kegiatan Lampung Mengajar diantaranya sebagai berikut:

1. Meminimalisir kekurangan guru yang bermutu;



2. Meningkatkan mutu proses dan pelaksanaan pembelajaran
3. Memberdayakan seluruh potensi yang ada untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan
4. Mendorong dan meningkatkan kualitas perilaku masyarakat, agar lebih peduli kepada pendidikan menuju Lampung Maju Sejahtera.

2) BOSDA SMA

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan bagi sekolah jenjang SMA dari 6 (enam) kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa	Jumlah diterima/org
1	Bandar Lampung	6.480	Rp. 1.560.000
2	Lampung Utara	13.960	Rp. 1.000.000
3	Lampung Barat	6.535	Rp. 1.000.000
4	Way Kanan	9.070	Rp. 1.000.000
5	Mesuji	3.097	Rp. 1.000.000
6	Pesisir Barat	3.997	Rp. 1.000.000
Jumlah Siswa		43.139	

3) BOSDA SMK

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan bagi sekolah jenjang SMK dari 6 (enam) kabupaten/kota. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa	Jumlah diterima/org
1	Bandar Lampung	5.250	Rp. 2.400.000
2	Lampung Utara	5.361	Rp.1.140.000
3	Lampung Barat	3.442	Rp.1.140.000
4	Way Kanan	6.159	Rp.1.140.000
5	Mesuji	2.913	Rp.1.140.000
6	Pesisir Barat	1.805	Rp.1.140.000
Jumlah Siswa		24.930	

4) Beasiswa Pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung berkomitmen untuk memberikan layanan pendidikan terbaik kepada masyarakat agar dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas salah satunya dengan cara memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa maupun mahasiswa berprestasi di Provinsi Lampung diantaranya sebagai berikut:

1. Beasiswa bagi siswa SMA Kebangsaan berupa biaya pendidikan sebesar Rp.5.000.000/org untuk sebanyak 270 siswa selama 1 tahun dan biaya pendidikan bagi siswa SMA Taruna Nusantara sebanyak 8 orang.
2. Beasiswa bagi mahasiswa Tantri Abeng University sebanyak 5 orang, mahasiswa Polinela sebanyak 129 orang, mahasiswa Itera sebanyak 156 orang, dan



mahasiswa Polinela jurusan pariwisata sebanyak 40 orang. Bantuan berupa biaya pendidikan selama 1 tahun.

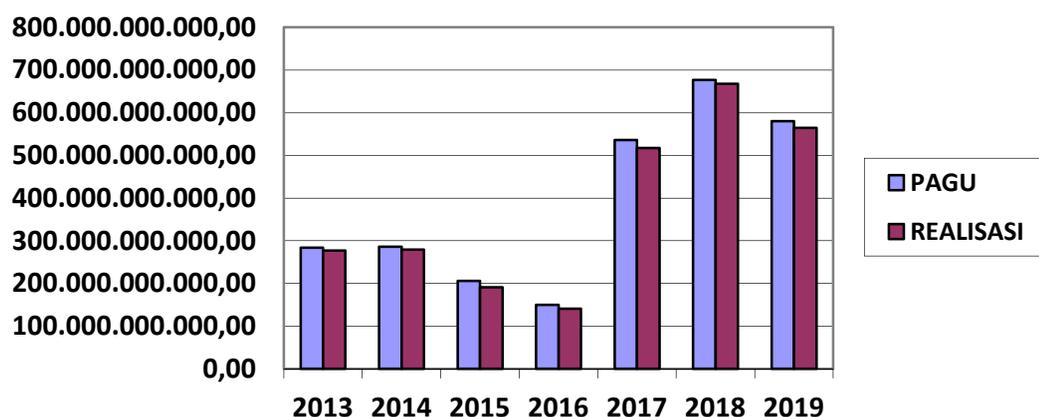
5) Insentif bagi guru honor murni

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan dana kesejahteraan kepada guru honor di 15 Kab/Kota. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima	Dana kesejahteraan Guru Honor Murni SMA,SMK,PKLK sebesar Rp. 204.250 (Dua ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) per orang per bulan.
1	Bandar Lampung	507	
2	Lampung Selatan	568	
3	Lampung Tengah	491	
4	Lampung Utara	392	
5	Way Kanan	509	
6	Lampung Barat	311	
7	Tulang Bawang	360	
8	Tanggamus	526	
9	Lampung Timur	626	
10	Pesawaran	338	
11	Metro	230	
12	Mesuji	191	
13	Tulang Bawang Barat	281	
14	Pringsewu	432	
15	Pesisir Barat	238	
Jumlah Penerima		6.000	

d) Perkembangan Anggaran Belanja Langsung APBD dan Realisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2013 s.d. 2019

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA DANA
2013	284.250.000.000	276.909.212.503	97,42	7.340.787.497
2014	286.250.000.000	279.652.524.390	97,70	6.597.475.610
2015	206.440.166.240	191.474.007.769	92,75	14.966.158.471
2016	149.913.139.762	141.327.548.447	94,27	8.585.491.315
2017	528.676.778.100	510.490.856.662	96,56	18.185.921.438
2018	676.840.337.188	667.578.873.680	98,63	9.261.463.508
2019	670.622.572.480	647.108.420.722	96,49	23.514.151.758





b. Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

1. Prioritas Urusan Wajib

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Kesehatan di Provinsi Lampung Tahun 2019 dilaksanakan oleh ***Dinas Kesehatan Provinsi Lampung***.

Program Prioritas pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2019, antara lain:

- a) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- b) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- d) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f) Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan;
- g) Program Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah;
- h) Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan;
- i) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan;
- j) Program Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
- k) Program Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- l) Program Alat Kesehatan & Makanan Minuman;
- m) Program Pemberantasan Penyakit;
- n) Program Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- o) Program Promosi Kesehatan;
- p) Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

2. Program dan Kegiatan

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan 4 UPTD (Balai Pelatihan Kesehatan, Balai Laboratorium Kesehatan, Instalasi Farmasi dan Kalibrasi, RSUD Bandar Negara Husada) pada tahun 2019 telah melaksanakan sebanyak **18 Program** dengan **48 Kegiatan**, yaitu :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;



- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 7) Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor;
- 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 10) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 11) Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah;
- 12) Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan:

- 1) Pembangunan Gedung Kantor;
- 2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- 3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan:

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja.

e) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kegiatan:

- 1) Peningkatan Ketersediaan Obat Publik & Pengamanan NAPZA;
- 2) Peningkatan Pelayanan Kosmetika.

f) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan:

- 1) Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan Dasar;
- 2) BOK Provinsi.



- g) Program Perbaikan Gizi Masyarakat**
Kegiatan:
Perbaikan Gizi Masyarakat
- h) Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan**
Kegiatan:
Peningkatan Kualitas Sanitasi Dasar
- i) Program Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah**
Kegiatan:
1) Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah;
2) Penanggulangan Penyakit Tidak Menular.
- j) Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan**
Kegiatan:
1) Peningkatan Upaya Kesehatan Perorangan dan Rujukan (Pajak Rokok);
2) Upaya Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
3) Pelayanan Rumah Sakit Bandar Negara Husada.
- k) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan**
Kegiatan:
1) Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK);
2) Penyusunan Perencanaan & Evaluasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
3) Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
4) Mitra Praja Utama (MPU).
- l) Program Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak**
Kegiatan:
Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- m) Program Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional**
Kegiatan:
Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- n) Program Alat Kesehatan & Makanan Minuman**
Kegiatan:



- 1) Peningkatan Mutu Pengawasan/Pembinaan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
 - 2) Pelayanan Kalibrasi Alat Kesehatan
- o) Program Pemberantasan Penyakit**
Kegiatan:
Pengendalian Penyakit Menular
- p) Program Sumber Daya Manusia Kesehatan**
Kegiatan:
- 1) Peningkatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
 - 2) Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan;
 - 3) Peningkatan Mutu UPTD Bapelkes;
 - 4) Peningkatan Kelembagaan dan Tata Laksana Kepegawaian.
- q) Program Promosi Kesehatan**
Kegiatan:
- 1) Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - 2) Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).
- r) Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan**
Kegiatan:
Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka JKN.

3. Tingkat Pencapaian Standart Pelayanan Minimal/Pencapaian Program/Kegiatan

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 12 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian :

- 1) Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 2) Tersedianya jasa administrasi keuangan (283 orang);
- 3) Tersedianya jasa kebersihan kantor;
- 4) Tersedianya alat tulis kantor;
- 5) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan;
- 6) Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 7) Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor;
- 8) Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 9) Tersedianya bahan logistik kantor;



- 10) Tersedianya makanan dan minuman;
- 11) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah;
- 12) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 7 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian :

- 1) Pembangunan gedung kantor Dinkes dan UPTD Labkes;
- 2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- 3) Pengadaan peralatan gedung kantor Dinkes Prov & UPTD;
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dinkes & UPTD;
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinkes & UPTD;
- 7) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Dinkes & UPTD;

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian :

Jumlah tenaga yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang teknis dan manajemen.

d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian :

Tersedianya Laporan Kinerja dan Evaluasi Program.

e) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari 2 kegiatan dengan realisasi fisik mencapai 100%.

Capaian :

- 1) Tersedianya obat publik dan pengamanan NAPZA;
- 2) Pembinaan dan monitoring pelayanan kosmetika, workshop, media promosi.

f) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi fisik mencapai 100%.

**Capaian :**

Tersedianya pelayanan manajemen UKM Tingkat Provinsi;

g) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat, terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian :

Tersedianya paket pengadaan MP ASI, pembinaan, monev, dan posyandu;

h) Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan, terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian :

Tersedianya paket STBM,IPAL, Bimtek & Monev ke kab/kota;

i) Program Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Program Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah, terdiri dari 2 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian :

Tersedianya paket pembinaan dan monev Surveilans dan penanggulangan wabah.

j) Program Upaya Kesehatan Perorangan

Program Upaya Kesehatan Perorangan, terdiri dari 3 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 88,86%.

Capaian :

- 1) Tersedianya paket pembinaan dan monev upaya kesehatan perorangan dan rujukan.
- 2) Tersedianya paket pelayanan Laboratorium UPTD.
- 3) Tersedianya paket pelayanan Kesehatan RSBNH.

k) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, terdiri dari 4 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%, selain pelaksanaan MPU hanya 48% (keterbatasan dana di Kas Daerah)

Capaian :

- 1) Tersedianya dokumen data dan informasi;
- 2) Tersedianya dokumen perencanaan dan Evaluasi;
- 3) Tersedianya dokumen laporan keuangan;
- 4) Tersedianya dokumen kesepakatan kerjasama MPU Bidang Kesehatan;



l) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian :

Tersedianya paket kegiatan KIA.

m) Program Upaya Kesehatan Tradisional

Program upaya Kesehatan Tradisional, terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi fisik mencapai 100%.

Capaian :

Tersedianya paket pembinaan dan Monev Kesehatan Tradisional.

n) Program Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 33,33%.

Capaian :

- 1) Tersedianya paket pembinaan dan Monev Mutu Pengawasan pembinaan dan pengendalian kesehatan makanan.
- 2) Tersedianya pelayanan kalibrasi alkes.

o) Program Pemberantasan Penyakit

Program Pemberantasan Penyakit, terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian :

Tersedianya paket pembinaan dan Monev Program Penanggulangan Penyakit Menular.

p) Program Sumber Daya Manusia

Program Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari 4 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian :

- 1) Tersedianya rapat koordinasi program dokter intership, jumlah paket monevprogram Tubel di 15 Kab/kota;
- 2) Tersedianya tenaga kesehatan teladan tingkat provinsi;
- 3) Tersedianya paket pelatihan Advokasi, jabatan fungsional, dan pelayanan prima; jumlah paket Bimtek dan Monev pasca pelatihan di 15 kab/kota;
- 4) Tersedianya paket pembinaan kelembagaan dan tatalaksana kepegawaian di 15 kab/kota;



q) Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari 2 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian :

- 1) Tersedianya paket Pameran Lampung Fair, Senam kesegaran Jasmani, Media Promkes Pembinaan dan Monev;
- 2) Tersedianya paket perayaan HKN, Monev Bimtek Program UKBM;

r) Program Jaminan Pelayanan Kesehatan

Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM), terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 66,67 % (keterbatasan dana di Kas Daerah)

Capaian :

Tersedianya paket pembinaan pembiayaan dan jaminan kesehatan serta dokumen Evaluasi pembiayaan kesehatan (1 paket & 2 dokumen).

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat Golongan	Jumlah Pejabat	
			Struktural	Fungsional
PNS : 410	S3 : 1	IV d : 1	Eselon II : 1	Administrator Kesehatan Muda : 1
L : 147	S2 : 75	IV c : 1	Eselon III : 9	Sanitarian Penyelia : 1
P : 263	S1 : 138	IV b : 7	Eselon IV : 28	Penyuluh Kesehatan Madya : -
	D4 : 23	IV a : 43		Sanitarian Madya : 1
PTHL : 198	D3 : 105	III d : 73		Epidemiologi Muda : 1
L : 84	D2 : -	III c : 67		WI : 6
P : 114	D1 : 2	III b : 86		Pranata Labkes Madya : -
	SLTA : 57	III a : 38		Dokter Muda : 1
	SLTP : 5	II d : 40		Pranata Dokter Muda : -
	SD : 4	II c : 39		Pranata Labkes Muda : 9
		II b : 5		Pranata Labkes Pelaksana : 2
		II a : 7		Pranata Labkes Pelayanan Lanjutan : 2
		I d : 1		Pranata Labkes Pratama : 6
		I c : 1		Jumlah : 31
		I b : 1		JFU : 379
		I a : -		
Jumlah DINKES	410	410	38	

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian & SDM Kesehatan

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran APBD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung T.A. 2019 :

Alokasi : Rp. 141.802.613.967,00,-

Realisasi : Rp. 132.732.325.551,96,-

Persentase Realisasi : 93,60%

6. Proses Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah



Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mekanisme sebagai berikut :

- a) Sosialisasi program tahun berjalan dan rencana program tahun berikutnya ke kabupaten/kota dan instansi terkait;
- b) Rapat koordinasi teknis;
- c) Penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD);
- d) Musrenbang Provinsi;
- e) Fasilitasi dan koordinasi Musrenbang kab/kota dan pusat/nasional;
- f) Penyusunan RKPD;
- g) Penyusunan KUA dan PPAS;
- h) Finalisasi dan Penetapan PPA;
- i) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- a) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

NO.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI		KET.
			BAIK	KURANG BAIK	
1	2	3	4	5	6
1.	Gedung Kantor :				
	Kantor Dinas	14	14	-	Baik
	Rumah Dinas	1	1	-	Baik
	Gudang	3	3	-	Baik
2.	Kendaraan :				
	Roda 4	35	35	-	Baik
	Roda 2	282	282	-	Baik
3.	Peralatan Kantor :				
	Meja	305	305	-	Baik
	Kursi	551	551	-	Baik
	Meja Rapat	56	56	-	Baik
	Kursi Rapat	229	229	-	Baik
	Mimbar/Podium	1	1	-	Baik
	Meja Resepsionis	2	2	-	Baik
	Sofa	2	2	-	Baik
	Lemari Besi	44	44	-	Baik
	Lemari Kayu	24	24	-	Baik
	Lemari Arsip	24	24	-	Baik
	Lemari Kaca	11	11	-	Baik
	Tempat Tidur Kayu	6	6	-	Baik
	Sprei+Bed Cover	45	45	-	Baik
	Jemuran	70	70	-	Baik
	Mesin Pel	2	2	-	Baik
	Alat Meubelair Lainnya	2	2	-	Baik
	Filing Besi	54	54	-	Baik
	Brangkas	3	3	-	Baik
	Alat Penghancur Kertas	3	3	-	Baik
	Papan Tulis	2	2	-	Baik
	Laptop	71	71	-	Baik
	Komputer	175	175	-	Baik
	Printer	103	103	-	Baik
	UPS	9	9	-	Baik
	Meja Komputer	58	58	-	Baik
	Peralatan Komputer Lain	1	1	-	Baik
	Mesin Tik	9	9	-	Baik
	Faximilie	5	5	-	Baik
	Telepon	19	19	-	Baik
	Alat Komunikasi Lain	25	25	-	Baik
	CCTV	24	24	-	Baik



NO.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI		KET.
			BAIK	KURANG BAIK	
1	2	3	4	5	6
	Televisi	26	26	-	Baik
	Radio	1	1	-	Baik
	Kalkulator	7	7	-	Baik
	Peta	1	1	-	Baik
	Jam Dinding	3	3	-	Baik
	Kulkas	13	13	-	Baik
	Dispenser	12	12	-	Baik
	Kompor Gas	2	2	-	Baik
	Kitchen Set	1	1	-	Baik
	Alat Dapur Lainnya	130	130	-	Baik
	Air Conditioner	96	96	-	Baik
	Exhaust Fan	41	41	-	Baik
	Kipas Angin	5	5	-	Baik
	Vacuum Cleaner	2	2	-	Baik
	Wireless	5	5	-	Baik
	Peralatan Audio	1	1	-	Baik
	Projektor	12	12	-	Baik
	Loudspeaker+Soundsystem	35	35	-	Baik
	Cassette Recorder	1	1	-	Baik
	Stabilisator	11	11	-	Baik
	Tustel/Kamera/Handycam	2773	2773	-	Baik
	Alat Pemadam Portable	26	26	-	Baik
	Stetoscope	6	6	-	Baik
	Tensimeter	6	6	-	Baik
	Alat Timbangan	14	14	-	Baik
	Bed Side Monitor	2	2	-	Baik
	Alat Kedokteran Umum Lain	274	274	-	Baik
	Ventilator	15	15	-	Baik
	Centrifuge	10	10	-	Baik
	Kroun Glass	5	5	-	Baik
	Mikroskop	24	24	-	Baik
	Alat Laboratorium Lainnya	2	2	-	Baik
	Alat Angkut Barang	1	1	-	Baik
	Genset	7	7	-	Baik
	Alat Fogging DBD	10	10	-	Baik
	Spraycan	15	15	-	Baik
	Mata Mesin Rumput	20	20	-	Baik
	Gambar Presiden	8	8	-	Baik
	Tangga Aluminium	6	6	-	Baik
	Pompa Tangan	1	1	-	Baik
	Mesin Tanam Jagung	9	9	-	Baik
	Alat Pemadam Portable	4	4	-	Baik
	Handy Talky	8	8	-	Baik
	Alat Keamanan/Alarm	4	4	-	Baik
	Mesin Absen	10	10	-	Baik
	Alat Kantor Lainnya	31	31	-	Baik

Sumber : Sub Bagian Umum, Hukum & Humas

8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dari segi anggaran dan program adalah sebagai berikut :

a) Anggaran

- 1) Ketersediaan dana pada Kas Daerah yang terbatas sehingga beberapa kegiatan capaian fisiknya tidak mencapai 100 % (dana diprioritaskan untuk kegiatan rutin dan unggulan);
- 2) Terbatasnya alokasi anggaran pembangunan Kabupaten/Kota melalui APBD, khususnya bagi program pembangunan kesehatan;
- 3) Persentase anggaran kesehatan (anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota) terhadap APBD Provinsi Lampung hanya berkisar 3–6 % (khususnya anggaran promotif dan preventif), sementara berdasarkan Undang-



Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diharapkan anggaran kesehatan minimal 10 % dari total APBD diluar gaji.

b) Program

- 1) Sistem pelaporan dan evaluasi program yang belum optimal, sehingga adanya keterlambatan/ketidaktepatan waktu dalam pengiriman data pencapaian program khususnya pencapaian indikator SPM Bidang Kesehatan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi;
- 2) Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia di Kabupaten/Kota baik secara kuantitas maupun kualitas, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata dan adanya mutasi tenaga kesehatan;
- 3) Belum optimalnya koordinasi antara lintas sektor dan lintas program baik di Kabupaten/Kota maupun di Provinsi.

Solusi

Adapun upaya pemecahan masalah baik permasalahan anggaran dan program yang sedang dan akan terus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan perencanaan yang baik agar dapat menjawab kebutuhan serta menyelesaikan permasalahan dan berbasis bukti (*evidence based*);
- 2) Melaksanakan pemetaan masalah yang didukung oleh kelengkapan data dan informasi yang berkualitas;
- 3) Perencanaan ditujukan untuk upaya-upaya perbaikan di masa mendatang, menjawab isu, tantangan dan memanfaatkan peluang untuk menunjang pelayanan terhadap masyarakat;
- 4) Meningkatkan sosialisasi dan asistensi kepada Kabupaten/Kota dalam memahami SPM Bidang Kesehatan sesuai petunjuk teknisnya;
- 5) Meningkatkan kualitas Sistem Informasi Kesehatan (SIK);
- 6) Melakukan peningkatan kapasitas SDM Kesehatan melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis ke Kabupaten/Kota;
- 7) Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program.

9. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

a) Data Pendukung IKK (Indikator Kinerja Kunci)

No	IKK	URAIAN	DATA	KETERANGAN
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan diseluruh provinsi	7.728	Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019
		Jumlah penduduk provinsi	9.102.840	



No	IKK	URAIAN	DATA	KETERANGAN
2	Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan provinsi yang terakreditasi minimal tingkat utama	23	Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019
		Jumlah RS provinsi	78	
3	Persentase pelayanan kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun	9.102840	Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019
		Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama	9.102840	
4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	178	Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019
		Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB	136.770	
5	Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk provinsi	Jumlah tenaga kesehatan	19.668	Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019
		Jumlah penduduk provinsi	9.102.840	
6	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota	153.971	Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019
		Jumlah seluruh kabupaten dan kota	165.269	
7	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota	145.283	Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (Wajib) Tahun 2016 (Data belum tersedia, masih dimintakan BPJS)
		Jumlah seluruh kabupaten dan kota	157.757	
8	Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota	152.233	Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019
		Jumlah seluruh kabupaten dan kota	152.816	
9	Cakupan balita gizi buruk/stunting yang	Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota	65	Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan



No	IKK	URAIAN	DATA	KETERANGAN
10	mendapatkan perawatan/pelayanan kesehatan	Jumlah seluruh kabupaten dan kota	65	(wajib) tahun 2019
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota	15.948	Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019
Jumlah seluruh kabupaten dan kota		29.473		
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota	5.611	Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019
		Jumlah seluruh kabupaten dan kota	5.611	
12	Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota	14.7824	Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019
		Jumlah seluruh kabupaten dan kota	15.0245	
13	Cakupan orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota	70345	Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019
		Jumlah seluruh kabupaten dan kota	110611	
14	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota	542140	Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019
		Jumlah seluruh kabupaten dan kota	755887	
15	Cakupan orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota	9.648	Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019
		Jumlah seluruh kabupaten dan kota	14.360	
16	Cakupan penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota	108.492	Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019
		Jumlah seluruh kabupaten dan kota	84.089	
17	Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota	455.109	Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019
		Jumlah seluruh kabupaten dan kota	926.825	
18	Cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota	16.7243	Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019
		Jumlah seluruh kabupaten dan kota	35.1226	



No	IKK	URAIAN	DATA	KETERANGAN
19	Cakupan orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota	2.357.111	Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019
		Jumlah seluruh kabupaten dan kota	5.443.778	
20	Cakupan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota	66,94	Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019 (Data sampai dengan Triwulan III)
		Jumlah seluruh kabupaten dan kota	505.721	
21	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota	110	Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan kesehatan (wajib) tahun 2019
		Jumlah seluruh kabupaten dan kota	110	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

b) Anggaran, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Wajib/Pilihan

NO	URUSAN WAJIB/Pilihan	Alokasi Belanja Tidak Langsung/ gaji (Rp.Juta)	Alokasi Belanja Langsung (Rp.Juta)			Total Belanja (Rp.Juta)	Realisasi Belanja (Rp.Juta)	%
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal			
I	Wajib Kesehatan	35.165.340.654.00	6.355.840.000.00	87.956.082.419.00	12.325.350.894.00	141.802.613.967.00	132.732.325.551.00	93,60

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinkes Provinsi

c) Program Unggulan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Program unggulan yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2019 :

▪ Penurunan Stunting / Perbaikan Gizi Masyarakat

Penanganan gizi sangat terkait dengan strategi sebuah bangsa dalam menciptakan SDM yang sehat, cerdas dan produktif. Salah satu prioritas pembangunan nasional dibidang kesehatan adalah upaya perbaikan gizi yang berbasis pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya local. Kurang gizi akan berdampak pada penurunan kualitas SDM yang lebih lanjut dan dapat berakibat pada kegagalan pertumbuhan fisik, perkembangan mental dan kecerdasan, menurunkan produktivitas, meningkatnya kesakitan serta kematian.

Penyebab langsung masalah gizi adalah asupan dan penyakit infeksi yang perlu penanganan secara menyeluruh dari berbagai pihak terkait dari di tingkat hulu sampai dengan hilir. Masalah gizi memerlukan pendekatan *life cycle* (siklus hidup) dari mulai ibu hamil sampai dengan usia lanjut. Hasil beberapa penelitian memperlihatkan bahwa pendekatan yang paling efektif untuk menekan status gizi balita stunting/pendek adalah pada periode emas atau dikenal dengan 1000 hari kehidupan pertama.



Sejak ibu hamil sampai dengan anak balita usia 24 bulan merupakan masa kritis yang memerlukan intervensi program yang tepat. Kegagalan tumbuh terjadi setelah bayi berusia 6 bulan, pertumbuhan bayi terus mengalami penurunan dan pada akhirnya menjadi stunting/pendek secara permanen. Artinya intervensi perlu dilakukan sejak bayi dalam kandungan dengan memberikan konseling kepada ibu hamil tentang cara pemberian makan ibu hamil, dan perawatan payudara sebagai persiapan untuk Inisiasi Menyusui Dini (IMD).

Berbagai terobsosan dibidang kesehatan telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan upaya tersebut, pembangunan kesehatan yang juga merupakan salah satu pilar penting dalam menilai keberhasilan pembangunan nasional. Gerakan Gizi 1000 Hari Menuju Indonesia Prima merupakan jabaran dari upaya mencapai indikator tujuan Millennium Development Goals (MDGs) 2015 menurunkan Angka Kelaparan, Angka Kesakitan Balita (AKB), dan Angka Kematian Ibu (AKI). Maksud dari 1000 hari tersebut ialah 1000 hari pertama kehidupan anak. Dihitung mulai dari anak masih dalam kandungan, 9 bulan 10 hari sampai anak tersebut berusia 2 tahun. Maka, program difokuskan pada 5 titik kritis atau 1000 hari pertama, untuk mencapai tujuan yaitu Indonesia prima.

Sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 bahwa program perbaikan gizi adalah menuju peningkatan mutu gizi masyarakat dan perorangan. Salah satu sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2015 – 2019 Menurunnya Prevalensi Gizi kurang dan Gizi Buruk dari 18,8 % (Riskesdas 2013) menjadi < 15 % ditahun 2019.

Dalam rangka percepatan penurunan stunting, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung bersama stake-holder terkait membentuk Lampung Stunting Agency (LSA).

Lampung Stunting Agency merupakan suatu wadah/forum komunikasi aliansi strategis dari berbagai pemangku kepentingan, satuan kerja perangkat daerah, organisasi profesi, organisasi masyarakat (Ormas) dan Fakultas Kedokteran serta NGO terkait guna percepatan penurunan prevalensi stunting dalam rangka menjamin kualitas generasi emas di Provinsi Lampung.

Tujuan dibentuknya LSA untuk menginformasikan data *by name by address* balita stunting di 3 lokus penanganan stunting dan menganalisa masalah stunting di 3 lokus stunting guna percepatan penurunan balita stunting di Provinsi Lampung

Adapun tugas Sekretariat Lampung Stunting Agency adalah :

- Membantu dalam penyusunan program dan anggaran kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting
- Memberikan dukungan teknis administratif kepada lintas program dan lintas sektor terkait
- Membantu pengelolaan data dan informasi terkait stunting
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting



Dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2015-2019 Program Gizi masuk dalam Misi pertama yaitu Menjamin upaya kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau dengan sasaran Menurunnya Prevalensi Gizi kurang dan Gizi Buruk dari 18,8 %

Indikator utama : Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dengan target sebesar 16,8 % di tahun 2019.

Indikator Renstra dan target ditahun 2019 yaitu :

1. % Ibu hamil mendapat tablet tambah darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan dengan target sebesar 95 %
2. % Bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat Asi eksklusif dengan target 80 %.
3. % Balita gizi kurus yang mendapat makanan tambahan dengan target 55 %.
4. % Remaja putri yang mendapat tablet tambah darah (TTD) 30 %
5. % Ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan target 50
6. % Bayi Baru Lahir mendapat IMD target 45%

Kebijakan Program Gizi tahun 2019 :

1. Meningkatkan fungsi posyandu dan partisipasi masyarakat dalam memantau dan menanggulangi secara dini gangguan pertumbuhan balita
2. Mengembangkan KIE dan konseling gizi keluarga yg efektif, tepat guna, lokal spesifik berbasis evidence dalam memberdayakan masyarakat KADARZI
3. Suplementasi zat gizi mikro, MP-ASI, PMT bumil KEK.
4. Meningkatkan ketrampilan SDM puskesmas dan jaringannya dalam penanganan masalah gizi termasuk gizi buruk dan manajemen laktasi.
5. Peningkatan surveylans gizi dan pemantauan pertumbuhan.
6. Menggalang kerjasama dan kemitraan dengan LS, masyarakat dan swasta/dunia usaha dalam memobilisasi sumberdaya untuk penyediaan pangan rumah tangga, peningkatan daya beli keluarga dan perbaikan pola asuhan gizi.

Strategi Program Gizi Tahun 2019

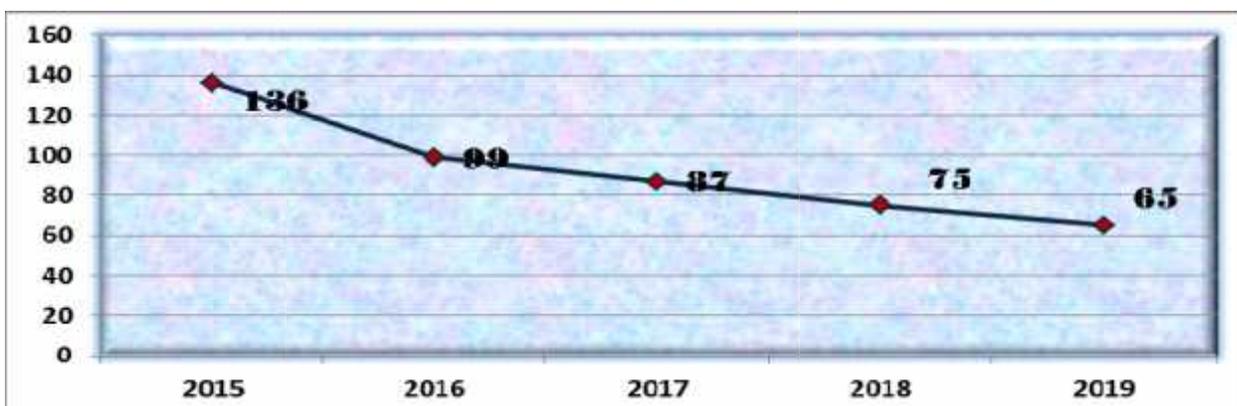
1. Penganggaran berbasis kinerja dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Propinsi Lampung sesuai dengan kewenangan wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) memperhatikan besaran dan luasnya masalah setiap daerah.
2. Mengembalikan fungsi dan peran posyandu sebagai media pemantauan pertumbuhan.
3. Menanggulangi secara langsung masalah gizi yang terjadi pada kelompok rawan melalui pemberian intervensi gizi (suplementasi), seperti *kapsul Vitamin A, MP-ASI dan makanan tambahan*



4. KIE pedoman gizi seimbang.
5. Menggalang kerjasama lintas sektor dan lintas program dan kemitraan dengan swasta/dunia usaha dan masyarakat.
6. Melakukan kajian data SKDN yaitu (S)emua balita mendapat (K)artu menuju sehat, (D)itimbang setiap bulan dan berat badan (N)aik, data penyakit dan data pendukung lainnya.

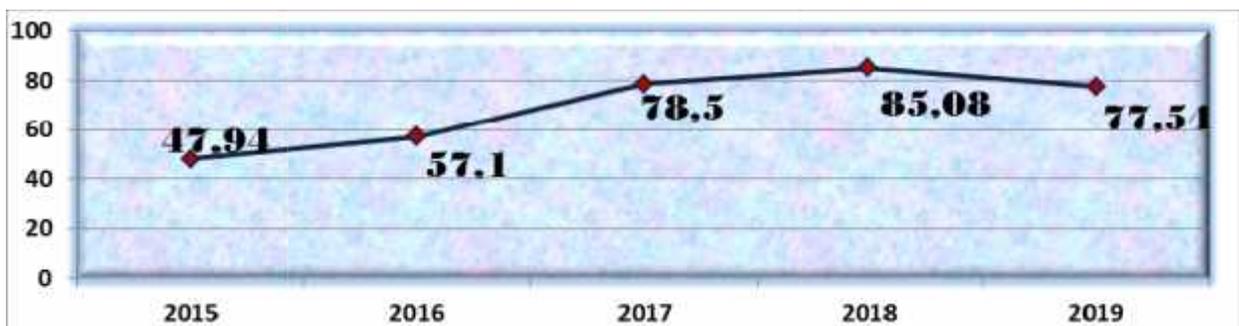
Di Provinsi Lampung data kasus gizi buruk selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

Grafik 19
Trend Kasus Gizi Buruk Propinsi Lampung Tahun 2015-2019



Mulai tahun 2015 Pemberian makanan tambahan difokuskan pada balita kurus sesuai dengan indikator pembinaan dalam rensta Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada tahun 2019 ditetapkan dengan target sebesar 55 % .

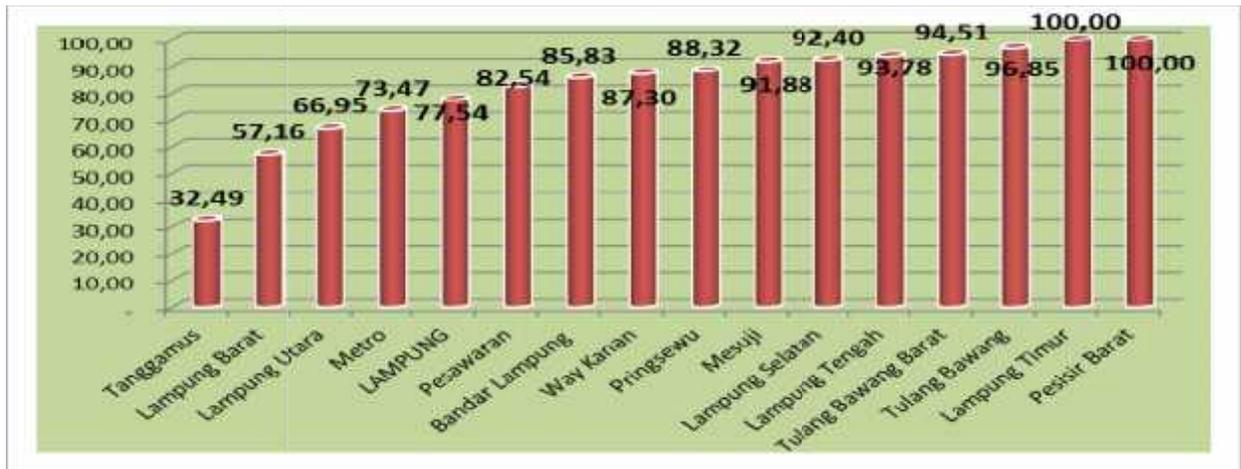
Trend Cakupan Balita kurus mendapat makanan tambahan
Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019



Dari grafik diatas terlihat peningkatan cakupan dari tahun 2015 s.d 2019 namun terjadi penurunan ditahun 2019 sebesar 77,54%.



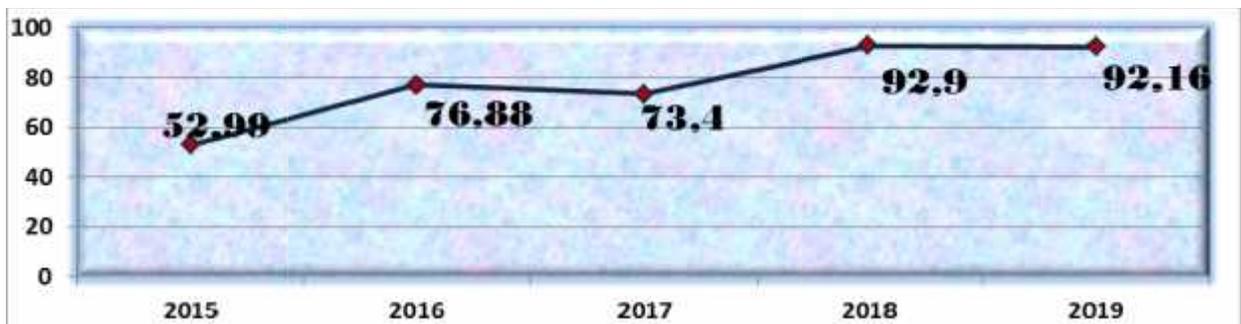
Grafik 33
Balita Kurus mendapat PMT Tahun 2019



Lampung Timur dan Pesisir Barat terendah di Kabupaten Ta Pada tahun 2019 alokasi Pemberian makanan tambahan (PMT) bagi hamil yang kekurangan energi kronis (KEK) dengan target sebesar 50 % pemenuhan PMT dengan realisasi sebesar 92,16 % dari total bumil KEK di Provinsi Lampung artinya hal tersebut sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Akan tetapi pada Kabupaten Tanggamus didapat sebesar 32,49% dengan begitu masih jauh dari target yang diharapkan.

Distribusi Ibu hamil dengan KEK yang diberikan PMT dapat dilihat dalam diagram berikut ini :

Trend Ibu Hamil KEK mendapat makanan tambahan Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019



Dari grafik diatas terlihat cakupan berfluktuatif peningkatan cakupan dari tahun 2015 s namun terjadi penurunan ditahun 2017 naik kembali ditahun 2018 dan terjadi penurunan ditahun 2019 sebesar 92,16%.

Distribusi Pemberian Makanan Tambahan Pada Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) Tahun 2019



Sumber : Laporan Dinkes Kabupaten/Kota tahun 2019



Kegiatan surveilans gizi meliputi kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian serta diseminasi informasi bagi pemangku kepentingan. Informasi dari surveilans gizi dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk melakukan tindakan segera maupun untuk perencanaan program jangka pendek, menengah maupun jangka panjang serta untuk perumusan kebijakan.

Pada tahun 2019 kegiatan surveilans yaitu Pemutakhiran data surveilans Gizi tingkat Kabupaten/kota dan Tingkat Provinsi dan dilakukan desiminasi diakhir tahun.

Trend kasus gizi buruk selama lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan kasus yaitu sebesar 65 kasus. Kasus Gizi Buruk dapat terjadi karena adanya penyakit, pola asuh dan juga karena ekonomi (kemiskinan). Sebagian besar kasus gizi buruk yang terjadi di Provinsi Lampung disebabkan karena penyakit penyerta. Kasus gizi buruk yang disebabkan karena penyakit penyerta yang terbanyak disebabkan karena Tuberkulosis, Downsindrom, Kelainan Jantung, diare, Pneumoni, Hidrosefalus, ISPA.

Pada tahun 2018 target stunting adalah sebesar 37,7 % dan berdasarkan hasil riskesdas 2007- 2018, hasil berfluktuasi pada tahun 2010 terjadi penurunan prevalensi akan tetapi meningkat kembali di tahun 2013 pada angka 42,6 % dan pada tahun 2018 terjadi penurunan prevalensi stunting menjadi 27,28 %. Berdasarkan data terakhir menunjukkan hasil tersebut pada tahun 2018 sudah memenuhi target dalam Millenium Development Goals (MDG's) dan Renstra Dinas Kesehatan Prov. Lampung .

Sedangkan untuk pola asuh sebagian besar disebabkan karena tingkat pengetahuan ibu dalam pemberian makanan pada balita dan pengetahuan ibu tentang gizi pada anak, imunisasi dasar lengkap dan tumbuh kembang. Pengetahuan ibu yang kurang baik ini tercermin pada perilaku ibu dalam melakukan pola asuh, Pemberian ASI Eksklusif (lulus) yang hanya mencapai 24,6% karena berbagai alasan. Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tidak tepat dan jarang di bawa posyandu.

Cakupan ASI Eksklusif terus meningkat, dari tahun 2015 sampai tahun 2019 sebesar 69,33%. namun masih dibawah target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80%. Masih perlu kerja keras berbagai peran baik pemerintah maupun stake holder terkait agar pengetahuan dan kesadaran masyarakat lebih baik lagi dan cakupan dapat terus meningkat dan perlu dukungan yang kuat dari pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk peraturan yang bisa menjamin tercapainya cakupan.

Pada Renstra Tahun 2015 – 2019 salah satu indikator adalah ASI Eksklusif dengan dua kriteria yaitu ASI yang diberikan pada bayi 0 – 6 bulan dan yang lulus sampai pemberian usia 6 bulan, data yang bisa terpenuhi yaitu mulai tahun 2016. Dari graik tersebut terlihat bahwa cakupan ASI eksklusif < 6 bln (lulus) terendah adalah Kabupaten Lampung Selatan dengan pencapaian yaitu sebesar 39,7 % sedangkan tertinggi yaitu Kabupaten Pringsewu sebesar 77,6



%. Capaian Program diatas diharapkan dapat lebih meningkat lagi dengan ditingkatkannya koordinasi antar stake holder terkait dalam rangka advokasi dan penyedia sarana ruang laktasi di tiap sarana umum.

Permasalahan kesehatan, termasuk kematian ibu dan bayi dan gizi, merupakan tanggung jawab bersama dan tidak akan dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri. Oleh karena itu, penggalangan kerja sama lintas sektor, baik dengan Kementerian/Lembaga lain, Pemerintah Daerah, sektor swasta, kalangan akademisi, organisasi profesi, serta masyarakat perlu terus ditingkatkan.

Upaya Penurunan Angka kematian Ibu, Bayi Baru lahir, bayi dan Anak Balita, status gizi merupakan prioritas Pelayanan Kesehatan. Salah satu bentuk strateginya adalah dengan memberdayakan masyarakat dalam perawatan bayi baru lahir, deteksi dini penyakit komplikasi maternal, bayi dan balita serta menjalankan dukungan agar regulasi dapat berjalan sedini mungkin. Permasalahan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama dan tidak akan dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri. Oleh karena itu penggalangan kerja sama lintas sektor, baik dengan Pemerintah Daerah, sektor swasta, kalangan akademisi, organisasi profesi, serta masyarakat harus makin ditingkatkan.

Di samping penguatan manajemen, Penguatan SDM, Penguatan Ketersediaan Alat kesehatan dan Obat, Penguatan Regulasi/Sistem Informasi Kesehatan dan Penguatan pembiayaan. Perhatian khusus dan upaya keras semua pihak tersebut menjadi modal untuk penurunan AKI dan AKB dan penurunan stunting di Indonesia .

▪ **Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak**

Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Balita mempunyai buku KMS/KIA 100%
- Setiap balita yang ditimbang harus memiliki Kartu Menuju Sehat atau buku KIA sebagai alat pencatatan dalam pemantauan pertumbuhan setiap bulan namun bukan berarti untuk menilai status gizi dari balita. Dan dengan adanya pendekatan keluarga melalui buku KIA kita juga bisa melakukan penyuluhan mengenai Gerakan Percepatan Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK).

Pemerintah Indonesia meluncurkan Gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan ” yang dikenal sebagai 1.000 HPK. Masa 1000 hari pertama kehidupan (HPK), yang bermula sejak saat konsepsi hingga anak berusia dua tahun, merupakan masa paling kritis untuk memperbaiki perkembangan fisik dan kognitif anak. 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dikenal dengan istilah *window of opportunity*. Periode emas yang terjadi selama 1000 HPK untuk memperbaiki tumbuh kembang anak secara optimal. 1000 HPK bermula 270 masa kehamilan sejak hari pertama konsepsi lalu terbentuk embrio hingga 730 hari di usia 2 tahun



awal anak. Gangguan yang terjadi selama periode ini akan berdampak pada kelangsungan hidup tumbuh kembang anak yang bersifat permanen. Gangguan ini akan sulit untuk diperbaiki jika usia anak setelah 2 tahun.

Status gizi ibu hamil dan menyusui, status kesehatan dan asupan gizi yang baik selama masa kehamilan hingga tahun pertama kehidupan anak berperan dalam membentuk fungsi otak hingga membantu memperkuat sistem imun. Pemenuhan gizi yang cukup pada anak akan berpengaruh terhadap kualitas kesehatan, intelektual, psikologi, pertumbuhan fisik, keterampilan sosial, dan produktivitas di masa yang akan datang (USAID,2014).

Catatan World Bank menyebutkan bahwa masa 1000 hari pertama kehidupan (HPK), yang bermula sejak saat konsepsi hingga anak berusia dua tahun, merupakan masa paling kritis untuk memperbaiki perkembangan fisik dan kognitif anak. Status gizi ibu hamil dan ibu menyusui, status kesehatan dan asupan gizi yang baik merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik dan kognitif anak, menurunkan risiko kesakitan pada bayi dan ibu. Ibu hamil dengan status gizi kurang akan menyebabkan gangguan pertumbuhan janin, penyebab utama terjadinya bayi pendek (stunting) dan meningkatkan risiko obesitas dan penyakit degeneratif pada masa dewasa.(World Bank, 2012)

Hasil riset yang dikemukakan jurnal medis *The Lancet* tahun 2013 mengenai *Maternal and Child Nutrition* menyatakan ibu hamil dengan status gizi kurang baik akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan janin. Hingga menyebabkan pertumbuhan yang kurang optimal yakni bayi pendek (stunting). Bayi lahir dengan Berat Badan Rendah (BBLR), kurus, kecil, dan imunitas berkurang. Kemudian, anak yang mengalami kekurangan gizi di 1000 HPK akan meningkatkan risiko obesitas, diabetes, jantung, stroke, serta penyakit degeneratif pada masa dewasa, penurunan kemampuan belajar. Hambatan pertumbuhan kognitif dan IQ yang rendah yang menurunkan produktivitas masa dewasa. Meningkatnya risiko *drop out* dari sekolah. Akibatnya akan melahirkan generasi penerus bangsa yang kurang gizi dan kemiskinan.

Adapun tiga hal yang perlu dipenuhi sebagai upaya mengoptimalkan tumbuh kembang anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), adalah *Pertama*, pemenuhan Nutrisi. *Kedua*, pemenuhan Asi Eksklusif, dan *Ketiga*, sanitasi Lingkungan yang sehat.

Pesatnya tumbuh kembang anak selama periode 1000 hari pertamanya perlu didukung dengan pemenuhan gizi yang tepat. Jurnal Kedokteran Syiah Kuala tahun 2017 tentang Nutrisi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan mengemukakan asupan nutrisi selama hamil mempengaruhi fungsi organ tubuh anak. Kebutuhan gizi ibu selama kehamilan yakni karbohidrat, protein, lemak, asam folat, kalsium, zat besi, vitamin D dan Yodium.

Makanan pendamping ASI (MP-ASI) setelah anak berusia 6 bulan hingga 2 tahun. Zat gizi yang terkandung dalam MP-ASI adalah karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan



mineral. Kebutuhan protein dan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral diperlukan dalam jumlah tinggi karena pada masa ini sampai anak berusia 2 tahun merupakan masa pertumbuhan dengan laju metabolisme tinggi. Kandungan lemak pada makanan pendamping ASI anak diperlukan sebagai asam lemak esensial, memfasilitasi penyerapan vitamin larut lemak. Kebutuhan lemak bagi anak dalam makanan pendamping ASI sekitar 30-45% kebutuhan energi.

WHO merekomendasikan pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan pertama dan pemberian ASI diteruskan hingga anak berusia 2 tahun untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak. Riset Katulla, dkk (2014) dalam penelitian *The first 1000 days of life* mengemukakan pemberian ASI Eksklusif menurunkan risiko infeksi saluran cerna, alergi, infeksi usus besar dan usus halus, penyakit celiac, leukemia, limfoma, obesitas, dan DM pada masa yang akan datang. Pemberian ASI Eksklusif hingga 2 tahun juga dapat mempercepat pengembalian status gizi ibu, menurunkan risiko obesitas, hipertensi, kanker payudara ibu.

▪ **Penyehatan Lingkungan**

Dalam rangka meningkatkan perilaku hygiene masyarakat, peningkatan sarana sanitasi (sarana air minum/bersih, tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, tempat sampah/limbah cair rumah tangga yang aman), meminimalisir faktor resiko lingkungan sehingga masyarakat hidup dalam lingkungan yang bersih, nyaman, aman dan sehat, guna mencegah dan atau gangguan kesehatan dan kejadian penyakit yang ditularkan dari lingkungan (air, tanah, udara, makanan, faktor penyakit) dan mencegah kasus anak-anak stunting (Intervensi Sensitive), maka Program Penyehatan Lingkungan melaksanakan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dengan sasaran masyarakat di pemukiman, tempat kerja/Institusi dan Fasyankes, sekolah, dan Tempat-Tempat Umum (TTU).

Kegiatan Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar terdiri dari 2 kegiatan :

1. Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
2. Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
3. Kegiatan Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM).

Capaian program PASD Penyehatan Air & Sanitasi Dasar) tidak sinkron antara pelaporan triwulan dan pelaporan online. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini :



Tabel 1: Data Akses Sanitasi Layak Kab/Kota Berdasarkan Lap Triwulan Iv 2019 Dan Web Januari 2020

Kab/Kota	KK DENGAN AKSES SANITASI LAYAK (Web)		PENDUDUK DENGAN AKSES SANITASI LAYAK (Lap Tw)	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
PRINGSEWU	104446/90343	100	310945	100,0
KOTA METRO	41385/37354	100	321.453	100,0
WAY KANAN	116144/112656	100	688.501	100,0
LAMPUNG SELATAN	259232/249528	100	76.993	94,5
LAMPUNG BARAT	82336/84028	90,20	784.886	59,8
LAMPUNG UTARA	156377/153995	88,10	956.765	93,1
LAMPUNG TIMUR	270870/265369	84,63	455.162	87,2
PESISIR BARAT	40681/0	84,16	279.194	84,7
TULANG BAWANG	102456/110874	83,65	261.569	64,2
KOTA BANDAR LAMPUNG	188306/124423	82,87	685.702	82,6
PESAWARAN	116780/102136	81,58	149.209	43,7
MESUJI	60758/54568	78,25	304.207	63,0
TANGGAMUS	158023/143623	71,44	92.765	51,3
TULANG BAWANG BARAT	69678/78955	64,49	142.314	88,9
LAMPUNG TENGAH	343695/318988	96,63	152.661	78,4
LAMPUNG	2111167/1926840	87,57	5.548.220	79,3

Dari 15 Kab/Kota yang ada data capaian akses sanitasi layak yang sudah sesuai antara pelaporan triwulan dan pelaporan online hanya ada 7 Kab/Kota (Pringsewu, Kota Metro, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Timur, Pesisir Barat dan Kota Bandar Lampung). 8 Kabupaten lainnya masih sangat jauh selisih capaian antara lap triwulan dengan lap online/web.

Tabel 2 : DATA DESA MELAKSANAKAN STBM, ODF KAB/KOTA BERDASARKAN LAP TRIWULAN IV 2019 DAN WEB JANUARI 2020

Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Web STBM		Lap TW	
		Pemicuan / Desa melaksanakan STBM	Desa ODF	Pemicuan / Desa melaksanakan STBM	Desa ODF
	Jml Desa/Kel	Jml Desa/Kel	Jml Desa/Kel	Jml Desa/Kel	Jml Desa/Kel
PRINGSEWU	131	130	131	131	131
WAY KANAN	227	227	227	227	227
KOTA METRO	22	22	22	22	22
LAMPUNG SELATAN	260	260	260	260	260
LAMPUNG TENGAH	314	307	202	314	200
KOTA BANDAR LAMPUNG	126	115	59	105	49
MESUJI	105	74	28	89	55
TULANGBAWANG	151	80	40	110	40
LAMPUNG TIMUR	264	197	57	249	88
TULANG BAWANG BARAT	96	71	15	77	17
LAMPUNG UTARA	247	115	31	328	41
TANGGAMUS	302	175	20	227	36
PESAWARAN	144	124	9	125	5
LAMPUNG BARAT	136	17	7	133	12
PESISIR BARAT	118	25	0	29	0
LAMPUNG	2643	1939	1108	2.199	1.098

Ket : Warna tulisan merah menandakan bahwa Data yang masuk di laporan online (web) dengan laporan Triwulan tidak sinkron. Petugas Kesling Puskesmas tidak entry tanggal



pemicuan di smart STBM dan petugas dinkes kab/kota belum mengupload berita acara desa ODF.

**Data-Data Inovasi Yang Sudah Dan Sedang Dilaksanakan
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2019**

INOVASI YANG DILAKUKAN	SUDAH DAN SEDANG BERJALAN	KETERANGAN
Program 5 Pilar STBM	Sudah dan sedang berjalan	<p>Program STBM dilaksanakan untuk meminimalisasi faktor resiko yang diakibatkan oleh perubahan pada lingkungan, sehingga masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang bersih, nyaman, aman dan sehat, sehingga masyarakat terlindung dari gangguan kesehatan dan kejadian penyakit yang ditularkan melalui air, lingkungan dan perilaku yang sudah hygiene. Kondisi yang diharapkan dengan adanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pergub No 63 Tahun 2016 dijalankan 2. Permenkes No 03 Tahun 2014 tentang STBM 3. Surat Edaran Gubernur tentang STBM 4. STBM dilaksanakan di pemukiman, Sekolah Pontren dan kedaruratan lingkungan

▪ **Upaya Pengendalian Penyakit Menular**

- Capaian dari indikator program dan indikator kinerja

- **Program HIV**

Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) HIV AIDS

- Jumlah Ibu Hamil Dilakukan Pemeriksaan HIV

Sasaran indikator ini adalah semua ibu hamil K1 yang datang berkunjung ke Fasyankes untuk pemeriksaan kehamilan. Adapun Jumlah capaian pemeriksaan HIV pada ibu hamil disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel.1
Jumlah Ibu Hamil Yang Dilakukan Pemeriksaan HIV**

No	Kabupaten/Kota	Target	Capaian	Persentase (%)
1	Lampung Barat	4200	2365	56.31
2	Tanggamus	9000	4301	47.79
3	Lampung Selatan	15488	13032	84.14
4	Lampung Timur	7945	11088	139.56
5	Lampung Tengah	12045	7776	64.56
6	Lampung Utara	4115	2782	67.61
7	Way Kanan	4520	1361	30.11
8	Tulangbawang	9190	1497	16.29
9	Pesawaran	4311	1686	39.11
10	Pringsewu	3694	3754	101.62
11	Mesuji	2151	2071	96.28
12	Tulangbawang Barat	2885	1166	40.42
13	Pesisir Barat	2559	97	3.79
14	Kota Bandar Lampung	9948	8098	81.40
15	Kota Metro	1441	1312	91.05
Jumlah		93492	62386	66.73

- Jumlah Pasien TB Dilakukan Pemeriksaan HIV



Sasaran indikator ini adalah semua pasien TB yang telah terdiagnosis dan sedang dalam pengobatan di Fasyankes. Adapun jumlah capaian pemeriksaan HIV pada pasien TB disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel.2
Jumlah Pasien TB Yang Dilakukan Pemeriksaan HIV
Provinsi Lampung Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Target	Capaian	Persentase (%)
1	Lampung Barat	285	13	4.56
2	Tanggamus	299	157	52.51
3	Lampung Selatan	1006	520	51.69
4	Lampung Timur	1202	629	52.33
5	Lampung Tengah	230	86	37.39
6	Lampung Utara	627	279	44.50
7	Way Kanan	621	2	0.32
8	Tulangbawang	714	29	4.06
9	Pesawaran	799	47	5.88
10	Pringsewu	382	40	10.48
11	Mesuji	176	52	29.55
12	Tulangbawang Barat	293	51	17.41
13	Pesisir Barat	135	7	5.19
14	Kota Bandar Lampung	1223	1236	101.06
15	Kota Metro	185	117	63.24
Jumlah		7665	3265	42.60

▪ Jumlah Pasien IMS Dilakukan Pemeriksaan HIV

Sasaran indikator ini adalah semua pasien IMS yang terdiagnosis di Fasyankes. Adapun jumlah capaian pemeriksaan HIV pada pasien IMS disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel.3
Jumlah Pasien IMS Yang Dilakukan Pemeriksaan HIV
Provinsi Lampung Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Target	Capaian	Persentase (%)
1	Lampung Barat	440	143	32.50
2	Tanggamus	298	1	0.34
3	Lampung Selatan	149	12	8.05
4	Lampung Timur	21	39	185.71
5	Lampung Tengah	119	9	7.56
6	Lampung Utara	80	19	23.75
7	Way Kanan	114	0	0.00
8	Tulangbawang	10	1	10.00
9	Pesawaran	100	2	2.00
10	Pringsewu	55	1	1.83
11	Mesuji	25	0	0.00
12	Tulangbawang Barat	1886	1	0.05
13	Pesisir Barat	50	0	0.00
14	Kota Bandar Lampung	300	37	12.33
15	Kota Metro	1001	4	0.40
Jumlah		4557	269	5.90

▪ Jumlah Penjaja Seks Dilakukan Pemeriksaan HIV

Sasaran indikator ini adalah semua penjaja seks/pekerja seks perempuan (PSP) yang teridentifikasi. Adapun jumlah capaian pemeriksaan HIV pada penjaja seks disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel.5
Jumlah Penjaja Seks Yang Dilakukan Pemeriksaan HIV
Provinsi Lampung Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Target	Capaian	Persentase (%)
1	Lampung Barat	36	0	0.00
2	Tanggamus	11	0	0.00
3	Lampung Selatan	87	1	1.15
4	Lampung Timur	248	139	56.05
5	Lampung Tengah	90	66	73.33
6	Lampung Utara	50	3	6.00
7	Way Kanan	34	0	0.00
8	Tulangbawang	48	0	0.00
9	Pesawaran	42	0	0.00
10	Pringsewu	15	4	27.49
11	Mesuji	20	0	0.00
12	Tulangbawang Barat	44	1	2.27
13	Pesisir Barat	50	0	0.00
14	Kota Bandar Lampung	1187	842	70.94
15	Kota Metro	0	0	#####
Jumlah		1962	1056	53.83

■ Jumlah Laki-laki Seks Laki-laki (LSL) Dilakukan Pemeriksaan HIV

Sasaran indikator ini adalah semua laki-laki seks laki-laki (LSL) yang teridentifikasi. Adapun jumlah capaian pemeriksaan HIV pada laki-laki seks laki-laki (LSL) disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel.6
Jumlah Laki-laki Seks Laki-laki (LSL)
Yang Dilakukan Pemeriksaan HIV
Provinsi Lampung Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Target	Capaian	Persentase (%)
1	Lampung Barat	36	0	0.00
2	Tanggamus	107	1	0.93
3	Lampung Selatan	217	28	12.90
4	Lampung Timur	659	12	1.82
5	Lampung Tengah	137	0	0.00
6	Lampung Utara	50	0	0.00
7	Way Kanan	97	0	0.00
8	Tulangbawang	101	13	12.87
9	Pesawaran	94	0	0.00
10	Pringsewu	254	12	4.73
11	Mesuji	0	0	#####
12	Tulangbawang Barat	30	2	6.67
13	Pesisir Barat	252	0	0.00
14	Kota Bandar Lampung	803	586	72.98
15	Kota Metro	23	7	30.43
Jumlah		2860	661	23.11

■ Jumlah Waria Dilakukan Pemeriksaan HIV

Sasaran indikator ini adalah semua Waria yang teridentifikasi. Adapun jumlah capaian pemeriksaan HIV pada Waria disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel.7
Jumlah Waria Yang Dilakukan Pemeriksaan HIV
Provinsi Lampung Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Target	Capaian	Persentase (%)
1	Lampung Barat	3	0	0.0
2	Tanggamus	4	1	25.0
3	Lampung Selatan	11	7	63.6
4	Lampung Timur	40	1	2.5
5	Lampung Tengah	24	0	0.0
6	Lampung Utara	10	23	230.0
7	Way Kanan	6	0	0.0
8	Tulangbawang	8	0	0.0



No	Kabupaten/Kota	Target	Capaian	Persentase (%)
9	Pesawaran	35	0	0.0
10	Pringsewu	19	1	5.2
11	Mesuji	0	0	#####
12	Tulangbawang Barat	6	1	16.7
13	Pesisir Barat	25	0	0.0
14	Kota Bandar Lampung	230	158	68.7
15	Kota Metro	0	0	#####
Jumlah		421	192	45.6

▪ Jumlah Penasun Dilakukan Pemeriksaan HIV

Sasaran indikator ini adalah semua Penasun yang teridentifikasi. Adapun jumlah capaian pemeriksaan HIV pada Penasun disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel.8
Jumlah Penasun Yang Dilakukan Pemeriksaan HIV
Provinsi Lampung Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Target	Capaian	Persentase (%)
1	Lampung Barat	0	0	#####
2	Tanggamus	1	0	0.00
3	Lampung Selatan	8	14	175.00
4	Lampung Timur	0	0	#####
5	Lampung Tengah	20	1	5.00
6	Lampung Utara	7	3	42.86
7	Way Kanan	1	0	0.00
8	Tulangbawang	1	0	0.00
9	Pesawaran	7	0	0.00
10	Pringsewu	1	1	76.92
11	Mesuji	0	0	#####
12	Tulangbawang Barat	3	0	0.00
13	Pesisir Barat	10	0	0.00
14	Kota Bandar Lampung	34	23	67.65
15	Kota Metro	0	0	#####
Jumlah		93	42	45.02

▪ Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Dilakukan Pemeriksaan HIV

Sasaran indikator ini adalah semua warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang sedang menjalani hukuman di Lapas/Rutan. Adapun jumlah capaian pemeriksaan HIV pada warga binaan pemasyarakatan disajikan dalam tabel berikut ini.

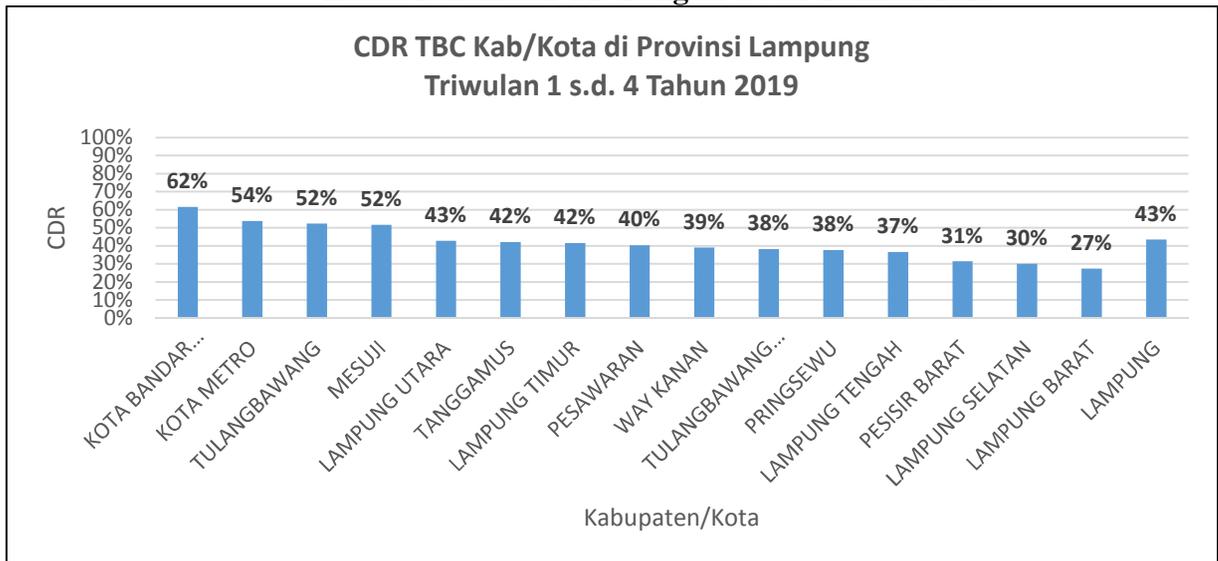
Tabel.9
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Yang Dilakukan Pemeriksaan
HIV Provinsi Lampung Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Target	Capaian	Persentase (%)
1	Lampung Barat	tidak ada lapas	tidak ada lapas	-
2	Tanggamus	7	450	#####
3	Lampung Selatan	490	74	15.10
4	Lampung Timur	367	281	76.57
5	Lampung Tengah	466	319	68.45
6	Lampung Utara	634	423	66.72
7	Way Kanan	108	283	262.04
8	Tulangbawang	300	20	6.67
9	Pesawaran	tidak ada lapas	tidak ada lapas	-
10	Pringsewu	tidak ada lapas	tidak ada lapas	-
11	Mesuji	tidak ada lapas	tidak ada lapas	-
12	Tulangbawang Barat	tidak ada lapas	tidak ada lapas	-
13	Pesisir Barat	100	0	0
14	Kota Bandar Lampung	1825	624	34.19
15	Kota Metro	66	0	0.00
Jumlah		4363	2474	56.7

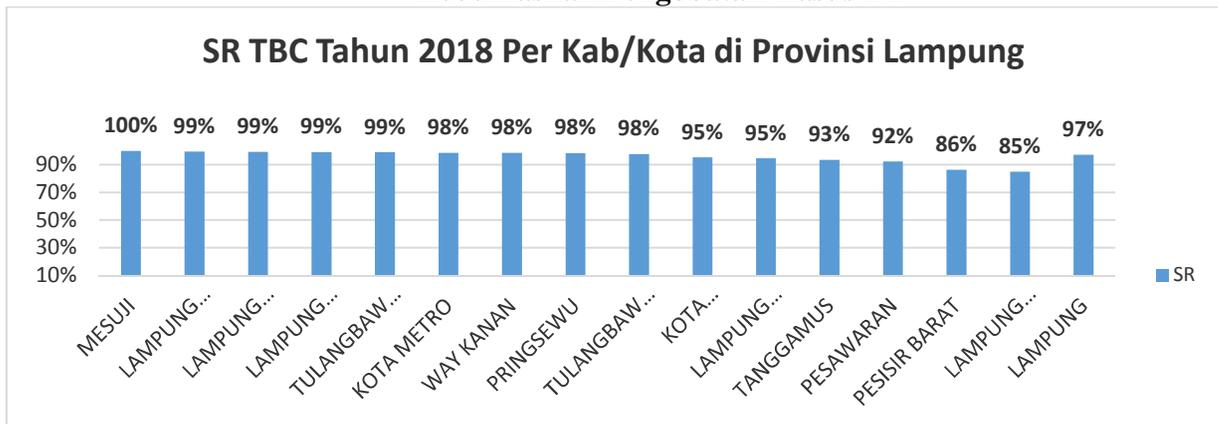


▪ Program TB

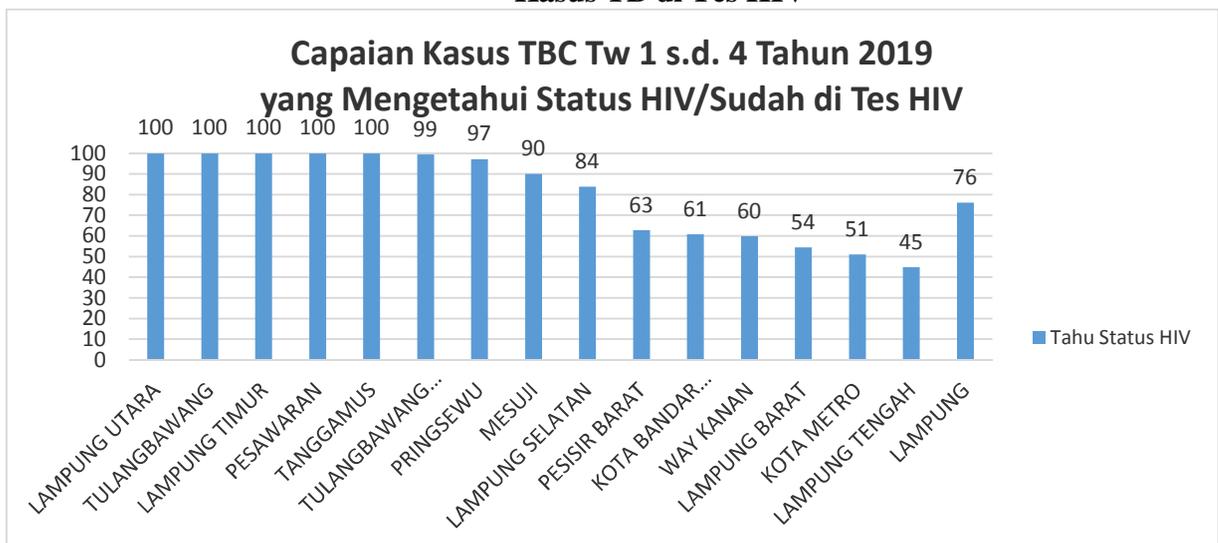
Grafik.1
Kasus Penemuan TB Yang di Obati Tahun 2019



Grafik.2
Keberhasilan Pengobatan Kasus TB



Grafik.3
Kasus TB di Tes HIV



- Cakupan pengobatan semua kasus TB (case detection rate/CDR) yang diobati *Case Detection Rate* (CDR) menerangkan persentase penemuan kasus TBC di masing - masing wilayah Puskesmas di Kabupaten/Kota. CDR tertinggi saat ini diraih oleh Kota Bandar



Lampung (62%) dan terendah berada pada Kabupaten Lampung Barat (27%). Semakin tinggi CDR mengartikan semakin banyak kasus TBC yang ditemukan secara dini dan diobati, sehingga menurunkan angka penularan di masyarakat. CDR yang rendah mengartikan kasus TBC masih banyak yang belum ditemukan sehingga mengindikasikan penularan TBC yang tinggi di Kabupaten/Kota tersebut.

- Angka keberhasilan pengobatan pasien TB (success rate/SR)

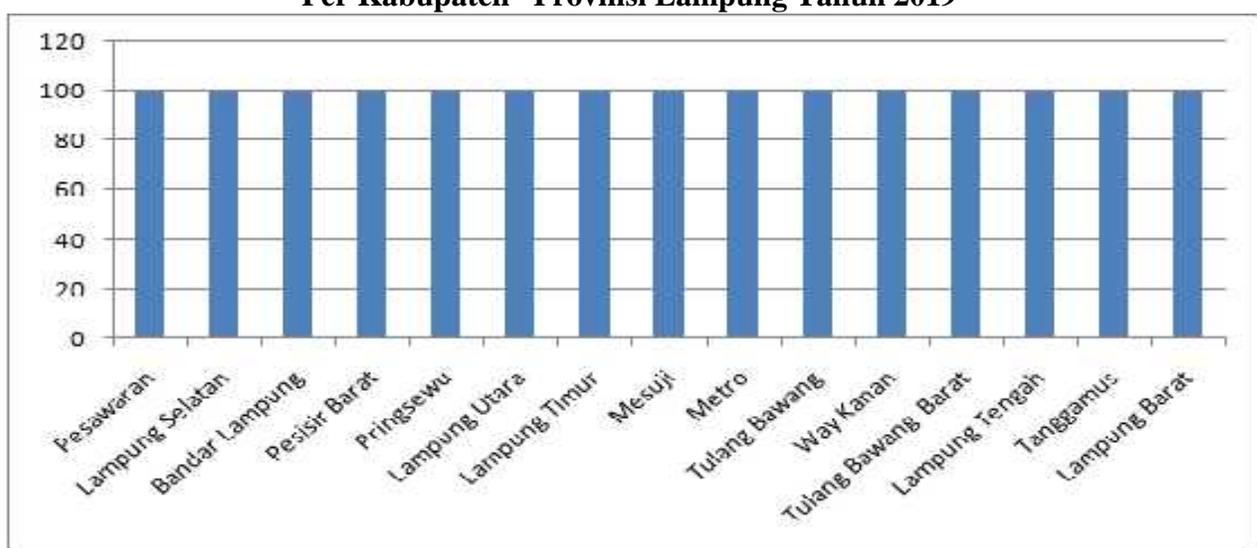
Semua kasus TBC harus dievaluasi hasil pengobatannya. Hal ini untuk mencegah terjadinya Tuberkulosis Resisten Obat. Angka keberhasilan pengobatan semua kasus TBC minimal harus mencapai 90%. SR TB Provinsi Lampung tahun 2019 adalah sebesar 97%. Hal ini menunjukkan kasus TB tahun 2018 yang berhasil berobat TB di Provinsi Lampung adalah sebesar 97% dari seluruh kasus.

- Persentase pasien TB yang mengetahui status HIV

Seluruh kasus TBC harus mengetahui status HIV-nya. Pada tahun 2019 beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung sudah menerapkan semua kasus TB harus mengetahui status HIV/cek HIV dan terlihat dari capaian Indikator TB-HIV yaitu 100%. Kabupaten/Kota tersebut yaitu Lampung Utara, Tulang Bawang, Lampung Timur, Pesawaran dan Tanggamus. Sedangkan capaian terendah ada pada kabupaten Lampung Tengah yaitu 45%. Penularan TBC pada ODHA sangat tinggi oleh karena itu seluruh kasus TBC harus mengetahui status HIV-nya

- Program Malaria

Grafik.4
Prosentase Kasus Klinis Malaria Yang Dikonfirmasi Laboratorium
Per Kabupaten Provinsi Lampung Tahun 2019



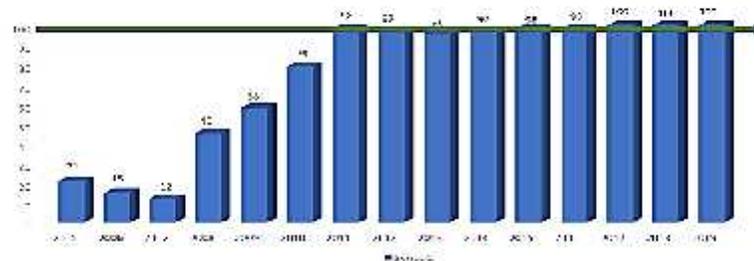
15 Kabupaten sudah mencapai target kasus demam yang dikonfirmasi laboratorium. Tercapainya target kasus konfirmasi laboratorium pada 15 Kabupaten tersebut adalah karena



sosialisasi untuk semua kasus demam yang mengarah pada gejala-gejala klinis malaria sudah dipahami oleh semua petugas di UPK.

Selama periode 5 (lima) tahun terakhir kecenderungan kasus klinis (demam) yang mampu dikonfirmasi di unit pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit terlihat sebagai berikut:

Grafik.5
Prosentase Kasus Klinis Yang Dikonfirmasi Laboratorium
Provinsi Lampung Tahun 2005 S/D Tahun 2019

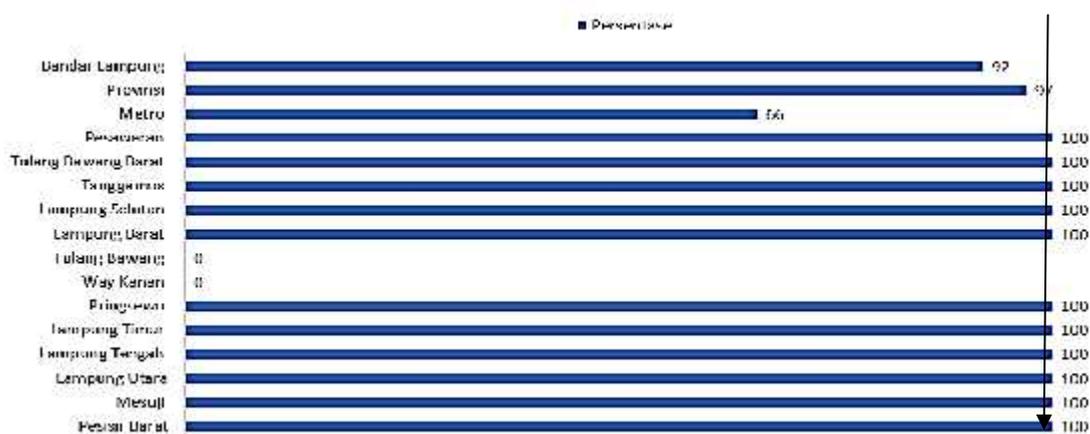


Dari grafik di atas terlihat performan program malaria terutama peningkatan kualitas diagnosis semakin tahun semakin membaik, dimana terlihat di tahun 2005 angka konfirmasi Provinsi Lampung baru mencapai 22 % dan semenjak tahun 2010 sampai dengan 2019 kasus konfirmasi sudah seluruhnya terkonfirmasi (100%).

- Kasus Positif Yang di Obati Dengan ACT.

Kasus konfirmasi positif yang dilaporkan dari 15 Kabupaten/kota yaitu kasus diobati dengan ACT sebagai obat standar malaria pilihan pertama untuk Periode Januari - Desember 2019 terlihat dalam gambar berikut :

Grafik.6
Prosentase Kasus Positif Yang Diobati ACT
Provinsi Lampung Tahun 2019



Kabupaten yang kasus positif malaria tertinggi penggunaan pengobatan ACT adalah Kabupaten Pesawaran. Sebagai daerah endemis malaria Kabupaten Pesawaran penyumbang tersebar kasus yang ditemukan di Provinsi Lampung. Tingginya kasus yang ditemukan di



Kabupaten Pesawaran berhubungan erat dengan tingginya angka gigitan nyamuk *Anopheles* yang diukur dengan indikator Man Biting Rate (MBR) rata-rata 40 gigitan per orang per jam dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2017. Untuk persentase Kabupaten Waykanan dan Kabupaten Tulang Bawang 0% dikarenakan pada tahun 2019, tidak terdapat kasus malaria positif malaria di kedua Kabupaten tersebut.

- Kelompok Umur Penderita Malaria

Proporsi kelompok umur yang menderita malaria dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik.7
Proporsi Kelompok Umur Penderita Malaria Per Kabupaten
Di Provinsi Lampung Tahun 2019

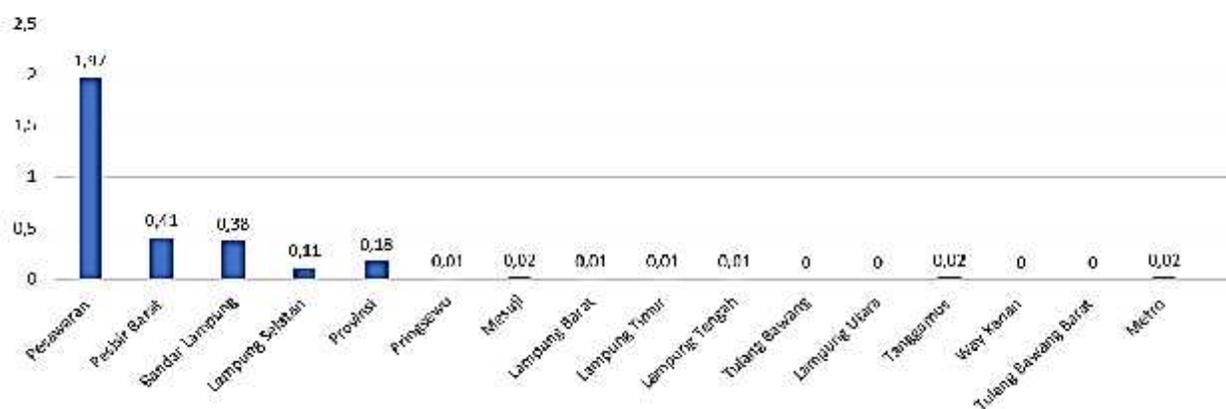
No	Kabupaten	Kasus Berdasarkan Umur						Jumlah
		0-11 bln	1-4 th	5-9 th	10-14 th	15-64 th	>64 th	
1.	Lampung Barat	0	0	0	0	2	1	3
2.	Tanggamus	0	1	1	1	5	0	8
3.	Lampung Selatan	0	3	10	4	87	1	105
4.	Lampung Timur	0	0	0	0	12	0	12
5.	Lampung Tengah	0	0	0	0	8	0	8
6.	Lampung Utara	0	0	0	0	1	0	1
7.	Way Kanan	0	0	0	0	0	0	0
8.	Tulang Bawang	0	0	0	0	0	0	0
9.	Pesawaran	0	40	96	73	644	21	874
10.	Pringsewu	0	0	0	1	3	0	4
11.	Mesuji	0	0	0	0	4	0	4
12.	Tulang Bawang Barat	0	0	0	0	1	0	1
13.	Pesisir	3	15	10	4	31	0	63
14.	Kota Bandar Lampung	0	3	23	21	344	7	398
15.	Kota Metro	0	0	0	0	3	0	3
Provinsi		3	62	140	104	1.145	30	1.484

Berdasarkan grafik tersebut, golongan umur lebih banyak pada usia 15-64 tahun, hal ini berkaitan dengan kebiasaan / aktifitas diluar rumah, Tetapi bila dilihat ternyata pada usia dibawah 1 tahun juga terkena malaria, hal ini menandakan terjadinya penularan/ transmisi baru di wilayah tersebut.

- Angka Kesakitan Malaria.

Situasi penyakit Malaria di Provinsi Lampung Per Kupaten/Kota pada tahun 2019 terlihat sebagai berikut:

Grafik.8
Angka Kesakitan Annual Parasite Incidence (API)
Per Kabupaten Provinsi Lampung Tahun 2019



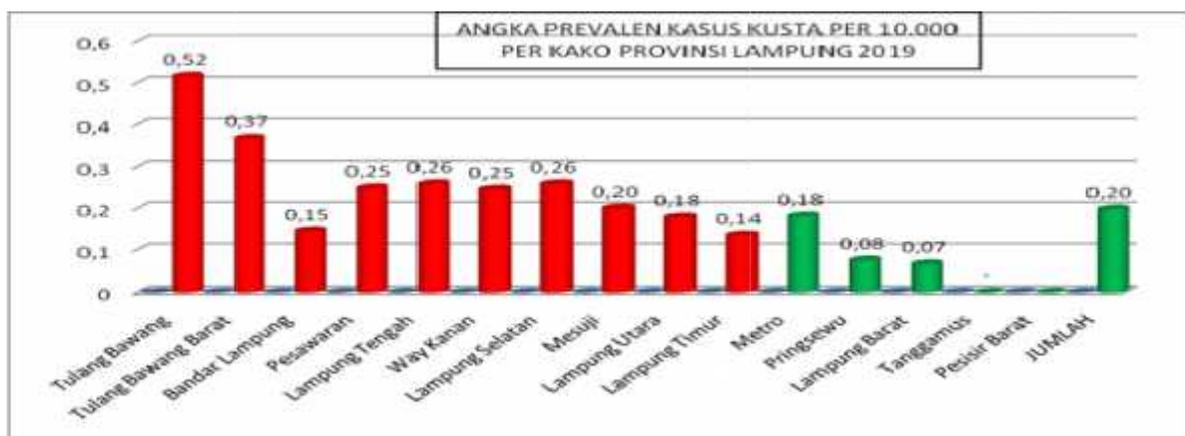


Dari Gambar tersebut terlihat dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Lampung Kabupaten Pesawaran menduduki kasus tertinggi selama 1 (satu) tahun sebesar 1,97 penderita/ 1.000 penduduk, sedangkan untuk Kabupaten Pesisir Barat 0,41/1.000 penduduk, sedangkan Kabupaten/Kota yang lain kasus penderita malaria sudah dapat di turunkan di bawah 1 / 1.000 penduduk.

- Program Kusta

Penemuan penderita baru (case finding) penyakit kusta di Propinsi Lampung dilaksanakan melalui kegiatan penemuan secara aktif melalui survey kontak dan case survey dan melalui kegiatan secara pasif melalui pemeriksaan sukarela, yang dilaksanakan secara terpadu oleh Wasor Kabupaten/Kota serta petugas puskesmas. Jumlah penderita baru semuanya 125 penderita untuk tahun 2019 dengan rincian kasus PB sebanyak 11 dan MB sebanyak 114 dengan jumlah kasus anak 8.

Grafik.9
Prevalensi Kusta Per 10.000 Penduduk Tahun 2019 Prov. Lampung

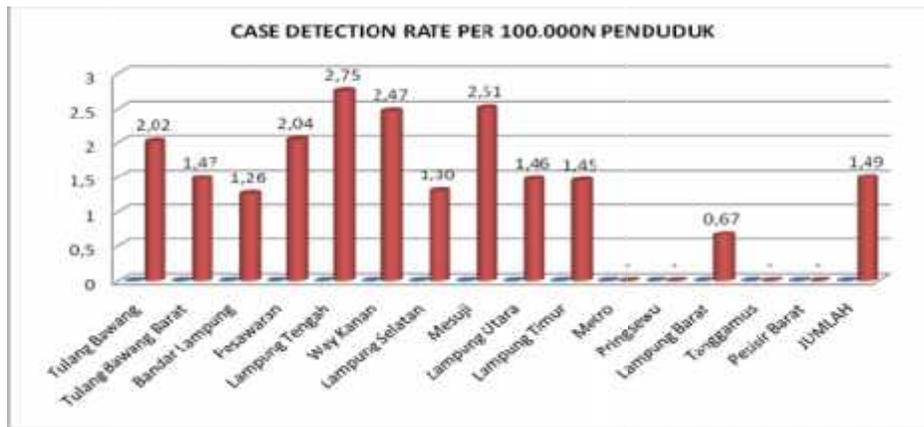


Untuk Proporsi cacat Tingkat II Tahun ini 6%, dengan jumlah terbanyak dari Kabupaten Pesawaran.

Adapun gambaran hasil kegiatan penemuan penderita per Kabupaten/ Kota pada tahun 2019 penderita baru tertinggi dari Kabupaten Lampung Tengah. Dari segi Case finding ini memang terjadi penurunan pada 3 tahun terakhir yang disebabkan antara lain kurangnya kegiatan di kabupaten/kota untuk program kusta. Dengan melihat situasi tersebut perlu dilakukan langkah-langkah akselerasi dalam kegiatan penemuan penderita baru, untuk dapat mencapai eliminasi kusta pada tahun 2020, bila memungkinkan hingga tingkat puskesmas. Sebagian besar kegiatan dari dana Dekon yang dilakukan di 4 kabupaten kota utk pencarian kasusnya. Sedangkan anggaran dari kabupaten sendiri amat minim untuk kegiatan Penanggulangan program kusta Frambusia.



Grafik.10
CDR PER 100.000 Penduduk Tahun 2019 Prov. Lampung



Grafik.11
Proporsi Penderita Baru Tahun 2019 Prov. Lampung



Bila dilihat menurut Kabupaten/Kota, angka kesembuhan pada tahun 2019 ini, disumbangkan oleh 2 Kabupaten/ Kota, dimana angka terbesar disumbangkan oleh kabupaten lampung Timur sebesar 5 kasus dari kasus yang RFT sebanyak 6 (%). Belum tercapainya angka kesembuhan tersebut antara lain disebabkan oleh masih rendahnya keteraturan pengobatan sebagai dampak dari kurang-nya kualitas monitoring pengobatan. Masih rendahnya pengetahuan penderita tentang pentingnya berobat secara teratur serta rendahnya peran serta masyarakat juga mempunyai andil dalam menjaga kualitas pengobatan penderita.

Grafik.12
Proporsi Tipe MB Tahun 2019 Prov. Lampung





Grafik.13
Proporsi Wanita Tahun 2019 Prov. Lampung



- Angka Prevalensi mencapai < 1 per 10.000 penduduk
Penemuan kasus untuk tahun ini masih rendah di bandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah Penemuan kasus baru untuk tahun 2017 sebanyak 164 kasus dan tahun 2018 sebanyak 150 kasus. Untuk angka penemuan kasus baru tertinggi di kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah 35 pasien baru. Angka kesakitan (Prevalence Rate) kusta di Propinsi Lampung berfluktuasi dari 0,26 per 10.000 penduduk pada tahun 2016 menjadi 0,32 pada tahun 2017 dan 0,18 per 10.000 penduduk pada tahun 2018 serta 0,20 % pada tahun 2019.
- RFT Rate type PB 90 % dari yang diobati awal tahun
Tahun 2019 RFT type PB sudah mencapai 100%
- RFT Rate type MB 90 % dari yang diobati mulai awal tahun 2 tahun sebelumnya.
Tahun 2019 RFT type MB baru mencapai 67 %
- Proporsi Cacat Tingkat II Penderita baru menurun menjadi < 5 %.
Proporsi Cacat Tingkat II Penderita baru pada tahun 2019 masih belum mencapai target indikator karena masih berada pada angka 6 %
- Proporsi anak menurun menjadi < 5 %
Proporsi anak yang ditemukan menderita penyakit kusta pada tahun 2019 sebanyak 6 % sehingga masih belum mencapai target indikator.

- **Program DBD**

Tabel.10
Gambaran Kasus DBD Provinsi Lampung Tahun 2018 Dan 2019

KAB/KOTA	KASUS TAHUN 2018	KASUS TAHUN 2019
KOTA BANDAR LAMPUNG	1113	1198
KAB. LAMPUNG UTARA	106	190
KAB. LAMPUNG TENGAH	109	322
KAB. LAMPUNG SELATAN	241	519
KAB. LAMPUNG BARAT	13	112

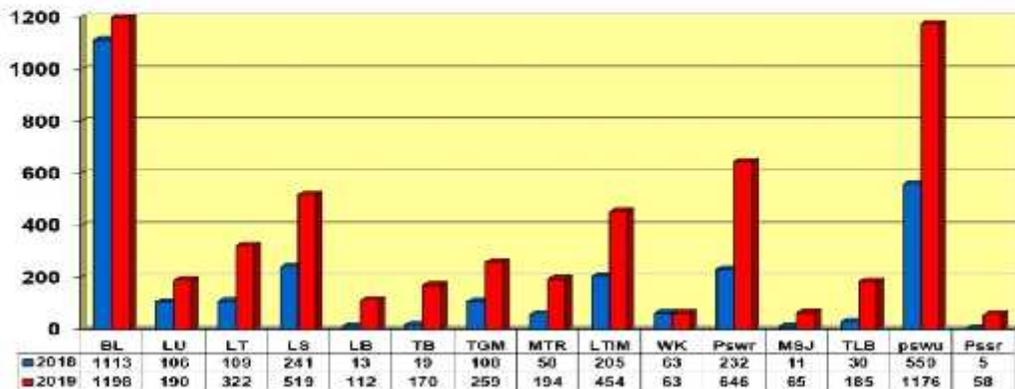


KAB/KOTA	KASUS TAHUN 2018	KASUS TAHUN 2019
KAB. TULANG BAWANG	19	170
KAB. TANGGAMUS	108	259
KOTA METRO	58	194
KAB. LAMPUNG TIMUR	205	454
KAB. WAY KANAN	63	63
KAB. PESAWARAN	232	646
KAB. MESUJI	11	65
KAB. TULANG BAWANG BARAT	30	185
KAB. PRINGSEWU	559	1176
KAB. PESISIR BARAT	5	58
PROVINSI	2872	5611

Untuk kasus DBD Provinsi Lampung berdasarkan grafik tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019 juga dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik.14
Kasus DBD Provinsi Lampung Tahun 2018-2019

KASUS DBD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019



Keterangan :

Indikator : 49 per 100.000 penduduk

Untuk Tahun 2019 sampai dengan bulan Desember dibandingkan dengan tahun 2018 seluruh Kab/Kota mengalami kenaikan yang cukup tinggi jumlah kasus DBD.

Pada grafik terlihat bahwa masih banyak kab/kota tahun 2019 mengalami kenaikan dua kali lipat dari jumlah kasus DBD di tahun 2018. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit DBD saat ini dimulai dari masing-masing Rumah Tangga. Upaya pengendalian DBD berjalan optimal jika tiap rumah tangga berperan dan rutin melaksanakan PSN 3M Plus seminggu sekali. Lakukan manajemen program yang baik dan diharapkan agar kab/kota juga dapat menganggarkan biaya dalam upaya pengendalian DBD baik dalam bentuk pertemuan, sosialisasi, maupun operasional lapangan, juga harus adanya kebutuhan logistik yang cukup. Saat ini sedang digalakkan gerakan 1 Rumah 1 Jumantik dimana diperlukan adanya peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan setiap keluarga melalui pembudayaan PSN 3M Plus.



▪ Capaian Indikator Program dengan Target Nasional

Untuk capaian program DBD tahun 2019 Angka Kesakitan (IR) berada dibawah Indikator Nasional dan Angka Kematian (CFR) juga masih berada dibawah Indikator Nasional.

Tabel.11
INDIKATOR DAN CAPAIAN PROGRAM DBD TAHUN 2019

	Indikator Nasional	Kondisi di Lampung
Angka Kesakitan (IR)	49 per 100.000 pddk	66,42 per 100.000 pddk
Angka Kematian (CFR)	< 1 %	0,3

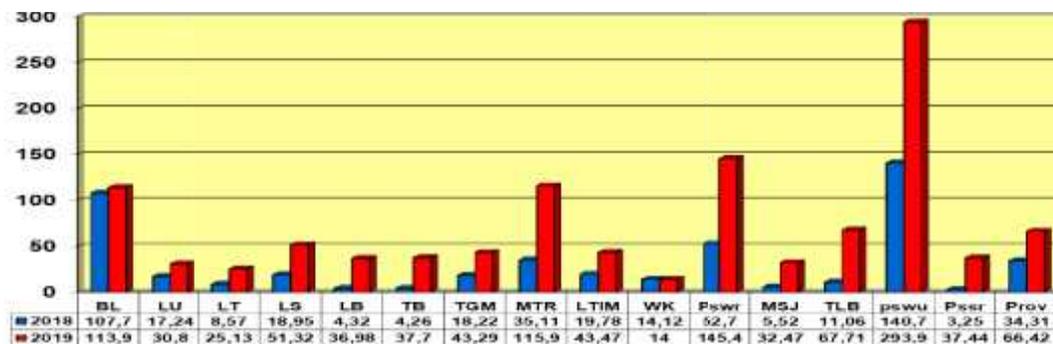
Keterangan :

- Untuk angka kesakitan (IR) sudah melebihi Indikator nasional
- Angka Kematian (CFR) berada dibawah Indikator Nasional

▪ Angka Kesakitan (IR)

Selama dua tahun terakhir (2018 - 2019) seluruh Kab/kota di provinsi Lampung mengalami kenaikan angka kesakitan (IR) kasus DBD. Untuk lebih rincinya dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:

Grafik.14
Kasus DBD Provinsi Lampung Tahun 2018-2019
DISTRIBUSI ANGKA KESAKITAN (IR/100.000 pdk) DBD
PER KAB/KOTA TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019



Keterangan :

Indikator : 49 per 100.000 penduduk

Untuk Tahun 2019 IR DBD sudah melebihi dari Indikator Nasional.

Untuk capaian indikator tahun 2019 persentase Kabupaten/Kota dengan Angka Kesakitan (IR) DBD < 49 per 100.000 penduduk dengan target adalah 68 %.

Angka Kesakitan (IR) DBD < 49 per 100.000 penduduk ada 9 kabupaten sedangkan yang IR > 49 per 100.000 penduduk atau yang berada diatas indikator ada 6 kab/kota.

Banyak hal yang harus dilakukan dalam upaya pengendalian penyakit DBD, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan sehingga kasus dapat diturunkan yaitu : Penyuluhan baik di Rumah Sakit dan Fasilitas kesehatan lainnya, penyuluhan di sekolah, pemukiman, melalui media massa dan tempat-tempat umum. Pemantauan Jentik Berkala, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), Larvasidasi Selektif dan Fogging dengan Insektisida.



Untuk saat ini sedang digalakkan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik yang bertujuan menurunkan angka penderita dan angka kematian akibat DBD dengan meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga untuk melakukan pencegahan. Gerakan ini merupakan program pemberantasan sarang nyamuk yang mengajak seluruh masyarakat berperan aktif dalam mencegah perkembangbiakan nyamuk, khususnya jentik nyamuk Aedes. Program ini diyakini akan berjalan dengan baik jika ada dukungan dan peran serta masyarakat Indonesia.

▪ Angka Kematian (CFR) DBD

Untuk Angka Kematianya (CFR) tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 hampir semua Kab/kota mengalami penurunan adalah kabupaten Lampung Tengah, Lampung Barat, Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran dan Kota Metro, yang terjadi kenaikan CFR adalah Kabupaten Lampung Utara, Tulang Bawang, Lampung Timur, dan Pesisir Barat. Untuk Angka kematian yang tinggi maka salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah memperbaiki tatalaksana kasus DBD di setiap tingkatan bisa berupa OJT ataupun ceramah klinik swasta baik di tingkat Puskesmas maupun Rumah Sakit sehingga adanya persamaan ataupun kejelasan tentang diagnosis kasus DBD yang jelas dan sesuai standar. Lakukan tindakan dengan cepat apabila terjadi atau ditemukannya kasus DBD. Lakukan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat apabila dicurigai adanya kasus DBD agar cepat membawa pasien ke unit pelayanan terdekat. Meskipun kasus DBD meningkat namun kita upayakan agar kematian dapat ditekan. Perlunya juga meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit DBD, sehingga apabila terdapat kasus DBD ataupun gejala DBD agar segera membanya ke unit pelayanan kesehatan terdekat, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penanganannya.

Untuk Angka Kematian (CFR) bisa dilihat dalam grafik dibawah ini :

Grafik.16



Keterangan :

Indikator Angka Kematian Nasional < 1%

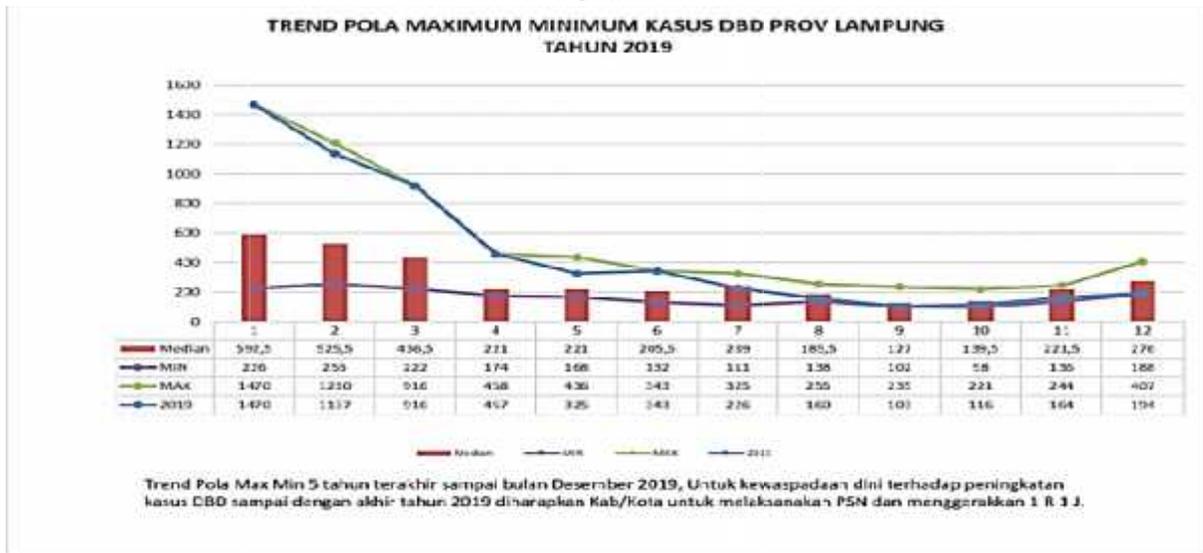
Untuk Angka Kematian (CFR) Tahun 2018 Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Barat, Tanggamus, dan Kota Metro yang melebihi indikator AKN lebih dari 1% dan Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran hampir mendekati 1%.



Untuk Angka Kematian (CFR) Tahun 2019 Kabupaten Lampung Utara dan Pesisir barat yang melebihi indikator AKN lebih dari 1% dan Kabupaten Lampung Barat hampir mendekati 1%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik.17

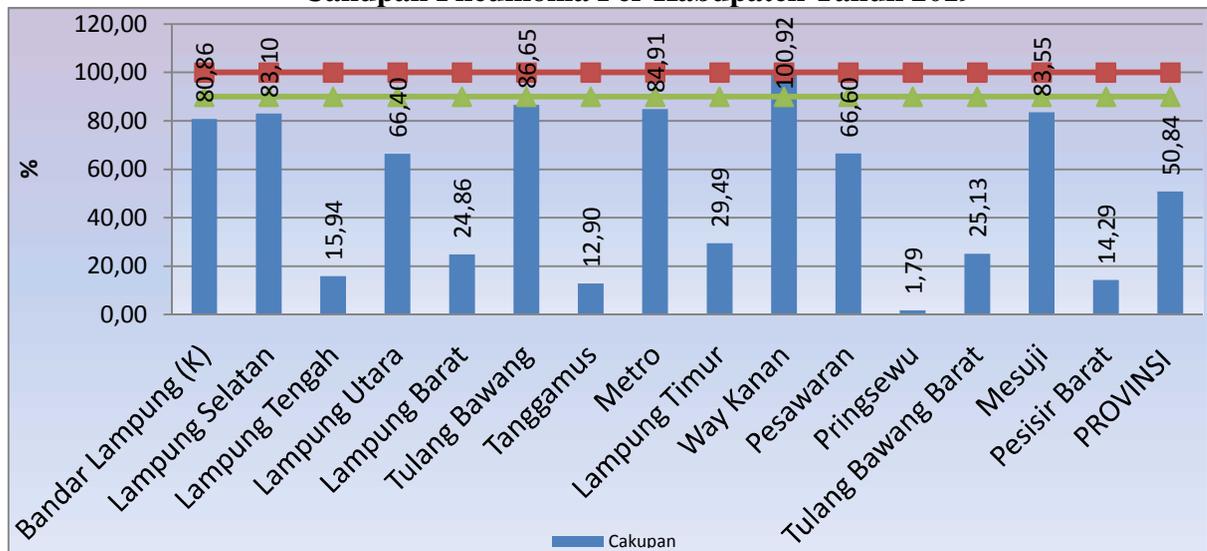


- Program ISPA

Cakupan kasus pneumonia Balita di provinsi lampung tahun 2019.

Grafik.17

Cakupan Pneumonia Per Kabupaten Tahun 2019

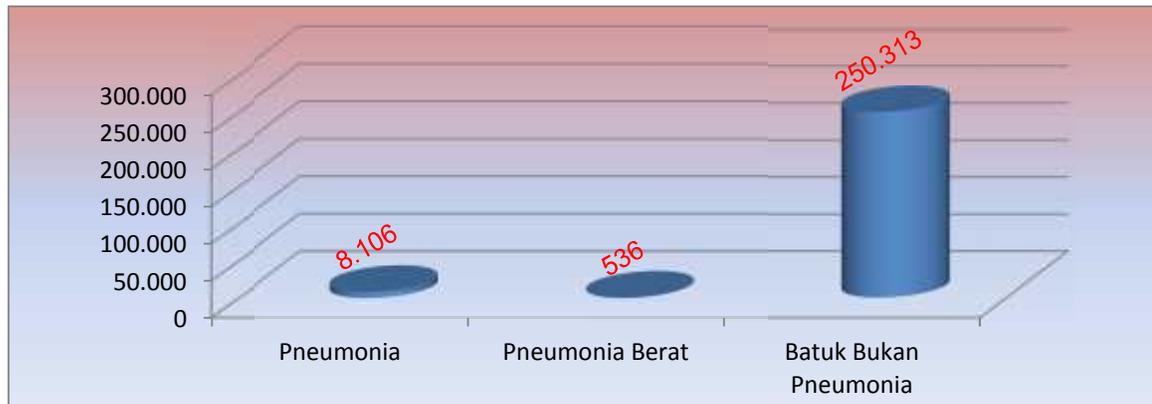


Dari grafik diatas cakupan pneumonia Balita propinsi lampung tahun 2019 adalah 50,84 % masih dibawah target nasional yaitu 90 % beberapa hal yang menjadi factor penyebab adalah:

- Puskesmas tidak melaksanakan MTBS
- Petugas puskesmas tidak melakukan tatalaksana pneumonia Balita
- Petugas puskesmas memiliki tugas rangkap sehingga tidak focus terhadap satu program:

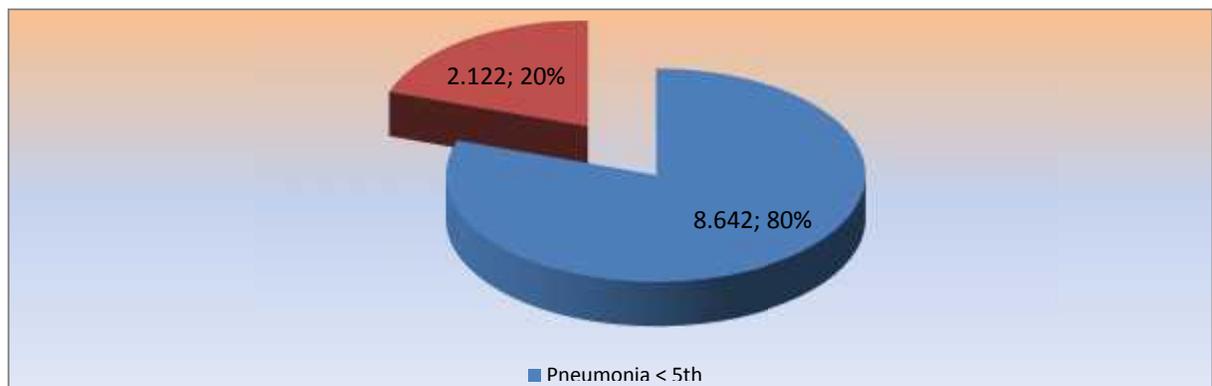


Grafik.18
Grafik Capaian Pneumonia Tahun 2019



Pada diagram di bawah Pneumonia pada balita (usia 1 – 4tahun) yang paling banyak ditemukan di puskesmas (80%) sedangkan pneumonia untuk usia > 5 tahun adalah sebesar 20%

Diagram.1
Capaian Pneumonia Tahun 2019

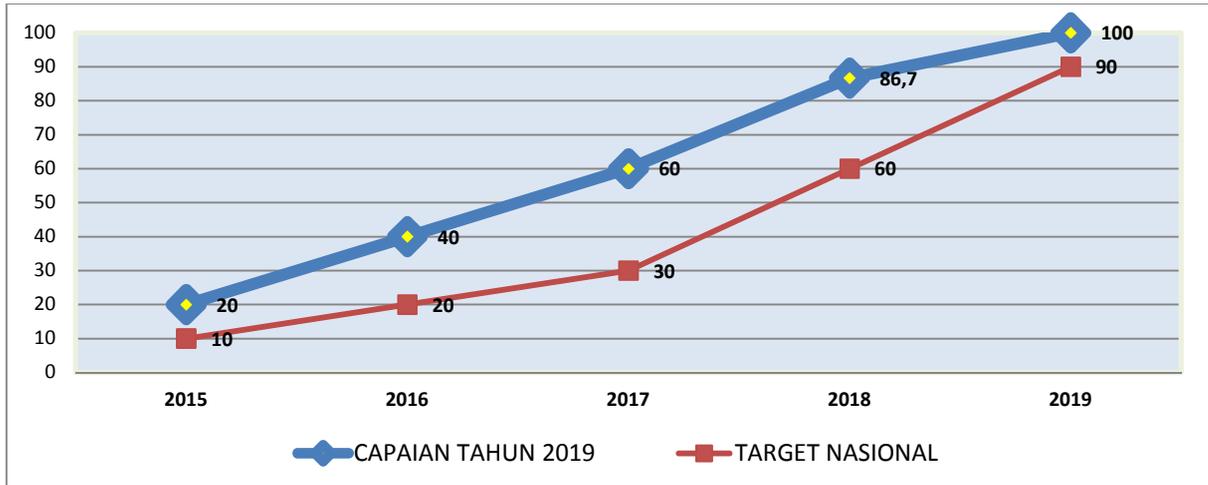


- Program HPISP

Pelaksanaan Deteksi Dini Hepatitis B dan C (DDHBC) pada provinsi lampung baru mulai di laksanakan pada tahun 2015 dengan 3 kab/kota yang melaksanakan DDHBC yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Lampung Utara. Pada tahun 2016 terdapat 3 pengembangan Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur , dan Kota Metro, tahun 2017 & 2018 Provinsi lampung mengembangkan kabupaten/kota yaitu Lampung selatan, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat , Lampung Barat, Tulang bawang & Tulang bawang Barat, dan tahun 2019 dilanjutkan ke kabupaten waykanan dan Mesuji jadi seluruh Kabupaten/kota telah melaksanakan DDHBC. *Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi lampung telah melebihi indikator pusat yaitu 60 %, karena Kabupaten/kota di provinsi lampung telah melaksanakan DDHBC sebesar 100 %.*



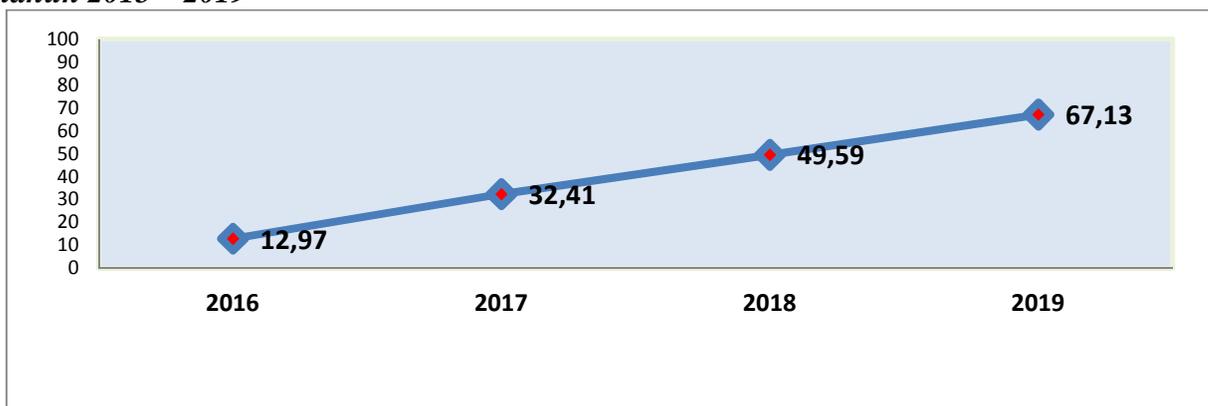
Grafik 1 : Presentase Kabupaten/kota yang melaksanakan DDHBC Provinsi lampung tahun 2015 – 2019



Tahun 2019 Program Hepatitis melakukan kegiatan Triple Eliminasi dimana kegiatan screening pada ibu hamil bukan hanya pemeriksaan hepatitis B saja namun juga HIV dan Sifilis, Kegiatan Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) pada ibu hamil yang telah discreening sebanyak 82.786 Ibu hamil dari total sasaran ibu hamil 166.924 orang , artinya capaian sebesar **67,13 %** dari target pusat sebesar **90 %**, hal ini disebabkan belum semua puskesmas yang ada di provinsi lampung melaksanakan DDHBC (baru 91,2 %) dan kegiatan screening hepatitis B, HIV, Sifilis pada ibu hamil belum terintegrasinya dengan program KIA di fasilitas kesehatan sehingga banyak ibu hamil yang ANC namun tidak diperiksa Hepatitis B. juga disebabkan tidak seluruh ibu hamil memeriksa kehamilannya di puskesmas, ada yang periksa di klinik, RS, maupun Dokter/Bidan praktek mandiri.

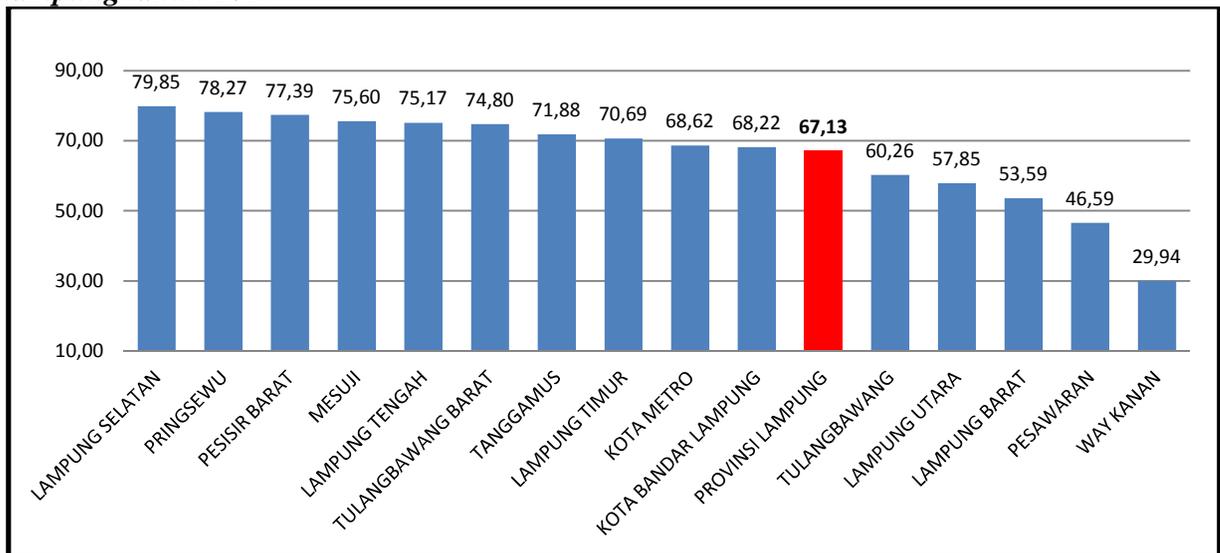
Namun secara progress pelaksanaan screeningnya meningkat di bandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal ini selain semakin luas dan banyaknya puskesmas yang melaksanakan juga kegiatan ini telah tersosialisasi di masyarakat berkat peran serta dari lintas sektoral seperti peran organisasi profesi IBI (Ikatan bidan indonesia) dan IDI (Ikatan dokter indonesia).

Grafik 2 : Presentase cakupan pemeriksaan Hepatitis B pada ibu hamil Provinsi lampung tahun 2015 – 2019

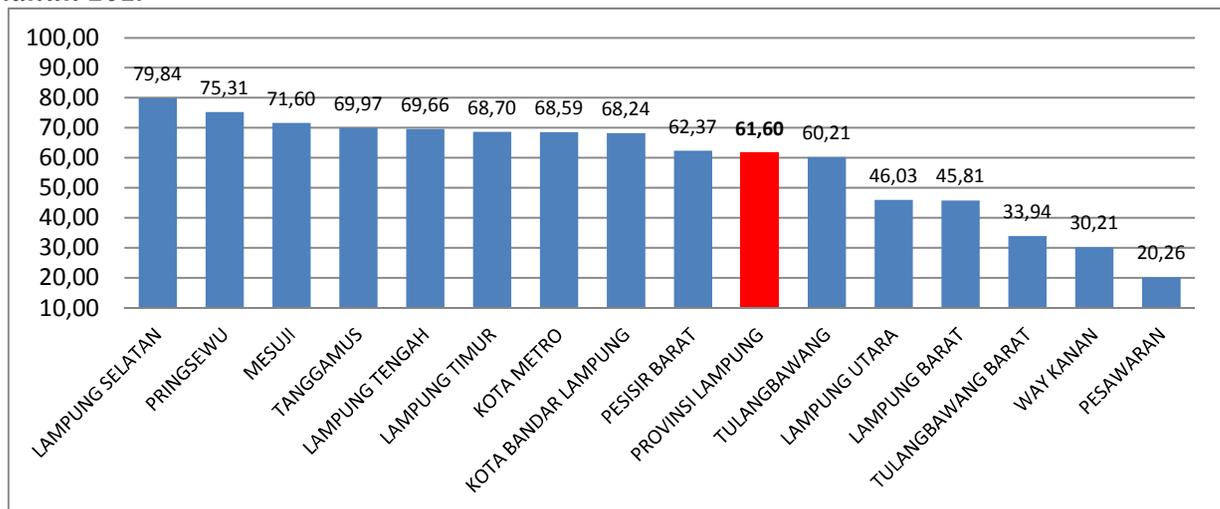




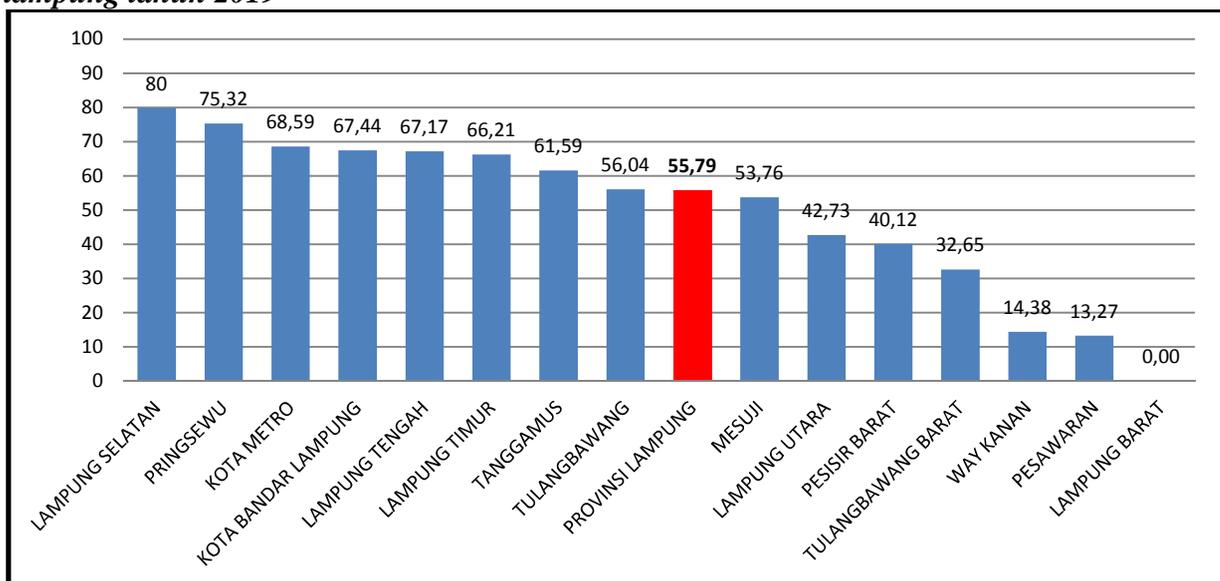
Grafik 3 : Presentase Ibu Hamil yang diperiksa Hepatitis B (Screening HBsAg) Provinsi Lampung tahun 2019



Grafik 4 : Presentase Ibu Hamil yang diperiksa HIV (Screening HIV) Provinsi Lampung tahun 2019



Grafik 5 : Presentase Ibu Hamil yang diperiksa Sifilis (Screening Sifilis) Provinsi Lampung tahun 2019



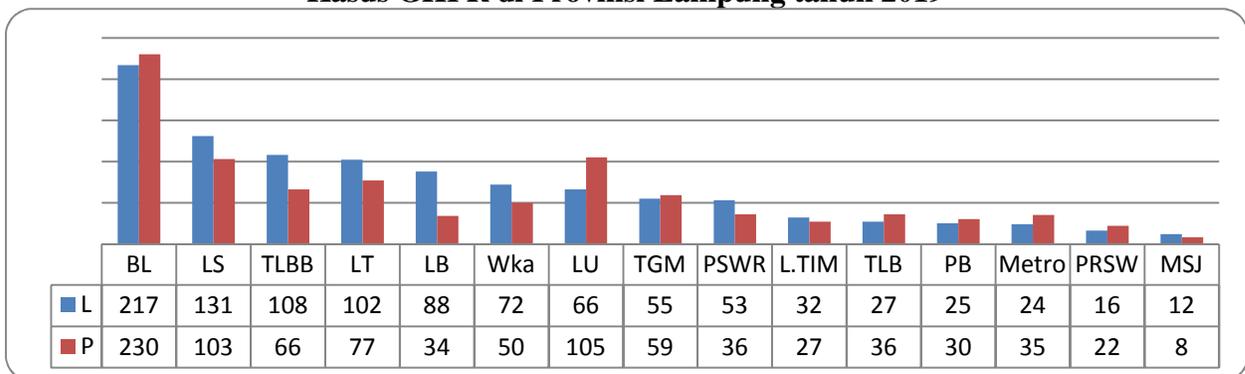


▪ **Interprestasi Grafik :**

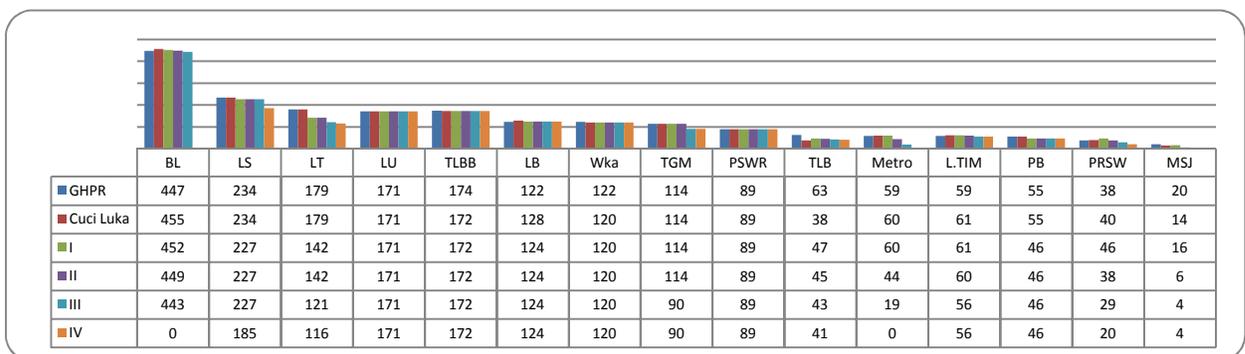
Dari 3 grafik hasil pelaksanaan Deteksi dini Hepatitis B, HIV, Sifilis pada ibu hamil tahun 2019 terdapat perbedaan capaian hasil pemeriksaan yaitu capaian Pemeriksaan Hepatitis B yaitu 58,17 %, capaian pemeriksaan HIV yaitu 52,02 %, dan capaian pemeriksaan Sifilis yaitu 46,76 %. Dari data di atas menunjukkan bahwa hasil capaian masih rendah dan terdapat perbedaan capaian, hal ini disebabkan karena pelaksanaannya belum terintegrasi dengan layanan HIV dan IMS (Sifilis) dan tidak menjadi pemeriksaan yang wajib untuk ibu hamil yang ANC ke puskesmas yang ada di provinsi lampung.

- **Program RABIES**

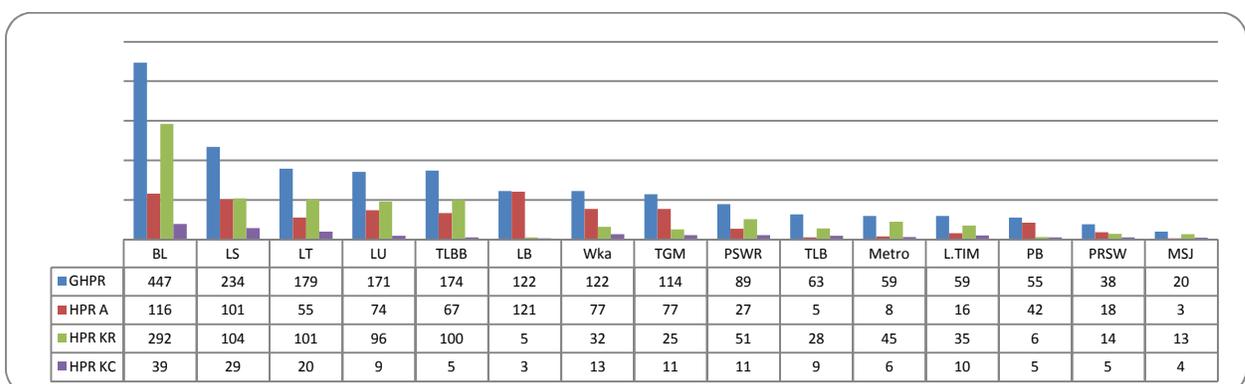
Grafik.19
Kasus GHPR di Provinsi Lampung tahun 2019



Grafik.20
Pengobatan Kasus GHPR di Provinsi Lampung



Grafik.21
Hewan Penular Rabies di Provinsi Lampung





▪ Program Filaria

Program eliminasi filariasis di Propinsi Lampung dimulai tahun 2000 dengan dilaksanakan survey cepat diseluruh Kabupaten/Kota. Dari Hasil Survei cepat tersebut ditemukan kasus klinis di Kab/Kota. Tindak lanjut dari temukannya kasus klinis tersebut adalah survey darah jari di Kab/Kota yang terdapat kasus klinis.

Tabel.12
Data survey darah jari dari tahun 2001 s/d 2012

No	Tahun Survei	Kabupaten	Hasil	Microfilaria rate
1	2001	Lampung Selatan	Negatif	< 1 %
		Tanggamus	Negatif	< 1 %
2.	2002	Lampung Timur	8 Positif	>4,17 %
3.	2003	Lampung Tengah	Negatif	< 1 %
		Lampung Barat	Negatif	< 1 %
4..	2004	Tulang Bawang	Negatif	< 1 %
		Tanggamus	Negatif	< 1 %
5.	2008	Way Kanan	Negatif	< 1 %
		Lampung Utara	Negatif	< 1 %
		Lampung Selatan	Negatif	< 1 %
		Metro	Negatif	< 1 %
6.	2012	Lampung Barat	Negatif	< 1 %
		Lampung Utara	Negatif	< 1 %
		Lampung Timur	Negatif	< 1 %
		Pesawaran	Negatif	< 1 %
		Tulangbawang	Negatif	< 1 %
		Pringsewu	Negatif	< 1 %

Dari tabel diatas bahwa hasil survey yang telah dilaksanakan di 7 Kabuapten pada th 2000- 2004 oleh Subdit Filariasis Depkes RI dengan hasil 6 Kabupaten negative dan 1 Kabupaten Lampung Timur dinyatakan positif > 4,17 %.

Pada th 2012 pada bulan Agustus- September 2012 melakukan survey ulang di 6 Kabupaten oleh BTKL Jakarta ternyata hasilnya negatif , ini menunjukkan bahwa di kab yang terdapat kasus kecacatan /kronis di beberapa desa namun hasilnya negatif . Untuk Kab Lampung Tengah , Tanggamus telah dilaksanakan bulan Maret 2013 oleh BTKL.

Sesuai dengan rekomendasi dari WHO, bila dalam satu wilayah di temukan microfilaria rate >1% (yaitu kabupaten Lampung Timur sebesar 4,17 %) maka wilayah tersebut dinyatakan daerah endemis filariasis dan harus dilakukan pengobatan massal 1 kali setahun selama 5 tahun berturut-turut dalam satu wilayah implementasi unit (Kabupaten). Pemberantasan filariasis yang sesuai dengan standart dari WHO di daerah endemis filariasis adalah dengsn DEC (Dietyl Carbamazine Citrate) dosis tunggal 6 mg/kg BB di tambah Albendazole 1 tablet (400 mg) serta paracetamol 1 tablet (500 mg) sesuai takaran.

Di propinsi Lampung daerah yang dinyatakan endemis adalah Kabupaten Lampung Timur. Sebagai daerah endemis Filariasis Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan pengobatan massal sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 dengan perolehan data sebagai berikut :



Tabel.13
Data Pengobatan Massal di Kabupaten Lampung Timur

KETERANGAN	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk	977.232	971.076	1.000.091	949.022	934.496
Jumlah Sasaran	865.093	864.198	900.205	856.208	885.849
Jumlah penduduk minum obat	744.209	681.714	846.973	784.848	835.814
% penduduk minum obat dari jumlah penduduk	76,15%	70,20%	85%	83%	89%
% penduduk minum obat dari jumlah sasaran	86,03%	78,88%	94%	92%	94%

Tabel pelaksanaan POPM Kecacingan Kabupaten Prioritas Stunting tahun 2019

No	Nama Kabupaten	Cakupan Pemberian Obat Cacing Kab. Stunting (%)					
		2016	2017	2018 Tahap 1	2018 Tahap 2	2019 Tahap 1	2019 Tahap 2
1	Lampung Selatan	86,44	91	94,97	95,62	96,22	97,81
2	Lampung Tengah	35,28	72	93,25	96,93	97,49	98,26
3	Lampung Timur	94	93	99,12	99,02	97,55	98,21
3	Tanggamus	95,93	94	97,08		96,98	99,17

Tabel pelaksanaan POPM Kecacingan Kabupaten Non Stunting tahun 2019

No	Nama Kabupaten	Cakupan Pemberian Obat Cacing Kab. Non Stunting (%)			
		2016	2017	2018	2019
1	Pringsewu	66,62	78	98,11	97,43
2	Lampung Barat	87,12	99	98,83	101,77
3	Pesisir Barat	27,75	100	99,98	101,70
4	Mesuji	93,96	113	99,18	100,57
5	Way Kanan	93,80	99	100	95,50
6	Pesawaran	98,44	97	98,24	97,05
7	Metro	99,17	105	100	100
8	Lampung Utara	88,60	59	99,14	97,26
9	Tulang Bawang	93,03	96	90,49	90,33
10	Tulang Bawang Barat	46,51	88	90,85	88,45
11	Bandar Lampung	41,41	89	90,73	91,05

■ Upaya Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Berawal dari adanya Program Posbindu PTM, kemudian dikembangkan dengan mengintegrasikan deteksi dini faktor risiko PTM dan faktor risiko kesehatan jiwa menjadi Posbindu Cerdik Jiwa. Posbindu Cerdik Jiwa merupakan Proyek Perubahan Diklat Pim IV dr. Sri Aryanti, MM, M.Kes. (Kepala Seksi P2PTM dan Keswa Dinkes Provinsi Lampung), yang dilaksanakan pada Tahun 2018. Pada tahun 2019 Posbindu Cerdik Jiwa dilaksanakan pada 15 Kabupaten / Kota, 15 puskesmas dan 75 desa, dengan capaian sasaran 45.000 jiwa. Kedepannya program ini dilanjutkan di masing-masing kabupaten kota pada sasaran yang lebih luas lagi sesuai dengan target yang ditetapkan.



Gambar 1 : Posbindu Cerdik Jiwa



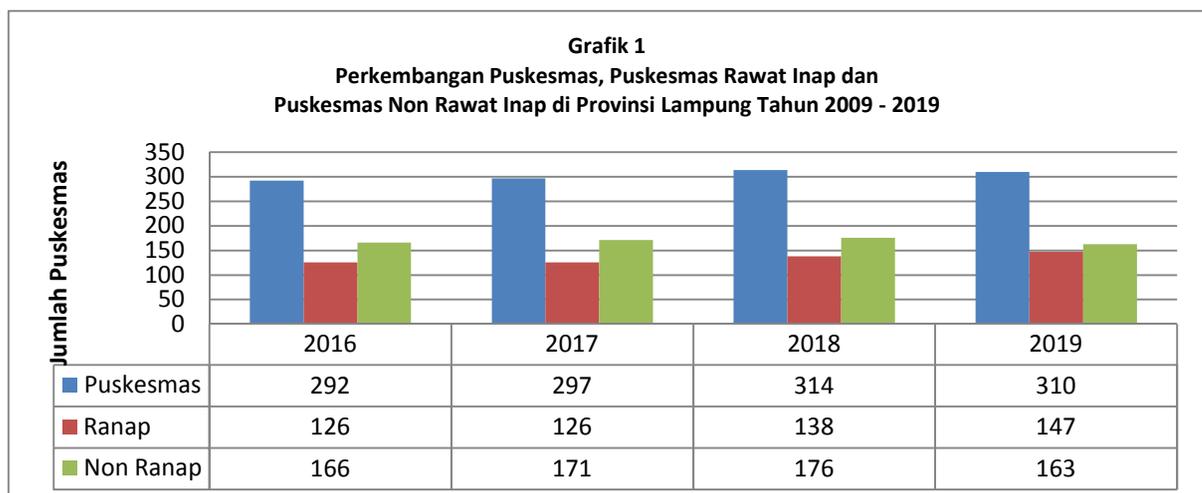
Berikut adalah capaian Kinerja pada Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan pada Program Penyakit Tidak Menular :

NO.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Capaian
1.	Cakupan orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	48,82
2.	Cakupan penderita Diabetes Melitus Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	129,02
3.	Cakupan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	49,10%
4.	Cakupan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai standar	67,19%

▪ Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar

Dari sisi peningkatan mutu pelayanan, indikator kinerja yang akan dicapai pada rencana strategis baik Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kementerian Kesehatan yaitu **jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi**. Pada tahun ini target tersebut sudah tercapai, target komulatif tahun 2019 adalah 225 kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi dari tahun 2015 dan telah tercapai **224 kecamatan (99,6%)**.

Sedangkan untuk target indikator **Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional** tahun 2019 adalah 75% dari jumlah puskesmas yang ada di Provinsi Lampung dan tercapai **67,74%**.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

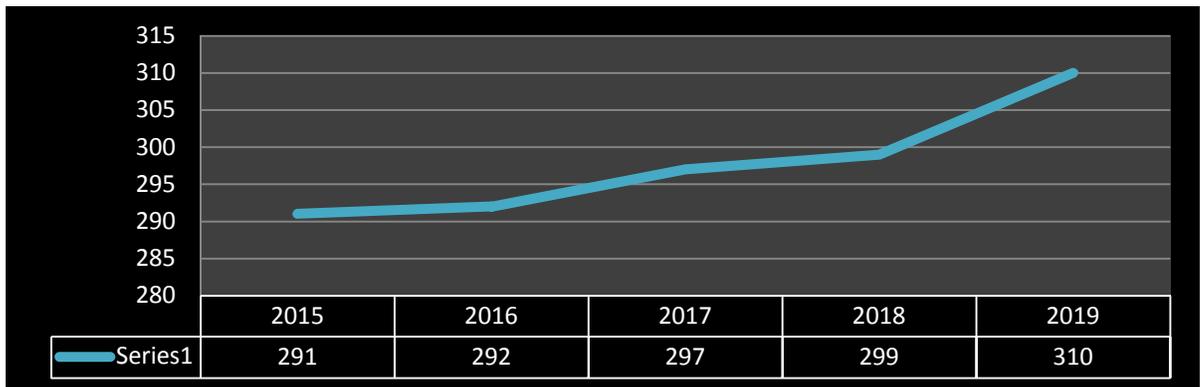
Selama tahun 2016–2019 sarana pelayanan kesehatan dasar Puskesmas Pembantu menjadi 791 Puskesmas Pembantu sehingga Rasio Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk telah mencapai 9,79 dengan arti ada 9-10 Puskesmas Pembantu yang melayani 100.000 penduduk. Perkembangan sarana Puskesmas Pembantu dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Sampai dengan akhir tahun 2019, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memiliki 310 puskesmas teregistrasi yang tersebar di 15 kabupaten/kota, 147 puskesmas merupakan puskesmas rawat inap dan 163 puskesmas non rawat inap. Dan ada 6 puskesmas yang sudah beroperasi namun belum memiliki kode registrasi. Ada kenaikan jumlah puskesmas dari



tahun 2015 sampai dengan 2019. Penambahan jumlah puskesmas selama 5 tahun terakhir dapat dilihat ada grafik berikut :

Grafik 1
Pertambahan Jumlah Puskesmas Provinsi Lampung
Tahun 2015 – 2019



Sedangkan penambahan penduduk dari tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat ada tabel berikut :

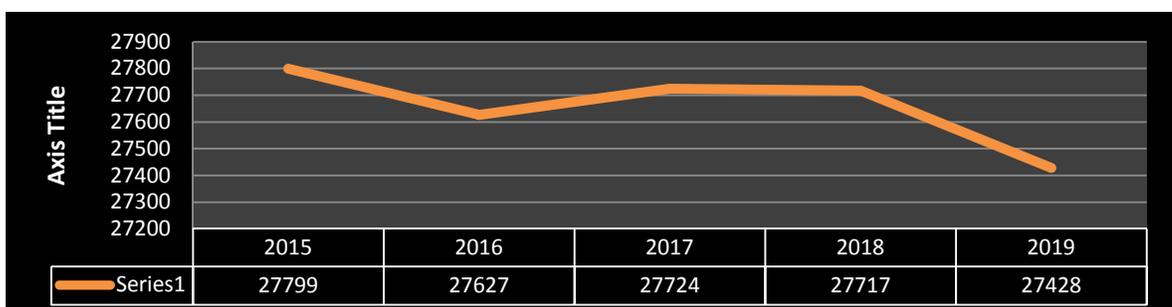
Tabel 1
Penambahan Jumlah Penduduk Provinsi Lampung
Tahun 2015 – 2019

Tahun	Penduduk	Penambahan Penduduk
2015	8 117 268	91 077
2016	8 205 141	87 873
2017	8.289.577	84.436
2018	8.370.485	80.908
2019	8.447.737	77.252

Bila dibandingkan laju penambahan penduduk dengan puskesmas maka dapat diketahui bahwa ada penurunan pertumbuhan penduduk, walaupun ada peningkatan jumlah puskesmas namun secara rasio jumlah puskesmas terhadap penduduk masih belum sesuai standar 1 : 20.000.

Rasio puskesmas terhadap penduduk dari tahun 2015 sampai dengan 2019 juga mengalami penurunan yaitu dari 1 : 27.799 pada tahun 2015 menjadi 1 : 27.251 pada tahun 2019. Adapun trend rasio puskesmas terhadap penduduk di Provinsi Lampung selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Grafik 2
Rasio puskesmas terhadap penduduk di Provinsi Lampung'
Tahun 2015 – 2019





Untuk distribusi fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Distribusi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar Provinsi Lampung
Tahun 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA											PUSLI NG	AMBU LAN	PUS TU
		RI	NRI	JML	KLINI K	DPM	drgPM	T	ST	SESUAI STANDAR	BLUD	PONED			
1	Lampung Barat	12	3	15	4	15	1	12	3	13	0	5	17	0	38
2	Tanggamus	17	7	24	6	4	2	5	0	24	24	0	24	0	54
3	Lampung Selatan	13	13	26	30	69	7	0	0	20	26	6	16	26	76
4	Lampung Timur	15	19	34	18	62	8	6	0	24	34	3	34	15	87
5	Lampung Tengah	10	29	39	29	156	12	0	0	18	0	8	38	7	114
6	Lampung Utara	8	19	27	34	31	13	0	5	27	0	6	27	12	77
7	Way Kanan	14	5	19	19	20	3	3		9	19	10	19	8	67
8	Tulang Bawang	6	12	18	15	19	4	11	4	11	0	6	18		48
9	Pesawaran	8	5	13	13	22	0			12	13	3	7	13	39
10	Pringsewu	11	2	13	22	45	7			13	13	11	9	12	34
11	Mesuji	7	6	13	6	2	0	2	5	9	12	7	11	10	43
12	Tulang Bawang Barat	7	9	16	7	0	0			5	0	6	16	6	42
13	Pesisir Barat	5	6	11	0	0	0	2	1	5	0	5	17	10	17
14	Bandar Lampung	12	18	30	80	304	229			30	30	7	18	0	50
15	Metro	2	10	12	27	34	16			11	6	2	11	0	5
	JUMLAH	147	163	310	310	783	302	41	18	231	177	85	282	119	791

Keterangan :

RI : Rawat Inap

NRI : Non Rawat Inap

TPMD : Tempat Praktik Mandiri Dokter

TPMD
rg : Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi

T : Terpencil

ST : Sangat Terpencil

Dari data dasar di atas, dengan jumlah penduduk 8.447.737 dan jumlah puskesmas 310 unit di Provinsi Lampung tersebut terdapat 147 puskesmas rawat inap (47%) dan 163 puskesmas non rawat inap (53%).

Penambahan jumlah puskesmas di Provinsi Lampung masih kurang melihat data 3 tahun terakhir, dari tahun 2015 hanya bertambah 1 puskesmas sehingga menjadi 291 puskesmas dan bertambah lagi 1 puskesmas di kabupaten sehingga berjumlah 292 puskesmas ditahun 2016 dan sampai dengan tahun 2019 puskesmas di Provinsi Lampung telah bertambah menjadi 310 puskesmas dengan rasio pertambahan puskesmas per tahun hanya 0,34%.

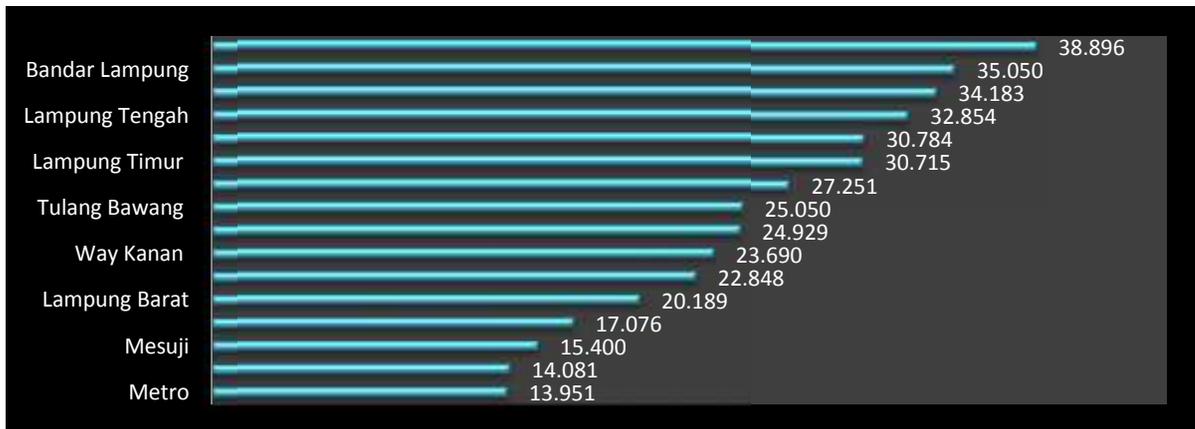
Dengan jumlah penduduk dan puskesmas yang ada diperoleh rasio puskesmas terhadap penduduk di Provinsi Lampung adalah 1:27.251 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 1 : 27.717, apabila dibandingkan dengan rasio yang ditargetkan yaitu 1 : 20.000 maka jumlah puskesmas di Provinsi Lampung masih kurang. Sedangkan untuk rasio puskesmas pembantu



terhadap penduduk pada tahun 2019 yaitu 1 : 12.103 sementara standar adalah 1 : 6.000 penduduk.

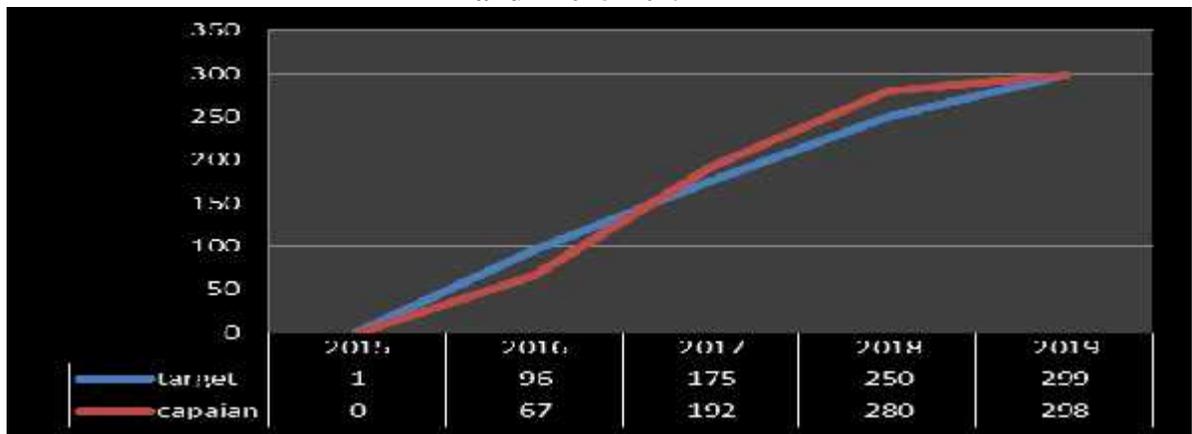
Rasio puskesmas terhadap penduduk di kabupaten/kota tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3
Rasio Puskesmas terhadap Penduduk di Kabupaten/Kota
Provinsi Lampung Tahun 2019



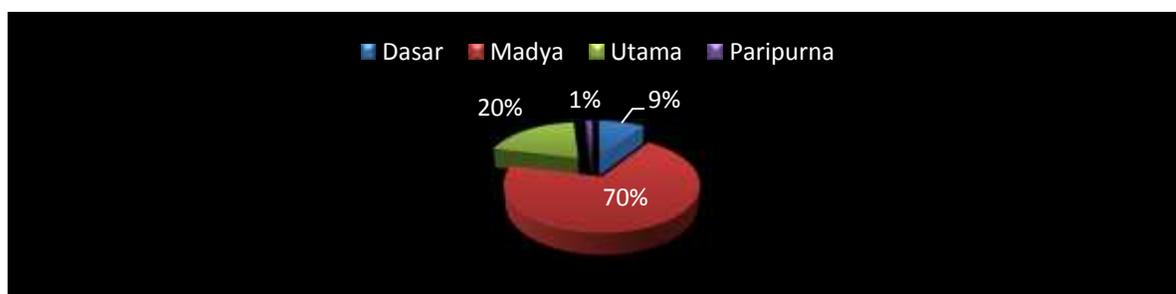
Adapun target dan capaian puskesmas terakreditasi di Provinsi Lampung periode dari tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 5
Target dan Capaian Puskesmas Terakreditasi di Provinsi Lampung
Tahun 2015-2019



Dari puskesmas yang sudah dilakukan survei sampai dengan tahun 2019, ketetapan kelulusan akreditasi adalah sebagai berikut :

Grafik 7
Tingkat Kelulusan Akreditasi Puskesmas
Provinsi Lampung Tahun 2019



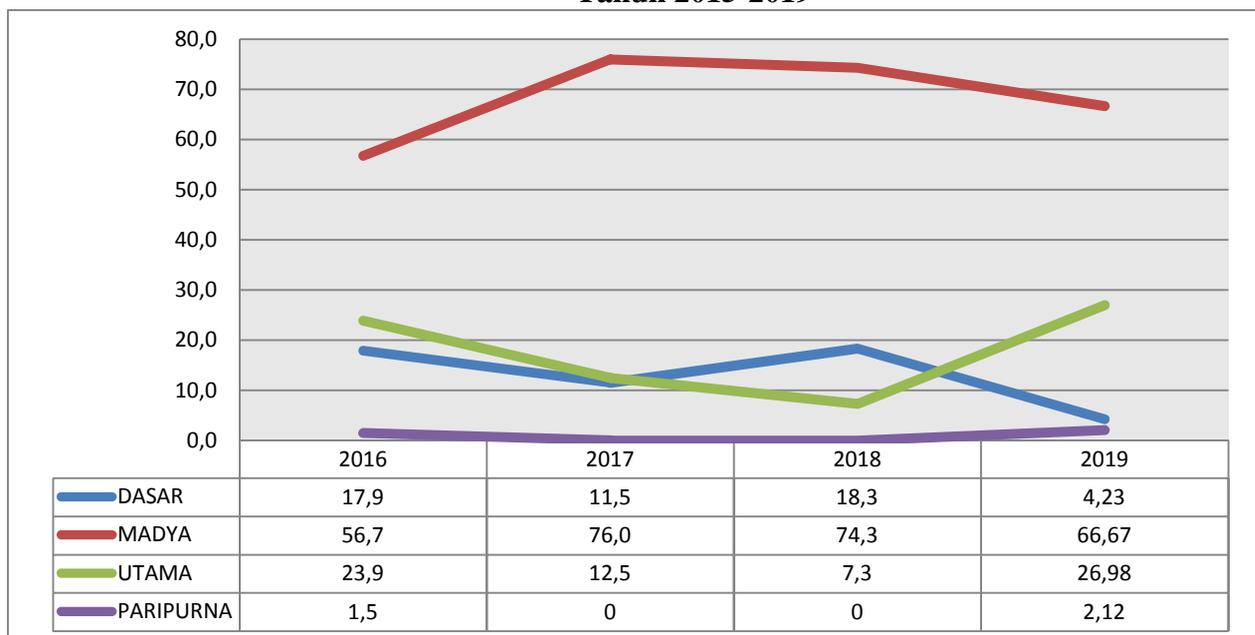


Dari total 298 puskesmas yang telah disurvei tersebut, hasil penetapan tingkat kelulusan akreditasi puskesmas yang telah dikeluarkan, ada peningkatan kelulusan, dimana untuk tingkat paripurna dari 0,36% dengan 1 puskesmas sampai dengan tahun 2018, menjadi 1,34% atau 4 puskesmas ditahun 2019, tingkat utama dari 13,57% atau 37 puskesmas hingga tahun 2018 juga meningkat mencapai 19,8% atau sejumlah 59 puskesmas ditahun 2019, tingkat madya dari 70,71% atau 198 puskesmas menjadi 69,46% atau 207 puskesmas hingga akhir 2019 dan tingkat dasar 15,36% atau 43 puskesmas terjadi penurunan yaitu hanya 28 puskesmas yang terakreditasi dasar atau 9,4%.

Secara keseluruhan ada peningkatan tingkat akreditasi Puskesmas di Provinsi Lampung, dimana ada penurunan status kelulusan madya dan dasar yang diikuti dengan peningkatan di status kelulusan utama dan paripurna, hal ini menunjukkan ada peningkatan mutu pelayanan di puskesmas, dan diharapkan akan terus meningkat mutu dan kinerjanya sesuai dengan standar PMK 46 tahun 2015 tentang Standar dan Instrumen Akreditasi FKTP.

Adapun tren kelulusan puskesmas dari tahun 2016 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 8
Trend Kelulusan Akreditasi Puskesmas di Provinsi Lampung
Tahun 2015-2019



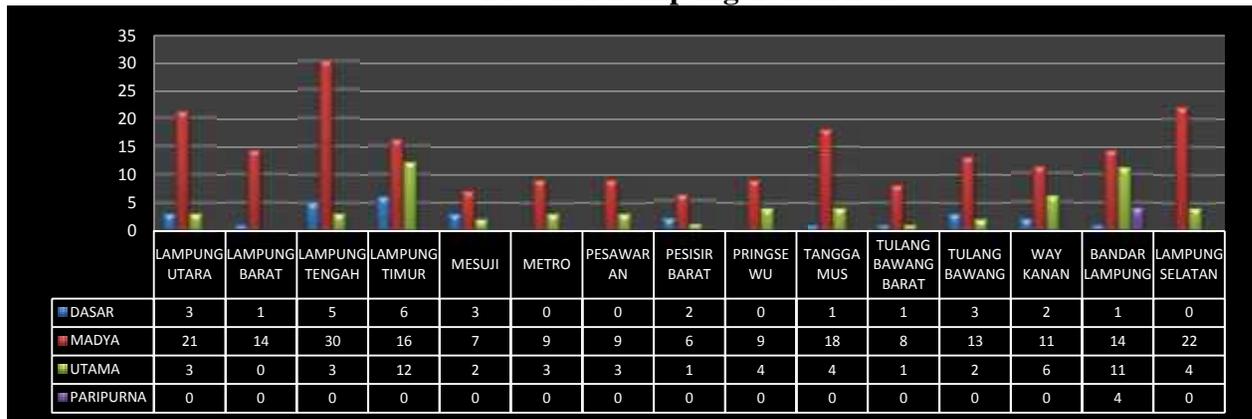
Terlihat ada penurunan tingkat kelulusan dasar dan madya di Provinsi Lampung, sedangkan persentase kelulusan utama dan paripurna ada peningkatan.

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas atau mutu pelayanan yang diberikan puskesmas di Provinsi Lampung.

Adapun distribusi status akreditasi puskesmas di kabupaten/kota se Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :



Grafik 9
Distribusi Hasil Akreditasi Puskesmas di Kabupaten/Kota
Provinsi Lampung Tahun 2019



Sedangkan rincian tingkat kelulusan tiap puskesmas per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7
Distribusi Tingkat Kelulusan Akreditasi Puskesmas
Provinsi Lampung Tahun 2016-2019

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Puskesmas	Status Akreditasi				
				Dasar	Madya	Utama	Paripurna	
1	1	LAMPUNG BARAT	Way Tenang	Fajar Bulan		1		
2	2		Batu Brak	Batu Brak		1		
3	3		Sumber Jaya	Sumber Jaya		1		
4	4		Belau	Kenali		1		
5	5		Balik Bukit	Liwa		1		
6	6		Sukau	Buay Nyerupa		1		
7	7		Suoh	Srimulyo	1			
8	8		Sekinceau	Sekinceau		1		
9	9		Pagar Dewa	Pagardewa		1		
10	10		Kebun Tebu	Kebun Tebu		1		
11	11		Lombok Seminung	Lombok		1		
12	12		Gedung Surian	Gedung Surian		1		
13	13		Bandar Negeri Suoh	Bandar Negeri Suoh		1		
14	14		Air Hitam	Air Hitam		1		
15	15		Batu Ketulis	Batu Ketulis		1		
16	1	Tanggamus	Tanggamus	Kota Agung			1	
17	2		Gisting	Gisting		1		
18	3		Talang Padang	Talang Padang			1	
19	4		Air Nanningan	Air Nanningan		1		
20	5		Sumanda	Sumanda		1		
21	6		Sumberejo	Margoyoso		1		
22	7		Wonosobo	Wonosobo		1		
23	8		Semaka	Sudimoro		1		
24	9		Bulok	Bulok Sukamara		1		
25	10		Ulu Belu	Ngarip		1		
26	11		Pulau Panggung	Pulau Panggung		1		
27	12		Pugung	Rantau Tijang		1		
28	13		Kota Agung Timur	Pasar Simpang			1	
29	14		Wonosobo	Siring Betik		1		
30	15		Semaka	Sukaraja		1		
31	16		Bandar Negeri Semuong	Sanggi		1		
32	17		Pematang Sawa	Way Nipah	1			



No.		Kabupaten/Kota	Kecamatan	Puskesmas	Status Akreditasi			
					Dasar	Madya	Utama	Paripurna
33	18		Kota Agung Barat	Negara Batin			I	
34	19		Gunung Alip	Kedaloman		I		
35	20		Cukuh Balak	Putih Doh		I		
36	21		Limau	Antar Brak		I		
37	22		Kelumbayan	Klumbayan		I		
38	23		Kelumbayan Barat	Klumbayan Barat		I		
39	1	Lampung Selatan	Natar	Tanjung Sari Natar		I		
40	2		Natar	Natar			I	
41	3		Natar	Sukadami		I		
42	4		Natar	Hajimena		I		
43	5		Natar	Branti Raya			I	
44	6		Jati Agung	Banjar Agung		I		
45	7		Jati Agung	Karang Anyar			I	
46	8		Tanjung Bintang	Tanjung Bintang		I		
47	9		Tanjung Sari	Tanjung Sari		I		
48	10		Katibung	Katibung		I		
49	11		Katibung	Tanjung Agung		I		
50	12		Merbau Mataram	Merbau Mataram		I		
51	13		Merbau Mataram	Talang Jawa		I		
52	14		Way Sulan	Way Sulan		I		
53	15		Sidomulyo	Sidomulyo		I		
54	16		Candipuro	Candipuro		I		
55	17		Way Panji	Way Panji		I		
56	18		Kalianda	Kalianda		I		
57	19		Kalianda	Way Urang		I		
58	20		Rajabasa	Rajabasa		I		
59	21		Palas	Palas		I		
60	22		Palas	Bumidaya		I		
61	23		Sragi	Sragi		I		
62	24		Penengahan	Penengahan			I	
63	25		Ketapang	Ketapang		I		
64	26		Bakauheni	Bakauheni		I		
65	1	Lampung Timur	Metro Kibang	Margototo		I		
66	2		Batanghari	Batanghari		I		
67	3		Sekampung	Sekampung			I	
68	4		Pekalongan	Pekalongan		I		
69	5		Raman Utara	Raman Utara		I		
70	6		Purbolinggo	Purbolinggo		I		
71	7		Way Jepara	Way Jepara			I	
72	8		Bandar Sribhawono	Sribhawono			I	
73	9		Sekampung Udik	Pugung Raharjo			I	
74	10		Labuhan Meringgai	Labuhan Meringgai			I	
75	11		Mataran Baru	Mataran Baru		I		
76	12		Sekampung Udik	Sidorejo		I		
77	13		Braja Selehah	Braja Harjosari	I			
78	14		Bumi Agung	Donomulyo	I			
79	15		Sukadana	Sukadana			I	
80	16		Way Bungur	Tambah Subur			I	
81	17		Labuhan Ratu	Rajabasa Lama			I	
82	18		Jabung	Adirejo		I		
83	19		Marga Tiga	Sukaraja Tiga	I			
84	20		Batanghari Nuban	Sukaraja Nuban			I	



No.		Kabupaten/Kota	Kecamatan	Puskesmas	Status Akreditasi			
					Dasar	Madya	Utama	Paripurna
85	21		Pekalongan	Gantiwarno				
86	22		Pasir Sakti	Pasir Sakti				
87	23		Melinting	Wana				
88	24		Marga Sekampung	Peniangan				
89	25		Batanghari	Bumi Emas				
90	26		Sekampung	Trimulyo				
91	27		Raman Utara	Rejo Katon				
92	28		Marga Tiga	Tanjung Harapan				
93	29		Sukadana	Pakuan Aji				
94	30		Way Jepara	Braja Caka				
95	31		Labuhan Maringgai	Karya Tani				
96	32		Gunung Pelindung	Way Mili				
97	33		Jabung	Jabung				
98	34		Waway Karya	Sumberejo				
99	1	Lampung Tengah	Way Pengubuhan	Candi Rejo				
100	2		Terusana Nunyai	Bandar Agung				
101	3		Seputih Agung	Simpang Agung				
102	4		Terbanggi Besar	Badar Jaya				
103	5		Terbanggi Besar	Poncowati				
104	6		Gunung Sugih	Gunung Sugih				
105	7		Gunung Sugih	Terbanggi Subing				
106	8		Kota Gajah	Kota Gajah				
107	9		Kota Gajah	Sri Tejkencono				
108	10		Punggur	Punggur				
109	11		Trimurjo	Simbarwaringin				
110	12		Trimurjo	Pujokerto				
111	13		Selagai Lingga	Karang Anyar				
112	14		Pubian	Segala Mider				
113	15		Pubian	Payung Rejo				
114	16		Anak Ratu Aji	Gedung Sari				
115	17		Kali Rejo	Kali Rejo				
116	18		Kali Rejo	Poncowarno				
117	19		Bangun Rejo	Bangun Rejo				
118	20		Bangun Rejo	Suka Negara				
119	21		Sendang Agung	Sendang Agung				
120	22		Padang Ratu	Surabaya				
121	23		Padang Ratu	Padang Ratu				
122	24		Anak Tuha	Haji Pemanggilan				
123	25		Bekri	Kesumadadi				
124	26		Bumi Ratu Nuban	Wates				
125	27		Bandar Mataram	Sriwijaya Mataram				
126	28		Bandar Mataram	Jati Datar				
127	29		Rumbia	Rumbia				
128	30		Putra Rumbia	Bina Karya Utama				
129	31		Way Seputih	Suko Binangun				
130	32		Seputih Banyak	Seputih Banyak				
131	33		Seputih Raman	Seputih Raman				
132	34		Seputih Raman	Rama Indra				
133	35		Seputih Surabaya	Seputih Surabaya				
134	36		Bandar Surabaya	Gaya Baru V				
135	37		Bumi Nabung	Bumi Nabung				
136	38		Seputih Mataram	Seputih Mataram				



No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Puskesmas	Status Akreditasi			
				Dasar	Madya	Utama	Paripurna
137	1	Lampung Utara	Bukit Kemuning	Bukit Kemuning			
138	2		Abung Tinggi	Ulak Rengas			
139	3		Tanjung Raja	Tanjung Raja			
140	4		Abung Barat	Ogan Lima			
141	5		Abung Tengah	Subik			
142	6		Abung Kunang	Abung Kunang			
143	7		Abung Pekurun	Pekurun			
144	8		Kotabumi	Kota Bumi I			
145	9		Kotabumi	Kota Bumi Udik			
146	10		Kotabumi Utara	Madukora			
147	11		Kotabumi Selatan	Kota Bumi li			
148	12		Kotabumi Selatan	Wonogiri			
149	13		Abung Selatan	Kalibalangan			
150	14		Abung Selatan	Kemalo Abung			
151	15		Abung Semuli	Semuli Raya			
152	16		Blambangan Pagar	Blambangan			
153	17		Abung Timur	Bumi Agung			
154	18		Abung Surakarta	Tata Karya			
155	19		Sungkai Selatan	Ketapang			
156	20		Muara Sungkai	Karang Sari			
157	21		Bunga Mayang	Tulang Bawang Baru			
158	22		Bunga Mayang	Mulyo Rejo li			
159	23		Sungkai Barat	Kubu Hitu			
160	24		Sungkai Jaya	Cempaka			
161	25		Sungkai Utara	Negara Ratu			
162	26		Hulu Sungkai	Gedung Negara			
163	27		Sungkai Tengah	Batu Nangkop			
164	1	Way Kanan	Blambangan Umpu	Blambangan Umpu			
165	2		Blambangan Umpu	Bumi Baru			
166	3		Negeri Agung	Negeri Agung			
167	4		Kasui	Kasui			
168	5		Rebang Tangkas	Rebang Tangkas			
169	6		Gunung Labuhan	Gunung Labuhan			
170	7		Banjit	Banjit			
171	8		Baradatu	Baradatu			
172	9		Pakuan Ratu	Pakuan Ratu			
173	10		Pakuan Ratu	Serupa Indah			
174	11		Negara Bathin	Purwo Agung			
175	12		Negara Bathin	Gisting Jaya			
176	13		Bumi Agung	Pisang Baru			
177	14		Buay Bahuga	Suka Bumi			
178	15		Way Tuba	Way Tuba			
179	16		Bahuga	Mesir Ilir			
180	17		Blambangan Umpu	Negeri Baru			
181	18		Negeri Besar	Negeri Besar			
182	19		Bumi Agung	Bumi Agung			
183	1	Tulang Bawang	Banjar Agung	Tulang Bawang I			
184	2		Banjar Margo	Penawar Jaya			
185	3		Meraksa Aji	Paduan Rajawali			
186	4		Penawar Jama	Sidoarjo			
187	5		Dente Talas	Waydente			
188	6		Penawar Aji	Gedung Rejo Sakti			



No.		Kabupaten/Kota	Kecamatan	Puskesmas	Status Akreditasi			
					Dasar	Madya	Utama	Paripurna
189	7		Menggala	Menggala				
190	8		Banjar Baru	Banjar Baru				
191	9		Gedung Aji	Gedung Aji				
192	10		Menggala	Tiuh Toho				
193	11		Rawajitu Selatan	Gedung Karya Jitu				
194	12		Rawajitu Selatan	Rawa Jitu				
195	13		Gedung Meneng	Gedung Meneng				
196	14		Rawajitu Timur	Rawa Jitu Timur				
197	15		Rawa Pitu	Rawa Pitu				
198	16		Gedung Aji Baru	Makarti Tama				
199	17		Dente Teladas	Pasiran Jaya				
200	18		Menggala Timur	Lebuh Dalem				
201	1	Pesawaran	Negeri Katon	Kalirejo				
202	2		Gedong Tataan	Gedong Tataan				
203	3		Teluk Pandan	Hanura				
204	4		Negeri Katon	Roworejo				
205	5		Gedung Tataan	Bernung				
206	6		Tegineneng	Tegineneng				
207	7		Padang Cermin	Padang Cermin				
208	8		Way Ratai	Bunut				
209	9		Tegineneng	Trimulyo				
210	10		Way Lima	Kota Dalam				
211	11		Kedondong	Kedondong				
212	12		Punduh Pedada	Pedada				
213	1	Pringsewu	Pardasuka	Pardasuka				
214	2		Ambarawa	Ambarawa				
215	3		Pagelaran	Pagelaran				
216	4		Pagelaran	Bumi Ratu				
217	5		Pagelaran Utara	Fajar Mulya				
218	6		Pringsewu	Pringsewu				
219	7		Pringsewu	Rejosari				
220	8		Gading Rejo	Gading Rejo				
221	9		Gading Rejo	Wates				
222	10		Sukoharjo	Sukoharjo				
223	11		Banyumas	Banyumas				
224	12		Adiluwih	Adiluwih				
225	13		Adiluwih	Bandung Baru				
226	1	Mesuji	Way Serdang	Bukoposo				
227	2		Way Serdang	Hadimulyo				
228	3		Wirabangun	Simpang Pematang				
229	4		Panca Jaya	Adiluhur				
230	5		Tanjung Raya	Brabasan				
231	6		Tanjung Raya	Tri Karya Mulya				
232	7		Mesuji	Wiralaga				
233	8		Mesuji	Sidomulyo				
234	9		Mesuji Timur	Tanjung Mas Makmur				
235	10		Mesuji Timur	Margojadi				
236	11		Rawajitu Utara	Panggung Jaya				
237	12		Rawajitu Utara	Sungai Sidang				
238	1	Tulang Bawang Barat	Tulang Bawang Tengah	Mulya Asri				
239	2		Gunung Agung	Suka Jaya				
240	3		Tulang Bawang Tengah	Candra Mukti				



No.		Kabupaten/Kota	Kecamatan	Puskesmas	Status Akreditasi			
					Dasar	Madya	Utama	Paripurna
241	4		Tulang Bawang Tengah	Panaragan Jaya				
242	5		Lambu Kibang	Lambu Kibang				
243	6		Tumijajar	Daya Murni				
244	7		Tulang Bawang Udik	Karta Raharja				
245	8		Gunung Terang	Toto Mulyo				
246	9		Pagar Dewa	Pagar Dewa				
247	10		Way Kenang	Mercubuana				
248	1	Pesisir Barat	Ngambur	Ngambur				
249	2		Ngaras	Bengkunat				
250	3		Pesisir Utara	Pugung Tampak				
251	4		Karya Penggawa	Karya Penggawa				
252	5		Bengkunat	Bengkunat Belimbing				
253	6		Pesisir Selatan	Biha				
254	7		Lemong	Lemong				
255	8		Pesisir Tengah	Krui				
256	9		Pulau Pisang	Pulau Pisang				
257	1	Bandar Lampung	Rajabasa	Rajabasa Indah				
258	2		Kedamaian	Satelit				
259	3		Teluk Betung Utara	Sumur Batu				
260	4		Kedaton	Kedaton				
261	5		Tanjung Karang Barat	Susunan Baru				
262	6		Panjang	Panjang				
263	7		Tanjung Karang Barat	Gedong Air				
264	8		Langkapura	Segala Mider				
265	9		Sukarame	Sukarame				
266	10		Bumi Waras	Sukaraja				
267	11		Tanjung Karang Pusat	Way Kandis				
268	12		Tanjung Senang	Simpur				
269	13		Telukbetung Timur	Kota Karang				
270	14		Teluk Betung Selatan	Pasar Ambon				
271	15		Teluk Betung Utara	Kupang Kota				
272	16		Kemiling	Beringin Raya				
273	17		Kemiling	Kemiling				
274	18		Teluk Betung Barat	Bakung				
275	19		Sukabumi	Sukabumi				
276	20		Sukabumi	Way Laga				
277	21		Kemiling	Pinang Jaya				
278	22		Telukbetung Timur	Sukamaju				
279	23		Enggal	Kebon Jahe				
280	24		Labuhan Ratu	Labuhan Ratu				
281	25		Tanjung Karang Pusat	Palapa				
282	26		Way Halim	Way Halim				
283	27		Sukabumi	Campang Raya				
284	28		Tanjung Karang Timur	Kampung Sawah				
285	29		Sukarame	Korpri				
286	30		Sukarame	Permata Sukarame				
287	1	Metro	Metro Pusat	Yosomulyo				
288	2		Metro Selatan	Sumber Sari Bantul				
289	3		Metro Pusat	Metro				
290	4		Metro Utara	Banjarsari				
291	5		Metro Barat	Ganjar Agung				
292	6		Metro Timur	Iringmulyo				



No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Puskesmas	Status Akreditasi			
				Dasar	Madya	Utama	Paripurna
293	7		Metro Timur		I		
294	8		Metro Timur		I		
295	9		Metro Utara		I		
296	10		Metro Utara		I		
297	11		Metro Barat		I		
298	12		Metro Selatan			I	

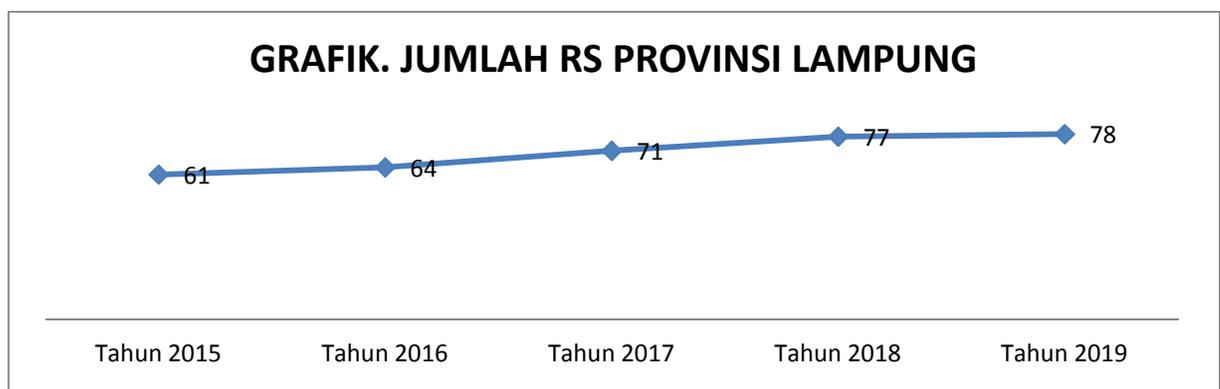
survei reakreditasi
survei perdana

▪ Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan

Dalam UU Rumah Sakit tahun 2009, peningkatan mutu wajib dilakukan rumah sakit, dimana pengakuan peningkatan mutu RS tersebut diwujudkan melalui akreditasi rumah sakit. Saat ini akreditasi menjadi satu bentuk kendali mutu yang dikaitkan dengan dengan, Jaminan Kesehatan Nasional dan Sistem Rujukan Nasional. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mensyaratkan akreditasi menjadi kriteria kredensial dalam kerjasama dengan rumah sakit.

Untuk data dasar fasilitas kesehatan rujukan di Provinsi Lampung Tahun 2019, memiliki 78 rumah sakit yang tersebar di provinsi dan 15 kabupaten/kota.

Grafik 1
Jumlah Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta
Provinsi Lampung Tahun 2019



Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Distribusi Rumah Sakit di Provinsi Lampung Tahun 2019

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Rumah Sakit					
		Kepemilikan			Jenis Pelayanan		
		Pemerintah	Swasta	Total	Umum	Khusus	Total
1	Lampung Barat	1	1	2	1	1	2
2	Tanggamus	1	1	2	2	0	2
3	Pringsewu	1	6	7	4	3	7
4	Lampung Selatan	2	3	5	4	1	5
5	Lampung Timur	1	4	5	3	2	5
6	Lampung Tengah	1	8	9	7	2	9
7	Lampung Utara	1	5	6	6	0	6
8	Way Kanan	1	2	3	3	0	3
9	Tulang Bawang	1	2	3	3	0	3
10	Bandar Lampung	5	16	21	10	11	21
11	Metro	1	7	8	6	2	8
12	Pesawaran	1	1	2	2	0	2



No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Rumah Sakit					
		Kepemilikan			Jenis Pelayanan		
		Pemerintah	Swasta	Total	Umum	Khusus	Total
13	Tulang Bawang Barat	1	1	2	2	0	2
14	Mesuji	1	1	2	1	1	2
15	Pesisir Barat	1	0	1	1	0	1
	JUMLAH	20	58	78	55	23	78

Sumber : Laporan Evaluasi Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov.Lampung 2019

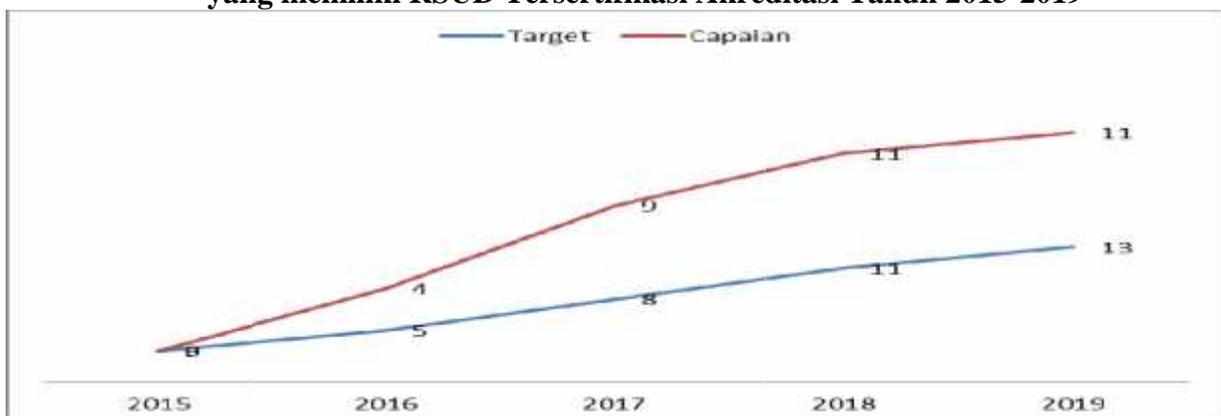
Provinsi Lampung memiliki 4 rumah sakit rujukan dimana 3 merupakan rumah sakit umum dan yang lain rumah sakit swasta, sementara rumah sakit khusus jiwa sebagai rujukan di Provinsi Lampung.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Provinsi Lampung memiliki 78 rumah sakit, berdasarkan kepemilikan terdiri dari 20 rumah sakit pemerintah (25,64%) dan 58 rumah sakit swasta (74,36%). Sedangkan berdasarkan klasifikasi dari 78 rumah sakit tersebut 55 merupakan rumah sakit umum (70,51%) dan 23 merupakan rumah sakit khusus (29,49%).

jumlah tempat tidur yang ada di Provinsi Lampung sebanyak 7728 tempat tidur, jika dibandingkan rasio tempat tidur terhadap penduduk dimana 1 tempat tidur dapat digunakan oleh 1.500 penduduk maka dengan jumlah penduduk tahun 2019 9.102.840 jiwa maka seharusnya jumlah tidur yang tersedia adalah 7728 tempat tidur, sehingga masih kurang 1659 tempat tidur.

Untuk target dan capaian indikator jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD tersertifikasi akreditasi nasional tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 5
Target dan Capaian Indikator Jumlah Kabupaten/kota yang memiliki RSUD Tersertifikasi Akreditasi Tahun 2015-2019



Sumber : Seksi Rujukan Dinas Kesehatan 2019

Untuk target indikator kinerja jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi pada tahun 2019 tercapai 100%.

Adapun pemetaan akreditasi rumah sakit kabupaten/kota se Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4
Capaian Akreditasi Rumah Sakit di Provinsi Lampung Tahun 2019

NO	Nama Rumah Sakit	Kelas	Kab / Kota	Status
1	RS Umum Graha Husada	C	Kota Bandar Lampung	Tingkat Paripurna
2	RS Umum Imanuel Way Halim	B	Kota Bandar Lampung	Tingkat Paripurna



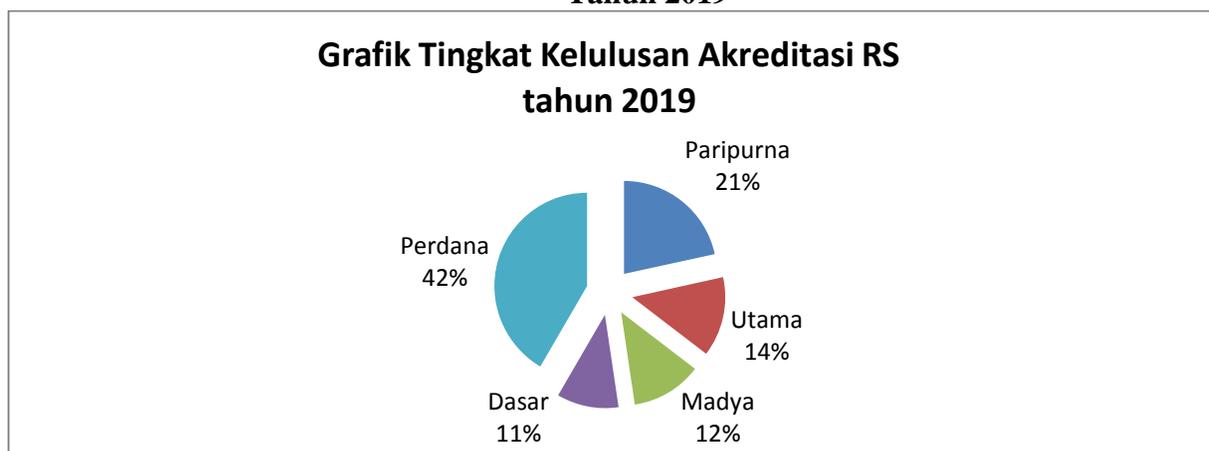
NO	Nama Rumah Sakit	Kelas	Kab / Kota	Status
3	RS Umum Daerah Dr H Abdul Moeloek	A	Kota Bandar Lampung	Tingkat Paripurna
4	RS Umum Bumi Waras	C	Kota Bandar Lampung	Tingkat Paripurna
5	RS Tk IV 02.07.04	C	Kota Bandar Lampung	Tingkat Paripurna
6	RS Umum Advent Bandar Lampung	C	Kota Bandar Lampung	Tingkat Paripurna
7	RS Umum Mardi Waluyo	C	Kota Bandar Lampung	Tingkat Utama
8	RS Mata Lampung Eye Center (LEC)	C	Kota Bandar Lampung	Tingkat Utama
9	RS Umum Urip Sumoharjo	B	Kota Bandar Lampung	Tingkat Utama
10	RS Umum Pertamina-Bintang Amin Lampung	C	Kota Bandar Lampung	Tingkat Utama
11	RS Jiwa Bandar Lampung	B	Kota Bandar Lampung	Tingkat Dasar
12	RS Ibu dan Anak Puri Betik Hati	C	Kota Bandar Lampung	Lulus Perdana
13	RS Umum Wisma Rini Pringsewu	D	Kota Bandar Lampung	Lulus Perdana
14	RS Bhayangkara Polda Lampung	C	Kota Bandar Lampung	Lulus Perdana
15	RS Ibu dan Anak Restu Bunda	C	Kota Bandar Lampung	Lulus Perdana
16	RS Umum Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo	C	Kota Bandar Lampung	Lulus Perdana
17	RS Ibu dan Anak Anugerah Medika	C	Kota Bandar Lampung	Lulus Perdana
18	RS Ibu dan Anak Mutiara Putri	C	Kota Bandar Lampung	Lulus Perdana
19	RS Ibu dan Anak Santa Anna	C	Kota Bandar Lampung	Lulus Perdana
20	RS Umum Muhammadiyah Metro	C	Kota Metro	Tingkat Paripurna
21	RS Umum Daerah Ahmad Yani Metro	B	Kota Metro	Tingkat Utama
22	RSIA Anugerah Medical Center Metro	C	Kota Metro	Tingkat Madya
23	RS Umum Islam Metro	D	Kota Metro	Lulus Perdana
24	RS Umum Permata Hati Metro	C	Kota Metro	Lulus Perdana
25	RS Umum Daerah Alimuddin Umar	C	Lampung Barat	Tingkat Paripurna
26	RS Ibu dan Anak Bunda	C	Lampung Barat	Lulus Perdana
27	RS Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM	C	Lampung Selatan	Tingkat Paripurna
28	RS Natar Medika	C	Lampung Selatan	Tingkat Madya
29	RS Airan Raya	C	Lampung Selatan	Lulus Perdana
30	RS Umum Yukum Medical Centre	C	Lampung Tengah	Tingkat Paripurna
31	RS Umum Daerah Demang Sepulau Raya	C	Lampung Tengah	Tingkat Paripurna
32	RS Umum Islam Asy-Syifaa Bandar Jaya	C	Lampung Tengah	Tingkat Paripurna
33	RS Umum Harapan Bunda	C	Lampung Tengah	Tingkat Utama
34	RS Umum Mitra Mulia Husada	D	Lampung Tengah	Tingkat Dasar
35	RS Umum Kartini	D	Lampung Tengah	Lulus Perdana
36	RS Ibu Anak Puri Adhya Paramita	C	Lampung Tengah	Lulus Perdana
37	RS Umum Az – Zahra	C	Lampung Tengah	Lulus Perdana
38	RS Ibu Anak Puti Bungsu	C	Lampung Tengah	Lulus Perdana
39	RS Ibu dan Anak Ibunda	C	Lampung Timur	Tingkat Utama
40	RS Umum Aka Medika Sribhawono	C	Lampung Timur	Tingkat Madya
41	RS Umum Daerah Sukadana	C	Lampung Timur	Tingkat Madya
42	RS Umum Permata Hati	C	Lampung Timur	Lulus Perdana
43	RS Ibu dan Anak Mawar	C	Lampung Timur	Lulus Perdana
44	RS Umum Handayani	C	Lampung Utara	Tingkat Utama
45	RS Umum Daerah May Jen HM Ryacudu	C	Lampung Utara	Tingkat Madya
46	RS Medika Insani	D	Lampung Utara	Lulus Perdana
47	RS Umum HI. Muhammad Yusuf	D	Lampung Utara	Lulus Perdana
48	RS Umum Daerah Ragab Begawe Caram	C	Mesuji	Tingkat Madya
49	RS Umum Daerah Pesawaran	C	Pesawaran	Tingkat Madya
50	RS Umum Gladish Medical Center	D	Pesawaran	Lulus Perdana
51	RSUD KH. Muhammad Thohir KRUI	D	Pesisir Barat	Tingkat Dasar



NO	Nama Rumah Sakit	Kelas	Kab / Kota	Status
52	RS Umum Daerah Pringsewu	C	Pringsewu	Tingkat Paripurna
53	RS Ibu dan Anak Mutiara Hati	C	Pringsewu	Tingkat Dasar
54	RSU Surya Asih	D	Pringsewu	Lulus Perdana
55	RS Ibu dan Anak Harapan Bunda	C	Pringsewu	Lulus Perdana
56	RS Umum Mitra Husada	C	Pringsewu	Tingkat Paripurna
57	RS Panti Secanti	D	Tanggamus	Lulus Perdana
58	RS Umum Daerah Kota Agung	C	Tanggamus	Lulus Perdana
59	RS Umum Daerah Menggala Tulang Bawang	B	Tulang Bawang	Tingkat Madya
60	RS Umum Penawar Medika	D	Tulang Bawang	Tingkat Dasar
61	RS Umum Mutiara Bunda	D	Tulang Bawang	Tingkat Dasar
62	RS Umum Asy-Syifa Medika	D	Tulang Bawang Barat	Tingkat Dasar
63	RS Umum Haji Kamino	C	Way Kanan	Tingkat Utama
64	RS Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam	C	Way Kanan	Lulus Perdana
65	RS Umum Bunda	C	Way Kanan	Lulus Perdana

Tingkatan akreditasi rumah sakit yang ada di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Grafik 4
Tingkatan Akreditasi Rumah Sakit Provinsi Lampung
Tahun 2019



Pada grafik tersebut, sebagian besar rumah sakit di Provinsi Lampung adalah tipe C yaitu sebanyak 45 rumah sakit (70%), rumah sakit tipe B baik pemerintah maupun swasta berjumlah 5 rumah sakit (8%) terdiri dari 5 rumah sakit pemerintah yaitu RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung, RSUD A. Yani Kota Metro, RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang serta 1 rumah sakit swasta yaitu RSU Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung dan 1 Rumah Sakit (1%) yaitu RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung tipe A, sedangkan rumah sakit tipe D sebanyak 13 rumah sakit (20%). Sementara untuk 13 rumah sakit (20%) yang belum masuk dalam grafik capaian akreditasi dikarenakan sedang dalam proses akreditasi.

Untuk capaian SPM program pelayanan kesehatan rujukan (Kepmenkes nomor 828/Menkes/SK/IX/2008) tahun 2019 adalah:

- a. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota

Cakupan yang dimaksud adalah pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota. Sarana kesehatan yang mempunyai kemampuan gawat darurat di Provinsi Lampung adalah 77 unit dari seluruh rumah sakit yang ada di Provinsi Lampung yaitu 71 rumah sakit (100%).

Selain indikator kinerja utama yang telah ditetapkan diatas, masih ada beberapa indikator program yang mendukung indikator kinerja utama tersebut antara lain Pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit di kabupaten/kota se Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pun sejak tahun 2013 telah melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan melalui *Mobile Clinic*.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk pelayanan kesehatan pada tahun 2019 adalah mengadakan pelayanan kesehatan rujukan di laksanakan di Puskesmas Bukoposo dan Puskesmas Wirabangun Kabupaten Mesuji, dengan melakukan pemeriksaan serta tindakan operasi terhadap beberapa kasus tersebut terutama kasus bedah. Jumlah Kasus yang dilayani pada tahun 2019 adalah 443 kasus, dengan masing-masing kasus pelayanan antara lain : pelayanan umum sebanyak 206 kasus, pelayanan kebidanan 38 kasus, Pelayanan spesialis anak 24 kasus, pelayanan bedah 26 kasus dengan 10 tindakan operasi, kasus penyakit dalam sebanyak 56 kasus, pelayanan THT 27 kasus dan pelayanan penunjang radiologi sebanyak 20 kasus, pelayanan laboratorium 26 kasus.

Grafik 6
Persentase Pelayanan Kesehatan dengan Mobile Clinic
Provinsi Lampung Tahun 2019



Kementerian Kesehatan RI selaku kepanjangan tangan dari Pemerintah dalam bidang kesehatan telah menetapkan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional mulai diterapkan sejak 1 Januari 2015 yang mengacu pada Perpres nomor 32 Tahun 2014, Permenkes No 19 Tahun 2014, Permenkes No 28 Tahun 2014 dan dan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Norma Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Program Pelayanan Kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional telah mendorong perubahan – perubahan mendasar seperti penataan standarisasi tarif, penataan formularium dan penggunaan obat rasional, yang berdampak pada kendali mutu dan kendali biaya.



Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional akan membantu mengurangi resiko masyarakat untuk menanggung biaya kesehatan dari kantong sendiri (Out Of Pocket). Dengan konsep gotong royong antar pesertanya. Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional telah memiliki keberhasilan, namun pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibenahi.

Tabel 5
Data Kepesertaan Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional
Provinsi Lampung Tahun 2019

NO	Kab/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Peserta Terdaftar s.d 30 November 2019										Total Peserta	Cakupan
			PBI		NON PBI									
			APBD	APBN	Peg Swasta	Peg BUMN	TNI/POL RI/ PNS Kemhan/ Polri	PNS	PN	PPNP	PBPU/ Perorangan	Bukan Pekerja		
1	Bandar Lampung	1.180.884	63.160	329.679	196.920	30.721	19.125	104.479	331	10.329	139.850	49.759	943.353	79,89%
2	Lampung Selatan	1.042.754	129.668	519.167	56.955	-	5.988	32.207	197	9.002	82.318	8.274	843.758	80,92%
3	Pesawaran	560.272	44.248	260.343	7.308	358	4.552	12.758	137	2.810	44.081	3.288	379.501	68,97%
4	Pringsewu	423.257	41.195	138.512	10.276	-	1.782	18.034	108	5.711	88.294	3.774	287.821	67,96%
5	Tanggamanus	845.679	59.360	371.663	3.880	-	1.693	19.888	18	2.149	31.787	4.082	494.198	76,54%
	Sub Total	3.842.848	337.631	1.619.364	274.334	31.074	33.820	187.144	786	29.701	366.220	69.155	2.948.429	76,73%
6	Metro	169.013	1.487	33.375	17.210	-	3.559	23.616	5	705	33.922	6.631	120.520	71,31%
7	Lampung Tengah	1.474.704	32.828	452.829	67.752	-	4.128	37.860	3	1.272	119.808	10.628	727.108	49,31%
8	Lampung Timur	1.120.998	25.500	509.148	10.370	-	3.197	29.709	3	1.706	124.799	6.265	704.691	62,86%
9	Tulang Bawang	423.401	10.759	161.076	31.188	-	1.631	14.145	2	585	49.541	1.607	270.529	63,89%
10	Tulang Bawang Barat	273.724	5.996	84.955	5.308	-	580	9.167	3	338	41.111	1.138	148.531	54,26%
11	Mesuji	231.816	5.035	75.515	6.225	-	375	5.376	2	4.258	20.608	228	117.620	50,74%
	Sub Total	3.699.656	81.546	1.310.899	138.049	-	13.470	119.883	18	8.864	388.778	25.492	2.088.999	56,56%
12	Lampung Barat	304.197	34.014	153.492	599	-	1.391	14.661	11	408	41.983	1.823	248.045	81,54%
13	Lampung Utara	616.744	48.830	396.949	10.860	-	4.282	36.137	8	944	59.358	10.148	562.514	91,21%
14	Way Kanan	478.604	39.784	221.971	8.576	-	1.894	16.145	7	935	42.988	1.858	333.936	69,77%
15	Pesisir Barat	159.544	27.343	99.620	1.375	-	288	6.388	4	484	14.292	730	150.512	94,34%
	Sub Total	1.559.089	144.951	872.032	21.404	-	7.653	73.331	30	2.751	153.601	14.255	1.255.008	83,06%
	Total	9.095.991	564.128	3.802.295	433.787	31.074	54.143	380.358	834	41.316	914.999	109.902	6.332.406	69,62%

Program Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional Rp. 780.720.000,- terdiri dari:

1. Program Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional

Pemerintah daerah pun ikut mendukung pelaksanaan peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan Provinsi Lampung melalui APBD untuk program upaya kesehatan perorangan maupun Jaminan kesehatan nasional baik yang dianggarkan untuk menunjang sarana prasarana maupun kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Dukungan anggaran bersumber APBD diperuntukkan untuk Program Upaya Kesehatan Perorangan Rp. 6.154.342.000,-, peruntukan untuk kegiatan pelayanan kesehatan *mobile clinic*. Dalam pelaksanaannya ada efisiensi anggaran sekitar 81% sehingga sisa anggaran yang dapat dilaksanakan Rp. 1.145.377.021,-. Dalam tahapan



pelaksanaan kegiatan, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kegiatan yang telah di ajukan. Sampai dengan akhir tahun 2019 realisasi kegiatan mencapai 52,95% atau sebesar Rp. 606.585.345,-. Program Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional Rp. 144.600.000,-. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 Rp. 144.278.200,-terrealisasi kegiatan mencapai 99,77%.

Selain Akreditasi Rumah sakit dan Rumah Sakit Keliling, RSUD Bandar Negara Husada juga merupakan salah satu upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan dengan melakukan pelayanan medik dasar dan subspecialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap. Mengingat pembangunan Rumah Sakit Umum di kawasan Kota Baru Jati Agung dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, maka berdasarkan kepemilikannya diketahui bahwa jenis Rumah Sakit yang dibangun tersebut adalah “Rumah Sakit Umum Tanpa Kelas”.

Adapun jenis layanan yang ada di RSUD Bandar Negara Husada yaitu pelayanan penyakit dalam, bedah umum, kesehatan anak & perinatologi, kebidanan & kandungan, gigi & mulut, konsultasi gizi, medical check-up, laboratorium patologi klinik, laboratorium patologi anatomi, farmasi, radiologi, pemulasaraan jenazah, dan ambulance.

Tahun 2019 RSUD Bandar Negara Husada belum memiliki Dokter Spesialis. Jumlah tenaga medis yang tersedia baru Dokter Umum yang berjumlah 10 orang. Sedangkan untuk jumlah tenaga paramedis perawatan RSUD Bandar Negara Husada berjumlah 73 orang Fungsional dan 5 orang Struktural. Jika dilihat dari latar belakang pendidikannya, yang merupakan lulusan S2 berjumlah 7 orang, S1/D4 berjumlah 38 orang, D3 berjumlah 54 orang.

Capaian kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada selama tahun 2019 dapat dilihat dari indikator berikut ini.

Tabel 10
Capaian Indikator Pelayanan RSUD Bandar Negara Husada
Tahun 2019

No.	Indikator	Capaian
1	Kunjungan Rawat Jalan	372
2	Kunjungan Rawat Inap	68
3	Kunjungan Instalasi Gawat Darurat (IGD)	391
4	Bed Occupation Rate (BOR)	0,50
5	AVLOS	2

Sumber : RSBNH Provinsi Lampung

▪ Pelayanan Laboratorium Kesehatan (Go-Lab)

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Dengan dasar inilah maka Dinas Kesehatan Provinsi Lampung beserta UPTD Balai Laboratorium Provinsi Lampung membuat suatu gerakan upaya kesehatan yang lebih mendekati kepada masyarakat dengan membuat penyelenggaraan delivery bertajuk Go_Lab, yang merupakan aktifitas dan pemberian jasa layanan laboratorium dimana customers memesan layanan dengan menggunakan perangkat media komunikasi (telepon, internet), lalu petugas akan datang ke tempat customers untuk mengambil sampel tanpa customers datang ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

Pelaksanaan kegiatan GO-Lab hanya sebatas pengambilan sampel (delivery sample) sedangkan uji pemeriksaan tetap dilaksanakan di laboratorium (UPTD Balai Laboratorium Provinsi Lampung) dan ini tidak bertentangan dengan Permenkes No.605/Menkes/SK/VII/2006 dan Permenkes No.411/Menkes/PER/III/2010.

Cakupan Go - Lab tahun 2019 belum bisa terlaksana secara optimal, dikarenakan adanya beberapa kendala diantaranya, kurangnya SDM untuk melaksanakan pengambilan sampel ke rumah. Berdasarkan kendala tersebut, maka data cakupannya hanya sekitar 80 sampel dengan rata rata pemeriksaan 4 - 5 parameter pemeriksaan, jadi baru sekitar 1,28 % dari total pemeriksaan 31.179 s/d Des 2019.

Gambar petugas Go-Lab dalam pelayanan mengambil sample





■ Imunisasi

Target Imunisasi (RPJMN 2015 – 2019) khususnya untuk menurunkan angka kematian pada anak. Sehingga diharapkan Tercapainya Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) kepada 93% bayi usia 0 – 11 bulan dan tercapainya 95% Kab/kota yang mencapai minimal 80% IDL pada bayi. Artinya setiap desa/kelurahan minimal 93% bayi telah mendapat imunisasi dasar lengkap pada tahun 2015 - 2019 dan 100 % desa mencapai desa UCI, minimal Cakupan 80%.

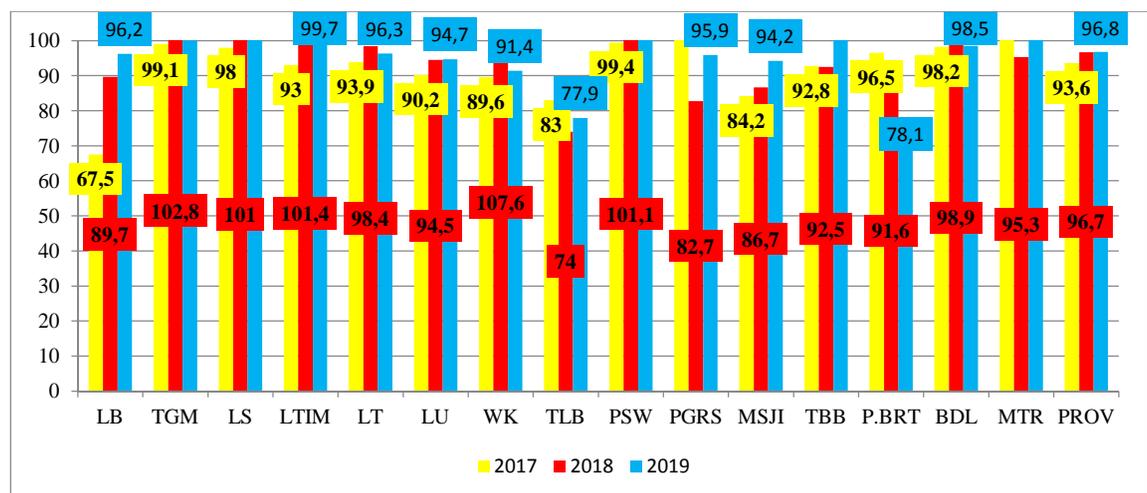
Persentasi anak usia 0-11 tahun yang mendapat imunisasi dari jumlah capaian 145.721 orang dibagi target yaitu 147.255 orang didapatkan capaian 99% dari target yang di tetapkan yaitu 93%.

HASIL IMUNISASI BAYI dan ANAK BAWAH DUA TAHUN (BADUTA)

a. Indikator Jangkauan Program

1. Cakupan imunisasi Total Hb0 (target : 95%)

Grafik.3.
Cakupan Imunisasi total HB0 Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2019



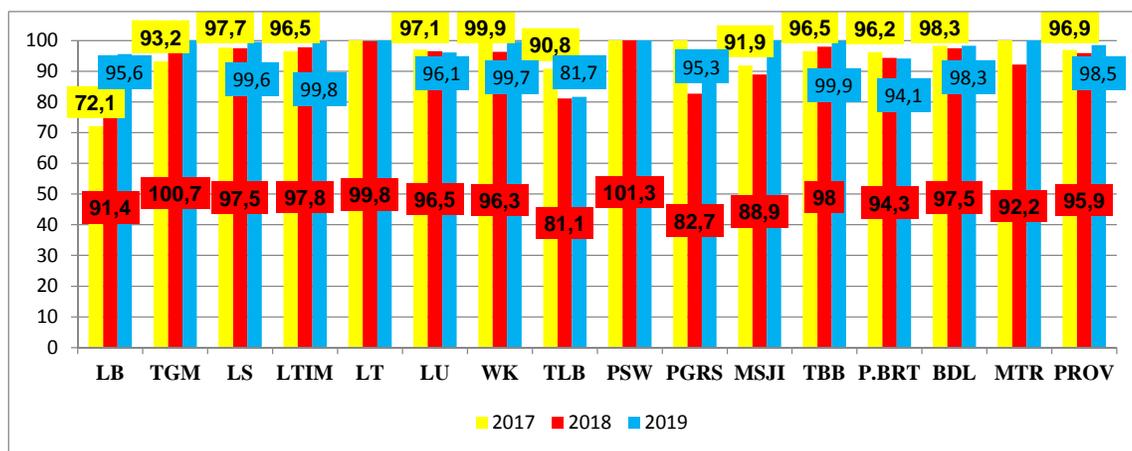
Sumber : laporan PWS kabupaten/kota

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat angka cakupan imunisasi HB0 tingkat Provinsi selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan per tahun, pada tahun 2019 mencapai (96,8%). Pada tahun 2019 jika di lihat per kabupaten/kota belum merata capaiannya, dari 15 kabupaten yang telah mencapai target hanya 12 kabupaten/kota sedangkan 3 kabupaten lainnya belum mencapai target yaitu Way Kanan, Tulang Bawang dan Pesisir Barat.



2. Cakupan Imunisasi BCG (target : 95%)

Grafik.4
Cakupan Imunisasi BCG Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2019



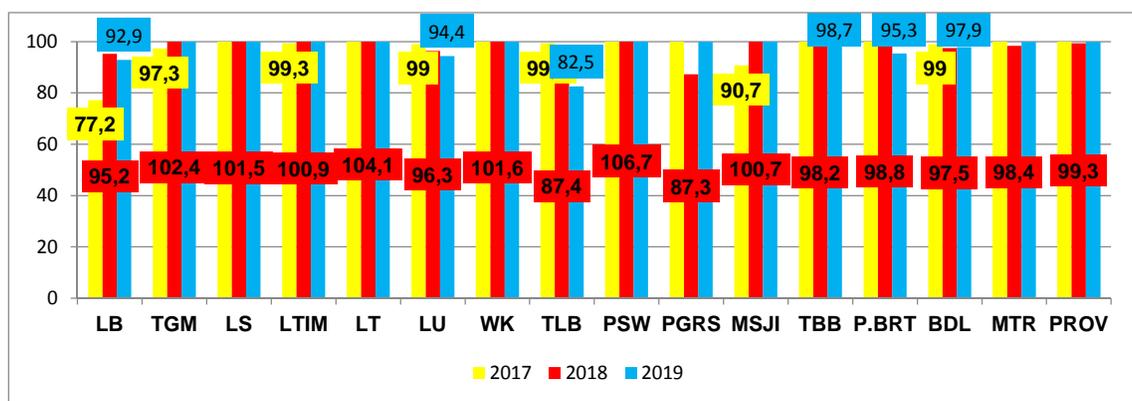
Sumber : laporan PWS kabupaten/kota

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat angka cakupan imunisasi BCG tingkat Provinsi selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan per tahun, pada tahun 2019 mencapai (98,5%). Pada tahun 2019 jika di lihat per kabupaten/kota belum merata capaiannya, dari 15 kabupaten yang telah mencapai target terdapat 2 kabupaten yang belum mencapai target yaitu kabupaten Tulang Bawang dan Pesisir Barat.

b. Tingkat Perlindungan Program

1. Cakupan Imunisasi DPT-HB-Hib3 (target : 95%)

Grafik.5. Cakupan Imunisasi DPT-HB-Hib3 Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2019



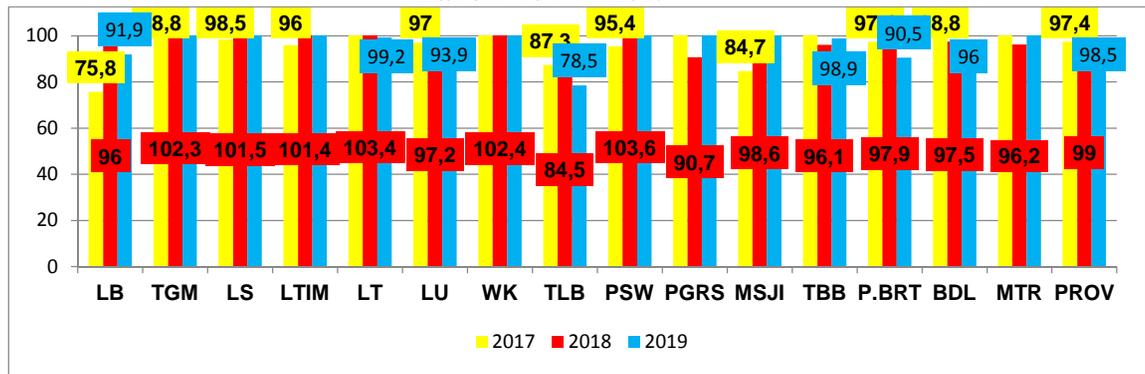
Sumber : laporan PWS kabupaten/kota

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat angka cakupan imunisasi DPT-HB-Hib3 tingkat Provinsi selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan per tahun, pada tahun 2019 mencapai (100,2%). Pada tahun 2019 jika di lihat per kabupaten/kota belum merata capaiannya, dari 15 kabupaten yang telah mencapai target terdapat 3 kabupaten yang belum mencapai target yaitu kabupaten Tulang Bawang, Lampung Barat, Lampung Utara.



2. Cakupan Imunisasi Polio4 (target : 95%)

**Grafik.6. Cakupan Imunisasi Polio4 Provinsi Lampung
Tahun 2017 – 2019**

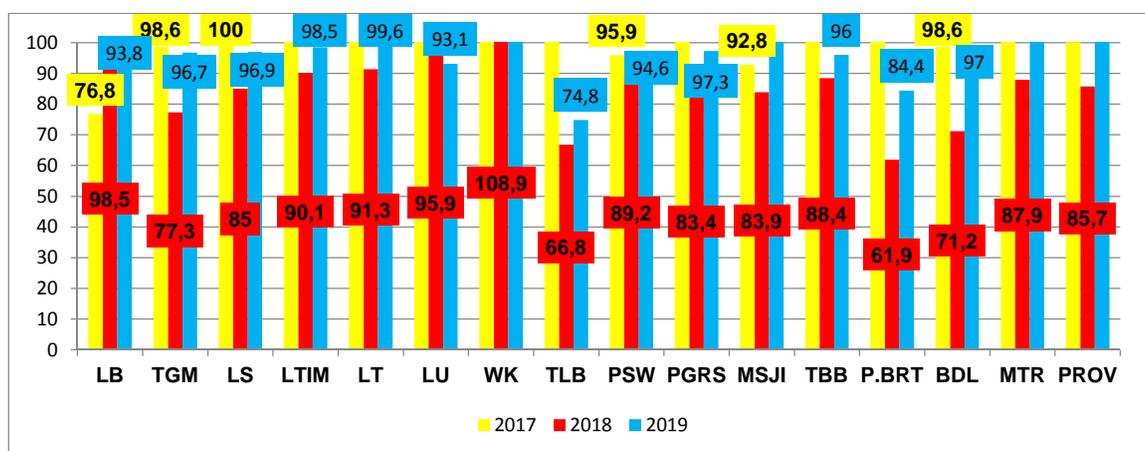


Sumber : laporan PWS kabupaten/kota

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat angka cakupan imunisasi Polio4 tingkat Provinsi selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan per tahun, pada tahun 2019 mencapai (98,5%). Pada tahun 2019 jika di lihat per kabupaten/kota belum merata capaiannya, dari 15 kabupaten/kota 4 kab. Tulang Bawang, Lampung Utara, Lampung Barat dan Pesisir Barat belum mencapai target.

3. Cakupan Imunisasi Campak/ MR (Measles Rubella) Target : 95%

**Grafik.7. Cakupan Imunisasi Campak/MR Provinsi Lampung
Tahun 2017 – 2019**



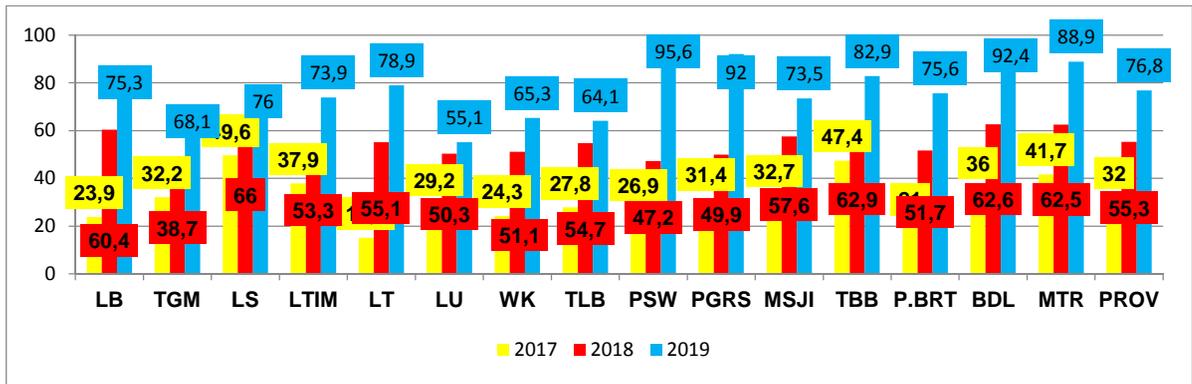
Sumber : laporan PWS kabupaten/kota

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat angka cakupan imunisasi Campak/MR tingkat Provinsi selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan per tahun, pada tahun 2019 mencapai (199%). Pada tahun 2019 jika di lihat per kabupaten/kota belum merata capaiannya, dari 15 kabupaten/kota terdapat 5 kab. Tulang Bawang, Lampung Utara, Lampung Barat, Pesawaran dan Pesisir Barat belum mencapai target.



4. Cakupan Imunisasi IPV (target : 95%)

Grafik.8. Cakupan Imunisasi IPV Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2019

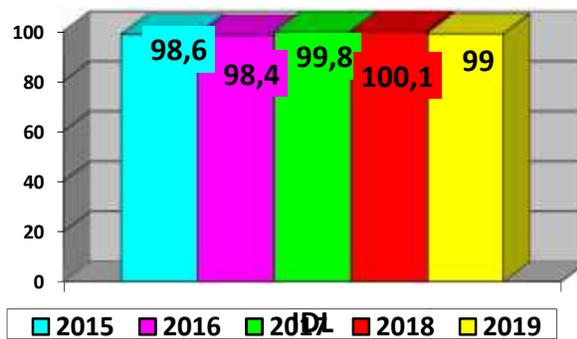


Sumber : laporan PWS kabupaten/kota

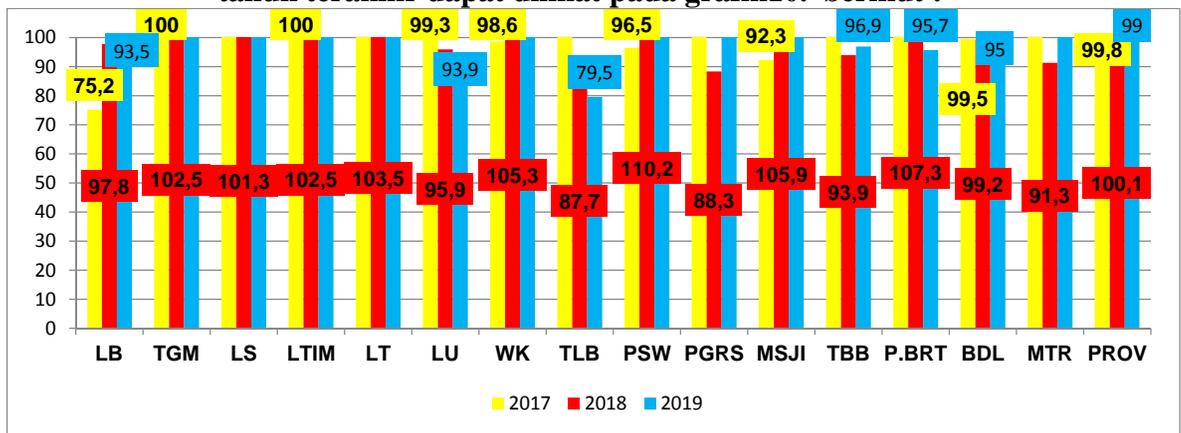
Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat angka cakupan imunisasi IPV tingkat Provinsi selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan per tahun, walaupun secara target belum mancapai. Pada tahun 2019 baru mancapai (76,8%) dari target 95%. Pada tahun 2019 jika di lihat per kabupaten/kota belum merata capaiannya, dari 15 kabupaten/kota baru 1 kab. Pesawaran (95,6%) yang telah mancapai dan kab/kota lainnya belum mancapai target.

5. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)

Grafik 9. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019



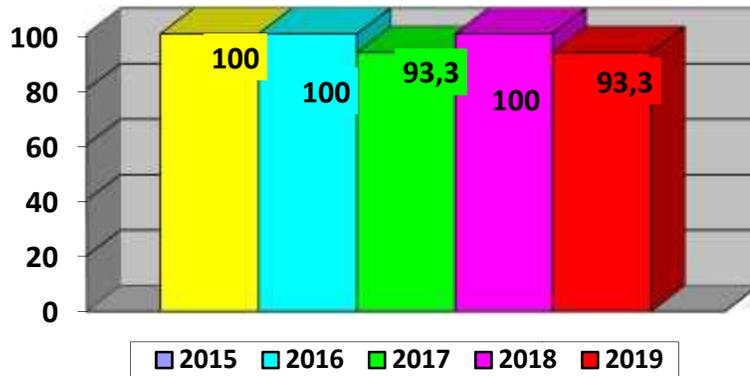
Distribusi cakupan IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) per kabupaten/kota selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik10. berikut :



Sumber : laporan PWS kabupaten/kota

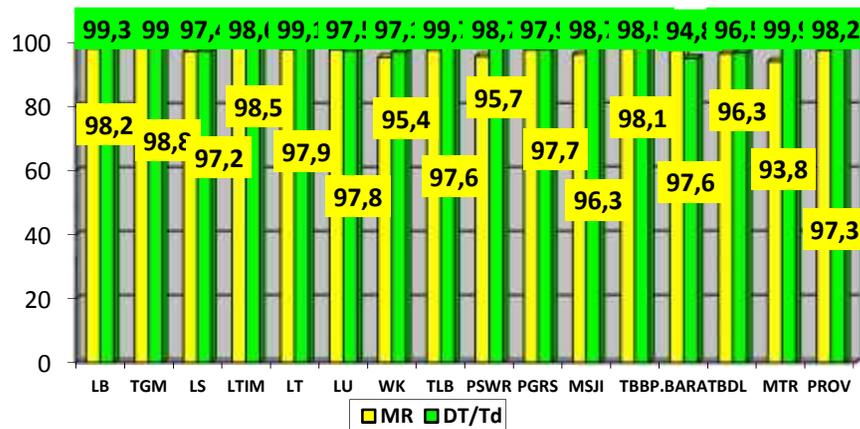


Persentase jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% IDL selama 5 tahun terakhir di Provinsi Lampung dapat dilihat pada grafik 11. berikut :



6. Pelaksanaan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)

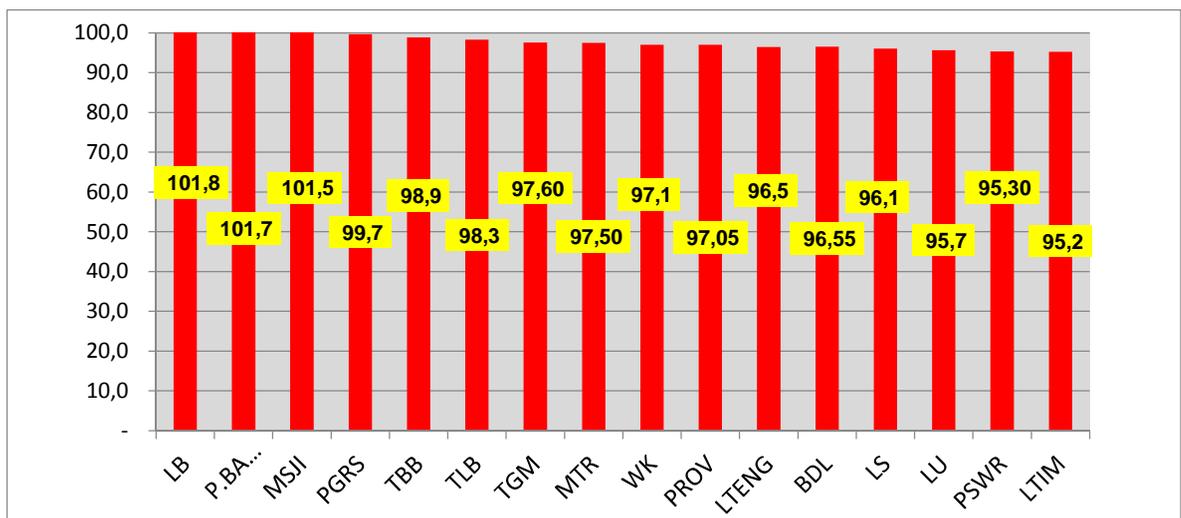
BIAS MR dilaksanakan pada bulan Agustus pada anak klas 1 SD dan BIAS DT/Td dilaksanakan pada bulan November pada anak klas 1, 2 dan 5. Hasil pelaksanaan BIAS tahun 2019, dapat dilihat pada grafik 12. Berikut :



7. Pelaksanaan Imunisasi Tambahan (Kampanye Measles Rubella/MR)

Kampanye MR dilaksanakan oada tahun 2018 di 15 kabupaten/kota secara serentak pada bulan Agustus – September 2018.

Hasil pelaksanaan dapat di lihat pada grafik 13 berikut :



Sumber : laporan kampanye MR kab/kota



▪ **Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan**

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selama tahun 2019 mendapatkan 9 penghargaan diantaranya :

- **Penghargaan Pembangunan Daerah Sai Bumi Ruwa Jurai.**

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2019 mendapat penghargaan sebagai **Terbaik I** dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

- **Penghargaan dalam kegiatan Pekan Raya Lampung (Lampung Fair).**

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2019 sebagai Juara I Stand Kreatif dan Inovatif Kategori Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung Dalam Kegiatan Pekan Raya Lampung (Lampung Fair) 2019 yang dilaksanakan di PKOR Way Halim pada tanggal 19 April s.d 3 Mei 2019.

- **Penghargaan dalam kegiatan Pekan Raya Lampung (Lampung Fair).**

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2019 mendapat penghargaan atas partisipasi dan peran aktif sebagai peserta dalam Kegiatan Pekan Raya Lampung (Lampung Fair) 2019 yang dilaksanakan di PKOR Way Halim pada tanggal 19 April s.d 3 Mei 2019.

- **Penghargaan dalam kegiatan Pekan Raya Lampung (Lampung Fair).**

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2019 sebagai **Juara III Stand Terbaik** Kategori Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung Dalam Kegiatan Pekan Raya Lampung (Lampung Fair) 2019 yang dilaksanakan di PKOR Way Halim pada tanggal 19 April s.d 3 Mei 2019.

- Penghargaan diberikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2019 oleh Ketua Dekranasda Provinsi Lampung atas pengabdian selama melaksanakan tugas sebagai Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung Masa Bakti 2014-2019.

- **Penghargaan e-Aspirasi Tahun 2019**

Penghargaan Kepada Pemenang Lomba dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional Tahun 2019 kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebagai Pemenang ke III Kategori Pengelola website Tingkat Dinas Kesehatan Provinsi Regional Barat yang di tandatangi oleh Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto.

- **Penghargaan KIDI dan Sekretariat PIDI**

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2019 dalam hal ini mendapat Juara II KIDI dan Sekretariat PIDI paling Kompak dalam Optimalisasi Program Internship Dokter Menuju Indonesia Maju dalam mewujudkan sinergitas pemahiran, pemandirian dan Pendayagunaan serta Peningkatan Upaya Preventif dan Promotive Pelayanan Kesehatan.



- **Penghargaan Dari Direktur P2PTM Sebagai Provinsi Terbaik Pelaksana Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat (RBDM) Tahun 2019.**

Pada Tahun 2019 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memperoleh penghargaan dari Direktur P2PTM Ditjen P2P Kemenkes RI sebagai Provinsi Terbaik Pelaksana Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat (RBM) Tahun 2019. Program RBM ini bertujuan untuk membina keluarga yang memiliki penyandang disabilitas yang pembinaannya dilaksanakan oleh kader RBM. Tahapan kegiatan RBM di desa atau wilayah RW yaitu: Sosialisasi dan pembentukan kader RBM / Tim RBM, Pembekalan Kader RBM, Survei Mawas Diri, dan Evaluasi serta tindak lanjut. Program ini telah dilaksanakan pertama kalinya tahun 2017 di Puskesmas Yosomulyo Kota Metro (10 orang kader RBM), kemudian dilanjutkan pada tahun 2019 di wilayah Puskesmas Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur (10 orang kader RBM) dan Puskesmas Wates Kabupaten Pringsewu (10 orang kader RBM).

- **Penghargaan dari Kementerian Kesehatan tentang Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP).**

PT. Gula Putih Mataram mewakili Provinsi Lampung meraih penghargaan Mitra Bakti Husada (MBH) pada Acara Penerimaan Penghargaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 7-8 November 2019 di ICE BSD Tangerang.

Penghargaan MBH merupakan bentuk pembinaan dan motivasi bagi Perusahaan yang telah melaksanakan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP), suatu program yang bertujuan melindungi kesehatan pekerja perempuan melalui kegiatan kesehatan reproduksi, pemberian ASI di tempat kerja, gizi pekerja dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Kriteria perusahaan yang dapat di usulkan menerima MBH adalah jumlah pekerja perempuan minimal 100 orang, memenuhi hak-hak pekerja perempuan sesuai ketentuan, telah melaksanakan GP2SP selama 2 (dua) tahun yang terbukti melalui penilaian instrumen penilaian.



Rumah sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

1. Prioritas Urusan Wajib

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Wajib yang Berkaitan dengan pelayanan dasar kesehatan di Provinsi Lampung Tahun 2019 dilaksanakan oleh **RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung**.

Program prioritas pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung tahun 2019 meliputi:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- c) Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
- d) Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
- e) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan;
- f) Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD;

2. Program dan Kegiatan

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan:

- 1) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- 2) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknik perkantoran;
- 3) Pengembangan pengelolaan keuangan;

b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan:

Pendidikan dan pelatihan formal

c) Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Kegiatan:

- 1) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit;
- 2) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain);
- 3) Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, III);
- 4) Pembangunan gedung penunjang pelayanan rumah sakit.



- d) **Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata**

Kegiatan:

Pemeliharaan rutin/berkala gedung rumah sakit

- e) **Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan**

Kegiatan:

Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

- f) **Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD**

Kegiatan:

Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal/Pencapaian Program dan Kegiatan

- a) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 98 %.

Capaian:

- 1) Terpenuhinya penyediaan jasa administrasi keuangan
- 2) Terpenuhinya honor PTHL
- 3) Terpenuhinya honor tenaga operator penginputan SIMDA

- b) **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian:

Meningkatnya kapasitas sumber daya pegawai/aparatur.

- c) **Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata**

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 97%.

Capaian:

- 1) Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit
- 2) Tersedianya peralatan rumah tangga rumah sakit
- 3) Bertambahnya ruang rawat inap rumah sakit
- 4) Tersedianya gedung penunjang pelayanan rumah sakit



d) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian:

Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit

e) Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 99,50%.

Capaian:

Tersedianya kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

f) Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD

Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD , terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 105%.

Capaian:

Tersedianya jasa BLUD rumah sakit

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional

PEGAWAI		PENDIDIKAN		PANGKAT/GOL		JUMLAH PEJABAT			
Status	Jlh	Kualifikasi	Jlh	Pangkat	Jlh	STRUKTURAL	FUNGSIONAL		
						Eselon	Jlh	Jabatan	Jlh
PNS :	1.055	S3	0	IV/e	4	IV	17		701
PTHL :	387	S2	73	IV/d	4	III	7		
		S1	213	IV/c	11	II	4		
		D4	46	IV/b	52				
		D3	329	IV/a	91				
		D2	3	III/d	148				
		D1	5	III/c	122				
		SMA	152	III/b	153				
		SMP	37	III/a	176				
		SD	27	II/d	104				
		Dr. Spesialis	57	II/c	104				
		Dr. Gigi	5	II/b	27				
		Dr. Spesialis gigi	3	II/a	31				
		Ners	80	I/d	7				
		SPK	18	I/c	14				
		SPRG	6	I/b	7				
				I/a	0				

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

APBD RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2019 sebesar:

Alokasi : Rp. 393.881.922.268,-

Realisasi : Rp. 376.553.068.334,72,-

Persentase Realisasi : 95,60%



6. Proses Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mekanisme sebagai berikut :

- a) Sosialisasi program tahun berjalan dan rencana program tahun berikutnya ke kabupaten/kota dan instansi terkait;
- b) Rapat koordinasi teknis;
- c) Penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD);
- d) Musrenbang Provinsi;
- e) Fasilitasi dan koordinasi Musrenbang kab/kota dan pusat/nasional;
- f) Penyusunan RKPD;
- g) Penyusunan KUA dan PPAS;
- h) Finalisasi dan Penetapan PPA;
- i) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- j) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	KURANG
1	LINAC	1		
2	CT Simulator	1		
3	Examination Lamp	12		
4	Survey Meter + RFA	1		
5	Verifikasi IMRT System	1		
6	bed digital scale & xray casete	12		
7	Box bayi	10		
8	Serological Centrifuge	1		
9	LCP Large Fragment & Standard Instrument SET	1		
10	Bed side cabinet	200		
11	Overbed table	200		
12	Lift gedung rawat Jalan dan Gedung Perawatan Anak	5		
13	Tempat tidur manual dewasa	200		
14	Medical Refrigerator	2		
15	Rak Stainless	1		
16	Ultra Low Freezer	1		
17	Blood Bank Refrigerator	1		
18	Pengadaan Couter Pendafrtran	1		
19	Nurse Station	1		
20	Ambulance PUSLING Jenazah	4		



NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	KURANG
21	Ambulance Pusling Standard Plus	2		
22	Komputer/ PC HP 570 PO33L 7100 i3 4GB,1TB,LED 18,5	2		
23	Notebook ACER Z476 31 TB i3 600GU/4GB, 1 TB Black	1		
24	Printer DOX Metrix Epson LX 310	1		
25	Printer Print/ Scan/Copy Epson	1		
26	Printer Laserjet Brother HL 1201	1		
27	IP Phone LIP 8002E 4-BUTTON LIP & POE (LG Ericson)	30		
28	Lemari besi Costum Design uk.1.5mx3m	2		
29	Lemari besi Custom Design uk.1.7x3	1		
30	Meja 1/2 Biro	15		
31	Kursi Kerja Dokter	15		
32	Pengadaan AC gedung rawat jalan dan Gedung Perawatan Anak			
33	Pembangunan gedung perawatan kelas I, Gedung GCU dan Fisioterapi	1		
34	Lanjutan Pembangunan Gedung Perawatan anak	1		

8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Pelayanan rumah sakit yang belum sesuai dengan permintaan masyarakat

Solusi

Penataan pelayanan secara berkala

9. Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

- a) Perkembangan Anggaran Belanja Langsung APBD dan Realisasi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2015 s.d. 2019

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA DANA
2015	216.226.416.443	213.416.766.759	98%	2.809.649.684
2016	343.855.389.129	334.739.485.566	97,3%	9.115.903.563
2017	360.853.226.000	338.251.217.573	93,73%	22.602.008.427
2018	444.017.876.851	428.058.999.012,58	99,10%	15.958.877.833,42
2019	393.881.922.268	376.553.068.334,72	95%	17.328.853.933,28

- b) Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015-2019

No	PROGRAM TAHUN	ANGGARAN		KINERJA
		PAGU	REALISASI	
1	2015	216.226.416.443	213.416.766.759	97%
2	2016	343.855.389.129	334.739.485.566	101,31%
3	2017	360.853.226.000	338.251.217.573	96,02%
4	2018	444.017.876.851	15.958.877.833,42	97,48%
5	2019	393.881.922.268	376.553.068.334,72	95,60%



Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung

1. Prioritas Urusan Wajib

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Wajib Bidang Kesehatan di Provinsi Lampung Tahun 2019 dilaksanakan oleh *Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung*.

Program prioritas yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Urusan Bidang Kesehatan pada Tahun 2019, meliputi :

- a) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
- b) Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan
- c) Program Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
- d) Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
- e) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- f) Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
- g) Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

2. Program dan Kegiatan

RS. Jiwa Daerah provinsi Lampung telah melaksanakan sebanyak **7 Program** dengan **10 Kegiatan** pada tahun 2019, yaitu:

- a) **Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata.**

Kegiatan :

- 1) Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit
- 2) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
- 3) Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit;
- 4) Pembangunan Gedung Administrasi

- b) **Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan.**

Kegiatan :

Upaya Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Mental/terapi Pasien RSJ.

- c) **Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan.**

Kegiatan :

Penyusunan rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa



d) **Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD.**

Kegiatan :

Peningkatan mutu layanan Rumah Sakit Jiwa.

e) **Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan**

Kegiatan :

Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu

f) **Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Kegiatan :

Penyuluhan Kesehatan Jiwa Masyarakat

g) **Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata**

Kegiatan :

Pemeliharaan Rutin/berkala gedung rumah sakit

3. Tingkat Pencapaian Standart Pelayanan Minimal/Pencapaian Program Dan Kegiatan

a) **Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata.**

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan realisasi fisik 99.36%.

Capaian :

- 1) Tercapainya jumlah dan kualitas alat kedokteran Rumah Sakit Jiwa, berupa alat-alat kesehatan untuk menunjang pelayanan Rumah Sakit Jiwa sebanyak 7 paket;





- 2) Tercukupinya Kebutuhan Makan dan Minum Pasien selama 12 bulan;



- 3) Tercukupinya kebutuhan Obat-Obatan untuk pasien Rumah Sakit, berupa obat-obatan psikiatri untuk pasien rawat inap dan rawat jalan selama 12 bulan;



- 4) Terbangunnya Gedung Pos Satpam, Selasar dan Pagar Keliling Rumah Sakit Jiwa



b) Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan.

Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik 99.40%.

Capaian :

Terlaksananya kegiatan terapi rehabilitasi di unit rehabilitasi mental.



c) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan.

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik 98.88%.

Capaian :

Terlaksananya Kegiatan Rencana Kerja dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa.



d) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit (BLUD).

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit BLUD, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik 96%.

Capaian :

Terealisasinya pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan minimal selama 12 bulan.



e) **Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan**

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik 89.10%

Capaian :

Terlaksananya kegiatan kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu



f) **Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik 89.10%

Capaian :

Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Jiwa Masyarakat



g) **Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata**

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik 100%

Capaian :

Terpeliharanya gedung Rumah Sakit Jiwa sebanyak 6 unit;



4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional

JUMLAH PEGAWAI		KUALIFIKASI PENDIDIKAN		PANGKAT/ GOL		JUMLAH PEJABAT	
						STRUK-TURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5			
PNS	: 175	S3	: -	IV/d	: 0	Ess IV = 4	Psikiater 1
L	: 78	S2	: 11	IV/c	: -	Ess III = 1	Dokter Spesialis radiologi 1
P	: 97	Spesialis	: 5	IV/b	: 9	Ess II = 0	Dokter Umum 7
		S1	: 55	IV/a	: 15		Dokter Gigi 3
PTHL	: 74	D4	: -	III/d	: 29	NSU = 40	Apoteker 4
L	: 46	D3	: 75	III/c	: 18		Perawat Umum 68
P	: 28	D2	: -	III/b	: 36		Psikolog 1
		D1	: -	III/a	: 24		Psikologi 2
		SLTA	: 29	II/d	: 27		Perawat gigi 4
		SLTP	: -	II/c	: 11		Sanitarian 4
		SD	: -	II/b	: 5		Bidan 4
				II/a	: 1		Penata Rontgen 3
				I/d	: -		Analisis kesehatan 3
				I/c	: -		Elektro medik 1
				I/b	: -		Rekam Medis 2
				I/a	: -		Okupasi Terapis 2
							Ast. Apoteker 4
							Kesehatan Masyarakat 5
							Fisioterapis 3
							Nutrisionis 4
PNS	: 175						
PTHL	: 74		175		175	45	130

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.

APBD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, sebesar:

Alokasi Rp 27.138.400.937,-

Realisasi Rp 23.411.851.343,-



6. Proses Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mekanisme sebagai berikut :

- a) Sosialisasi program tahun berjalan dan rencana program tahun berikutnya ke kabupaten/kota dan instansi terkait;
- b) Rapat koordinasi teknis;
- c) Penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD);
- d) Musrenbang Provinsi;
- e) Fasilitasi dan koordinasi Musrenbang kab/kota dan pusat/nasional;
- f) Penyusunan RKPD;
- g) Penyusunan KUA dan PPAS;
- h) Finalisasi dan Penetapan PPA;
- i) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- j) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
A.	TANAH		
	1. Tanah	1	
B.	PERALATAN DAN MESIN		
	1. Alat-Alat Besar	1	
	2. Alat- Alat Angkutan	8	
	3. Alat Bengkel dan Alat Ukur	28	
	4. Alat Pertanian	5	
	5. Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.764	
	6. Alat Studio dan Alat Komunikasi	27	
	7. Alat-Alat Kedokteran	360	
	8. Alat-Alat Laboratorium	28	
C.	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	1. Bangunan Gedung	36	
D.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
	1. Jalan dan Jembatan	1	
	2. Instalasi	2	
E.	ASET TETAP LAINNYA		
	1. Buku dan Perpustakaan	174	
	2. Barang Bercorak Kebudayaan	1	



8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) seperti tenaga dokter, tenaga perawat dan tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya
- b) Masih kurangnya Dokter spesialis jiwa dan tenaga tenaga dokter spesialis lainnya yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kelas RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung menjadi RS Khusus Tipe A

Solusi

- a) Mengajukan permohonan pengangkatan tenaga sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.
- b) Mengajukan permohonan pengangkatan Dokter spesialis jiwa dan tenaga tenaga dokter spesialis lainnya berdasarkan *Self Assessment* dari kementerian Kesehatan.

9. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

- a) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RS. Jiwa tahun 2019

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (%)	
			FISIK	KEU.
1.	URUSAN WAJIB			
1.	Prog. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru-Rumah Sakit Mata	480.751.200,-	97.44	88.42
	a. Pengadaan Alat-alat kesehatan Rumah Sakit	930.979.400,-	100	84.33
	b. Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	742.918.957,-	100	100
	c. Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit;	1.833.114.000,-	100	78.65
	d. Pembangunan Gedung Administrasi			
2.	Prog. Upaya Kesehatan Perorangan :			
	a. Upaya Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Mental/Terapi Pasien RSJ.	68.950.900,-	99.40	99.42
3.	Prog. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan :			
	a. Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa	92.383.000,-	98.88	99.28
4.	Prog. Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD:			
	a. Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Jiwa	14.495.000.000,-	96	88.42
5.	Prog. Kemitraan Peningkatan Pelayanan			
	a. Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu	38.350.900-	89.10	89.12
6.	Prog. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			
	a. Penyuluhan Kesehatan Jiwa Masyarakat	69.500.900-	82.	82.37
7.	Prog. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru-Rumah Sakit Mata			
	a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung rumah sakit	4.351.324.600,-	100	70.25
II.				
1.	Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	a. Penyediaan jasa administrasi Keuangan;	899.220.900,-	100	78.76
	b. Penyediaan Alat Tulis kantor	72.802.200,-	100	99.96
	c. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	277.250.900,-	100	99.93
	d. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran;	1.422.551.100,-	100	94.98
2.	Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	743.260.230,-	98	99.40
	b. Pengadaan peralatan gedung kantor	422.026.250,-	97.50	97.53



No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (%)	
			FISIK	KEU.
3.	Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	96.351.200,-	79	91.73
4.	Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	101.664.300,-	97	99.18

b) Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Tahun 2019

No.	Indikator Mutu	Satuan	2017	2018	2019
1.	BOR (Bed Occupancy Rate)/ rata-rata pemakaian tempat tidur dalam satu tahun	%	70.92	73,60	67.43
2.	LOS (Lenght Of Stay)/rata-rata Lamanya dirawat per pasien dalam satu tahun	hari	19.73	17,79	16.15
3.	TOI (Term Of Interval)/ Ukuran jarak waktu antara pemakaian tempat tidur	kali	7.10	5,89	7.06
4.	BTO (Bed Turn Over)/Jarak waktu antara pemakaian tempat tidur	Kali	14.95	16,29	16.84
5.	NDR (Net Death Rate)/ Ukuran derajat kematian sesudah 48 jam)	org	0	0	0
6.	GDR (Gross Daeth Rate)/ ukuran derajat kematian kurang dari 48 jam.	%	0.54	0	0
7.	Jumlah hari perawatan (jumlah hari perawatan pasien yang sudah pulang dan pasien yang masih dirawat	hari			30.766

c) Data 10 (sepuluh) penyakit terbanyak rawat jalan dan rawat inap tahun 2019

No. Urut	Jenis Penyakit	
	Rawat Jalan	Rawat Inap
1	Skizofrenia Paranoid	Skizofrenia Paranoid
2	Skizofrenia Tak Terinci	Gangguan Mental Organik
3	Gangguan Mental Organik	Skizofrenia Hermafrenik
4	Gangguan Skizoafektif tipe depresif	Gangguan psikotik dan polimorfik akut tanpa gejala skizoprenia
5	Gangguan Mental Akibat Kerusakan dan Difungsi Otak dan penyakit fisik lain YDT	Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multiple dan penggunaan zat psikoaktif lainnya
6	Skizofrenia YTT	Skizofrenia YTT
7	Episode Depresif sedang	Gangguan skizoafektif YTT
8	Episode Depresif ringan	Gangguan Mental Akibat Kerusakan dan Difungsi Otak dan penyakit fisik lain YDT
9	Skizofrenia Residual / kronik	Skizofrenia Katatonik
10	Depresi Pasca Skizofrenia	Skizofrenia tak terinci

d) Data kunjungan pasien psikiatri rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Daerah pada tahun 2019

No.	Jenis Kelamin	2017	2018	2019	Ket.
1.	Pria	22.255	22.713	23.804	
2.	Wanita	11.905	12.104	12.668	
	Jumlah	34.160	34.817	36.472	

e) Data kunjungan pasien rawat jalan berdasarkan status pasien th 2017-2019

No.	Status pasien baru atau lama	2017	2018	2019	Ket.
1.	Pasien Baru	2.370	1.958	3.689	
2.	Pasien Lama	31.790	32.859	32.783	
	Jumlah	34.160	34.817	36.472	



f) Data kunjungan pasien rawat jalan berdasarkan pendidikan th 2017-2019

No.	Pendidikan	2017	2018	2019	Ket
1.	TS	1.719	3.262	2.094	
2.	SD	8.364	7.922	8.401	
3.	SMP	7.569	7.579	8.068	
4.	SMU	13.206	12.694	14.557	
5.	AK	1.631	1.594	1.654	
6.	PT	1.671	1.557	1.698	
	Jumlah	34.160	34.608	36.472	

g) Data kunjungan pasien rawat jalan berdasarkan tempat tinggal th 2017-2019

No.	Tempat Tinggal	2017	2018	2019	Ket.
1.	Bandar Lampung	10.602	10.967	11.916	
2.	Metro	770	613	507	
3.	Lampung Selatan	4.424	4.745	5.210	
4.	Lampung Utara	1.675	1.488	1.258	
5.	Lampung Tengah	3.520	3.095	2.889	
6.	Lampung Timur	2.056	2.257	2.289	
7.	Lampung Barat	572	627	612	
8.	Tulang Bawang	838	714	751	
9.	Tanggamus	2.697	2.991	3.229	
10.	Way Kanan	690	725	696	
11.	Pesawaran	3.270	3.429	3.696	
12.	Pringsewu	2.186	2.247	2.361	
13.	Tulang Bawang Barat	352	402	465	
14.	Mesuji	180	183	176	
15.	Luar Provinsi	206	209	214	
16.	Pesisir Barat	122	125	203	
	Jumlah	34.160	34.817	36.472	

h) Data kunjungan pasien rawat jalan berdasarkan pekerjaan th 2017-2019

No.	Pekerjaan	2017	2018	2019	Ket.
1.	PNS	868	1.457	1.574	
2.	TNI/POLRI	162	141	192	
3.	SWASTA	1.692	1.664	1.984	
4.	WIRASWASTA	316	359	703	
5.	TANI	2.717	2.691	2.840	
6.	BURUH	1.165	1.114	1.261	
7.	TIDAK BEKERJA	26.370	27.318	27.761	
8.	PENSIUN	45	16	99	
9.	HONOR	30	16	58	
	JUMLAH	34.160	34.817	36.472	



i) Data Puskesmas Binaan sampai dengan tahun 2019.

No.	Nama Puskesmas	2017	2018	2019
1.	Puskesmas Kali Rejo, Kabupaten Lampung Tengah	Monev	Monev	Monev
2.	Puskesmas Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah	Monev	Monev	Monev
3.	Puskesmas Sidomulyo Lampung Selatan	Monev	Monev	Monev
4.	Puskesmas Ambarawa Kabupaten Pringsewu	Monev	Monev	Monev
5.	Puskesmas Batang Hari, Kabupaten Lampung Tengah	Monev	Monev	Monev

c. *Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung****1. Prioritas Urusan Wajib**

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi Lampung Tahun 2019 dilaksanakan oleh *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung*. Program prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung, antara lain :

- a) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- b) Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- c) Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
- d) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- e) Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong
- f) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
- g) Program Pembinaan Jasa Konstruksi
- h) Program Pembangunan Jalan-jalan Strategis

2. Program dan Kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan sebanyak **12 (dua belas) program** dengan **111 (seratus sebelas) kegiatan** pada tahun 2019, yaitu :

a) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran****Kegiatan:**

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 2) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
- 3) Penyediaan alat tulis kantor;



- 4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 5) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 7) Penyediaan makanan dan minuman rapat;
- 8) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- 9) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran;
- 10) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
- 11) Penyediaan jasa publikasi;
- 12) Pameran dan promosi pembangunan;
- 13) Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD.

b) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kegiatan:

- 1) Perencanaan pembangunan jalan;
- 2) Perencanaan pembangunan jembatan;
- 3) Pembangunan jembatan;
- 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 5) Pengawasan teknis pembangunan/pemeliharaan jembatan;
- 6) Pengawasan teknis pembangunan/pemeliharaan jalan koridor 1-6;
- 7) Pengawasan teknis pembangunan/pemeliharaan jalan koridor 7-12;
- 8) Pengawasan teknis pembangunan/pemeliharaan jalan koridor 13-17;
- 9) Pengawasan teknis pembangunan/pemeliharaan jalan koridor 18-22;
- 10) Pembangunan jalan provinsi koridor 1;
- 11) Pembangunan jalan provinsi koridor 2;
- 12) Pembangunan jalan provinsi koridor 3;
- 13) Pembangunan jalan provinsi koridor 4;
- 14) Pembangunan jalan provinsi koridor 5;
- 15) Pembangunan jalan provinsi koridor 6;
- 16) Pembangunan jalan provinsi koridor 7;
- 17) Pembangunan jalan provinsi koridor 8;
- 18) Pembangunan jalan provinsi koridor 9;
- 19) Pembangunan jalan provinsi koridor 10;
- 20) Pembangunan jalan provinsi koridor 11;
- 21) Pembangunan jalan provinsi koridor 12;
- 22) Pembangunan jalan provinsi koridor 13;
- 23) Pembangunan jalan provinsi koridor 14;
- 24) Pembangunan jalan provinsi koridor 15;
- 25) Pembangunan jalan provinsi koridor 16;



- 26) Pembangunan jalan provinsi koridor 17;
- 27) Pembangunan jalan provinsi koridor 18;
- 28) Pembangunan jalan provinsi koridor 19;
- 29) Pembangunan jalan provinsi koridor 20;
- 30) Pembangunan jalan provinsi koridor 21;
- 31) Pembangunan jalan provinsi koridor 22.

c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan:

- 1) Pengadaan kendaraan dinas/ operasional;
- 2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- 3) Pengadaan peralatan gedung kantor;
- 4) Pengadaan mebeleur;
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- 7) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- 8) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur.

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan:

- 1) Pendidikan dan pelatihan formal;
- 2) Pembinaan rohani sumberdaya aparatur.

e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan:

- 1) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- 2) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- 3) Penatausahaan BMD;
- 4) Penyusunan Harga Dasar Upah, Bahan dan Alat Bidang Kebinamargaan Provinsi Lampung;
- 5) Pembayaran retensi
- 6) Penyusunan Program dan Anggaran;
- 7) Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK.

f) Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan:

- 1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 2) Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan;



- 3) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 1;
- 4) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 2;
- 5) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 3;
- 6) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 4;
- 7) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 5;
- 8) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 7;
- 9) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 8;
- 10) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 9;
- 11) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 10;
- 12) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 11;
- 13) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 13;
- 14) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 14;
- 15) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 15;
- 16) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 16;
- 17) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 18;
- 18) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 19;
- 19) Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 20;
- 20) Pemeliharaan rutin dengan sistem mantri jalan UPTD Wil. I;
- 21) Pemeliharaan rutin dengan sistem mantri jalan UPTD Wil. II;
- 22) Pemeliharaan rutin dengan sistem mantri jalan UPTD Wil. III;
- 23) Pemeliharaan rutin dengan sistem mantri jalan UPTD Wil. IV;
- 24) Pemeliharaan rutin dengan sistem mantri jalan UPTD Wil. V;
- 25) Pemeliharaan rutin dengan sistem mantri jalan UPTD Wil. VI.

g) Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

Kegiatan:

- 1) Penyusunan Sistem Informasi/ Database Jalan
- 2) Penyusunan leger jalan Provinsi Lampung

h) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Kegiatan:

- 1) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat untuk Satgas PCA;
- 2) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat untuk UPTD Wil. I;
- 3) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat untuk UPTD Wil. II;
- 4) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat untuk UPTD Wil. III;
- 5) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat untuk UPTD Wil. IV;
- 6) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat untuk UPTD Wil. V;
- 7) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat untuk UPTD Wil. VI;



- 8) Pengadaan alat-alat laboratorium;
- 9) Pemeliharaan dan kalibrasi alat laboratorium.

i) Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong

Kegiatan:

- 1) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
- 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

j) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Kegiatan:

- 1) Inspeksi kondisi jembatan;
- 2) Inspeksi kondisi jalan koridor 1-6;
- 3) Inspeksi kondisi jalan koridor 7-12;
- 4) Inspeksi kondisi jalan koridor 13-17;
- 5) Inspeksi kondisi jalan koridor 18-22.

k) Program Pembinaan Jasa Konstruksi

Kegiatan:

- 1) Pengaturan dan pemberdayaan jasa konstruksi;
- 2) Pengawasan jasa konstruksi;
- 3) Pengelolaan rumija;
- 4) Pelatihan bidang konstruksi;

l) Program Pembangunan Jalan-jalan Strategis

Kegiatan:

- 1) Perencanaan pembangunan jalan dan jembatan strategis;
- 2) Pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan strategis;
- 3) Pembangunan jalan dan jembatan strategis.

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal/Pencapaian Program dan Kegiatan

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan.

Capaian :

- 1) Terselenggaranya proses penyelenggaraan administrasi kantor jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik realisasi 100%
- 2) Meningkatkan efektifitas dalam bekerja penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. realisasi 100%



- 3) Meningkatkan efektifitas dalam bekerja penyediaan alat tulis kantor. realisasi 100%
- 4) Meningkatkan efektivitas dalam bekerja penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Realisasi 100%
- 5) Menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas rutin kantor penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Realisasi 100%
- 6) Tersedianya pedoman dan peraturan pendukung penyelenggaraan pemerintah yang baik. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Realisasi 100%
- 7) Pelaksanaan rapat serta tugas rutin berjalan baik. penyediaan makanan dan minuman. Realisasi 100%
- 8) Tercapainya sinergisitas penyelenggaran pembangunan antar daerah dan pusat. rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Realisasi 100%
- 9) Meningkatnya efesiensi kerja. penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran. Realisasi 100%
- 10) Tercapainya sinergisitas penyelenggaran pembangunan antar daerah. rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. Realisasi 100%
- 11) Meningkatkan publikasi dinas pada masyarakat. penyediaan jasa publikasi. Realisasi 58,30%
- 12) Meningkatkan aktivitas dan kreativitas untuk menunjang pembangunan daerah. pameran dan promosi pembangunan. Realisasi 100%
- 13) Terselenggaranya proses penyelenggaraan administrasi kantor jasa administrasi keuangan. Realisasi 100%

b) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan terdiri dari 31 (Tiga Puluh Satu) kegiatan

Capaian :

- 1) Tersedianya data informasi/perencanaan pembangunan jalan. Realisasi 100%
- 2) Tersedianya data informasi/perencanaan pembangunan jembatan. Realisasi 100%
- 3) Terlaksananya pembangunan jembatan kondisi baik dan fungsional. Realisasi 68,09%
- 4) Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan tepat guna , tempat administrasi dan taat hukum. Realisasi 100%



- 5) Terlaksananya pembangunan jembatan tepat guna , tepat administrasi dan taat hukum. Realisasi 100%
- 6) Terlaksananya pembangunan jalan tepat guna , tepat administrasi dan taat hukum Koridor 1-6 . Realisasi 100%
- 7) Terlaksananya pembangunan jalan tepat guna , tepat administrasi dan taat hukum Koridor 7-12 . Realisasi 100%
- 8) Terlaksananya pembangunan jalan tepat guna , tepat administrasi dan taat hukum Koridor 13-17 . Realisasi 100%
- 9) Terlaksananya pembangunan jalan tepat guna , tepat administrasi dan taat hukum Koridor 18-22 . Realisasi 100%
- 10) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 1 . Realisasi 75%
- 11) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 2 . Realisasi 100%
- 12) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 3 . Realisasi 100%
- 13) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 4 . Realisasi 93,33%
- 14) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 5. Realisasi 90,00%
- 15) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 6 . Realisasi 100%
- 16) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 7 . Realisasi 100%
- 17) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 8 . Realisasi 100%
- 18) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 9 . Realisasi 100%
- 19) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 10 . Realisasi 100%
- 20) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 11 . Realisasi 100%
- 21) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 12 . Realisasi 96,67%
- 22) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 13 . Realisasi 100%
- 23) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 14 . Realisasi 97,50%
- 24) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 15 . Realisasi 100%
- 25) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 16 . Realisasi 100%
- 26) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 17 . Realisasi 100%
- 27) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 18 . Realisasi 100%
- 28) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 19 . Realisasi 100%
- 29) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 20 . Realisasi 100%
- 30) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 21 . Realisasi 100%
- 31) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 22. Realisasi 100%

c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 8 (delapan) kegiatan .

Capaian :

- 1) Tersedianya kebutuhan kendaraan operasional kantor. Realisasi 100%



- 2) Tersedianya kebutuhan perlengkapan gedung kantor. Realisasi 100%
- 3) Tersedianya kebutuhan peralatan gedung kantor. Realisasi 100%
- 4) Tersedianya kebutuhan meubeleuer kantor. Realisasi 100%
- 5) Terpeliharanya gedung kantor secara berkala. Realisasi 100%
- 6) Terpeliharanya mobilitas pelaksanaan tugas berjalan lancar. Realisasi 95,57%
- 7) Terpeliharanya peralatan gedung kantor. Realisasi 100%
- 8) Terpeliharanya meubeleuer kantor agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Realisasi 100%

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 2 (dua) kegiatan

Capaian :

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil. Realisasi 72,70%;
- 2) Kapasitas apratur menjadi lebih baik Realisasi 100%.

e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan.

Capaian :

- 1) Tersedianya data penyelenggaraan keuangan pembangunan. Realisasi 100%
- 2) Tersedianya data dan informasi penyelenggaraan keuangan. Realisasi 100%
- 3) BMD pada Dinas Bina Marga terinventarisir dengan baik. Realisasi 100%
- 4) Tersedianya data harga dasar upah bahan dan alat bidang kebinamarga. Realisasi 100%
- 5) Pengelola keuangan SKPD berjalan optimal. Retensi kegiatan. Realisasi 100%.
- 6) Tersedianya data dan informasi tentang penyusunan program dan anggaran. Realisasi 100%
- 7) Terlaksananya pembangunan jalan tepat guna, tepat administrasi dan hukum. Realisasi 100%



f) Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri dari 25 (Dua Puluh Lima) kegiatan.

Capaian :

- 1) Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan tepat guna, tepat administrasi dan taat hukum. Realisasi 100%
- 2) Jembatan kondisi Baik. Realisasi 100%
- 3) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 1 . Realisasi 100%
- 4) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 2 . Realisasi 91,67%
- 5) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 3 . Realisasi 100%
- 6) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 4 . Realisasi 100%
- 7) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 5 . Realisasi 100%
- 8) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 7 . Realisasi 100%
- 9) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 8 . Realisasi 100%
- 10) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 9 . Realisasi 100%
- 11) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 10 . Realisasi 96,25%
- 12) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 11 . Realisasi 100%
- 13) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 13 . Realisasi 95,00%
- 14) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 14 . Realisasi 100%
- 15) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 15 . Realisasi 100%
- 16) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 16 . Realisasi 100%
- 17) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 18 . Realisasi 100%
- 18) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 19 . Realisasi 75,00%
- 19) Kondisi mantap jalan provinsi Koridor 20 . Realisasi 100%
- 20) Kondisi mantap jalan provinsi UPTD wil. I . Realisasi 100%
- 21) Kondisi mantap jalan provinsi UPTD wil. II . Realisasi 100%
- 22) Kondisi mantap jalan provinsi UPTD wil. III . Realisasi 100%
- 23) Kondisi mantap jalan provinsi UPTD wil. IV . Realisasi 100%
- 24) Kondisi mantap jalan provinsi UPTD wil. V . Realisasi 100%
- 25) Kondisi mantap jalan provinsi UPTD wil. VI . Realisasi 100%

g) Program Pembangunan Sistem Informasi Data Base Jalan & Jembatan

Program Pembangunan Sistem Informasi Data Base Jalan & Jembatan terdiri dari 2 (dua) kegiatan.

Capaian :

- 1) Tersedianya jaringan internet dan website PUPR serta software laporan kinerja. Realisasi 99,94%
- 2) Tersedianya data informasi jalan. Realisasi 100%

**h) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan terdiri dari 9 (Sembilan) kegiatan.

Capaian :

- 1) Terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan PCA. Realisasi 100%
- 2) Terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan UPTD Wilayah I. Realisasi 100%
- 3) Terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan UPTD Wilayah II. Realisasi 100%
- 4) Terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan UPTD Wilayah III. Realisasi 100%
- 5) Terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan UPTD Wilayah IV. Realisasi 100%
- 6) Terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan UPTD Wilayah V. Realisasi 100%
- 7) Terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan UPTD Wilayah VI. Realisasi 100%
- 8) Terpenuhiya alat alat laboratorium. Realisasi 100%
- 9) Terpeliharanya sarana dan prasarana laboratorium. Realisasi 77,65%

i) Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong terdiri dari 2 (dua) kegiatan.

Capaian :

- 1) Gorong - gorong/drainase dalam kondisi baik. Realisasi 100%;
- 2) Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong dapat berjalan dengan baik tepat guna, tepat administrasi dan taat hukum. Realisasi 100%.

j) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Program Inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian :

- 1) Data kondisi jembatan provinsi. Realisasi 100%
- 2) Data kondisi jalan provinsi pada koridor 1 s.d 6. Realisasi 100%
- 3) Data kondisi jalan provinsi pada koridor 7 s.d 12. Realisasi 100%
- 4) Data kondisi jalan provinsi pada koridor 13 s.d 17. Realisasi 100%
- 5) Data kondisi jalan provinsi pada koridor 18 s.d 22. Realisasi 100%



k) Program Pembinaan Jasa Konstruksi

Program Pembinaan Jasa Konstruksi terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%

Capaian :

- 1) Terwujudnya peningkatan kordinasi, efesiensi, efektifitas dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Realisasi 100%;
- 2) Terwujudnya pengawasan jasa konstruksi. Realisasi 100%;
- 3) Terwujudnya pengelolaan rumija. Realisasi 100%;
- 4) Terwujudnya peningkatan kordinasi, efesiensi, efektifitas dalam pelaksanaan pelatihan jasa konstruksi. Realisasi 92,50%;

l) Program Pembangunan Jalan-Jalan Strategis

Program Pembangunan Jalan-jalan Strategis terdiri dari 3 (tiga) kegiatan.

Capaian :

- 1) Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan jalan strategis. Realisasi 100%;
- 2) Pembangunan Jalan dan Jembatan Strategis dapat berjalan dengan baik. Realisasi 100%;
- 3) Jalan dan jembatan Strategis dalam kondisi baik. Realisasi 97,41%.

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/GOL.	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 348	S3 : 0	I/a : 0	Ess IV = 35	
	S2 : 56	I/b : 0	Ess III = 12	
	S1 : 108	I/c : 0	Ess II = 1	
	D4 : 0	I/d : 0		
	D3 : 9	II/a : 10		
	D1 : 0	II/b : 11		
	SMA : 147	II/c : 75		
	SMP : 10	II/d : 34		
	SD : 3	III/a : 62		
		III/b : 47		
		III/c : 39		
		III/d : 30		
		IV/a : 20		
		IV/b : 4		
		IV/c : 0		
		IV/d : 1		
Jumlah PNS	PNS = 333	PNS = 333		

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Desember 2019



5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 adalah :

Alokasi Anggaran Rp. 670.012.891.831,-
Dengan rincian :

Belanja Langsung Rp. 639.572.707.500,-
 Belanja Tidak Langsung Rp. 30.440.184.331,-

Realisasi Anggaran (Desember 2019) Rp. 612.465.194.583,- (91,33 %)
 Realisasi Kinerja (Desember 2019) Rp. 612.465.194.583,- (97,47 %)

Dengan rincian :

Belanja Langsung Rp. 584.277.577.402,-
 Belanja Tidak Langsung Rp. 28.187.617.181,-

6. Proses Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mekanisme sebagai berikut :

- a) Sosialisasi program tahun berjalan dan rencana program tahun berikutnya ke kabupaten/kota dan instansi terkait;
- b) Rapat koordinasi teknis;
- c) Penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD);
- d) Musrenbang Provinsi;
- e) Fasilitasi dan koordinasi Musrenbang kab/kota dan pusat/nasional;
- f) Penyusunan RKPD;
- g) Penyusunan KUA dan PPAS;
- h) Finalisasi dan Penetapan PPA;
- i) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- j) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

No.	Item	Jumlah	Kondisi
1.	Mobil dinas	22 Unit	Baik
2.	Sepeda Motor	5 Unit	Rusak ringan



No.	Item	Jumlah	Kondisi
3.	Motor Tossa	20 Unit	Rusak berat
4.	Laptop & Komputer	23 Unit	Baik
5.	Printer	13 Unit	Baik
6.	Kursi kerja	21 Unit	Baik
7.	Air Conditioner	18 Unit	Baik
8.	Lemari Arsip	10 Unit	Baik
9.	Filling Cabinet	12 Unit	Baik
10.	Meja kerja	Tersebar	Baik
11.	Meja Rapat	Tersebar	Baik

Sumber : Sub Bagian Umum Desember 2019

8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Perencanaan pembangunan pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung adalah berdasarkan ketersediaan anggaran pemerintah Provinsi Lampung. Oleh karena itu, pola dan sistem perencanaan menyesuaikan pada skala prioritas pembangunan.

Disamping itu, pengalokasian anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung kurang konsisten mengingat anggaran secara menyeluruh APBD Provinsi Lampung pada SKPD lain perlu terpenuhi juga. Hal ini sangat berkaitan dengan kemantapan kondisi jalan status Provinsi yang tidak tercapai secara maksimal bila alokasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak konsisten.

Solusi

Alokasi anggaran pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung agar dapat dengan konsisten besarnya atau seiring dengan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung, sehingga dapat tercapai kemantapan kondisi jalan status provinsi sesuai rencana strategi Provinsi Lampung.

9. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

No	Urusan Wajib	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung			Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%	Ket
			Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Belanja Modal (Rp)				
I.	Pekerjaan Umum	30.440.184.331.-	10.551.450.000.-	106.519.898.200.-	522.501.359.300.-	670.012.891.831.-	612.465.194.583.-	91,41%	

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi (desentralisasi) di bidang kebinamargaan berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangannya, serta tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur Lampung serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur Lampung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Adapun prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

- a) Pemeliharaan dan peningkatan ruas-ruas jalan pada Lintas Timur, Lintas Tengah dan Lintas Barat dan *feeder road* (jalan pengumpan) nya, serta ruas- ruas jalan strategis.
- b) Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru untuk menunjang pengembangan potensi daerah dan pembukaan daerah terisolir.
- c) Penataan kembali database jalan dan jembatan secara lengkap sehingga dapat ditampilkan data kondisi jalan dan jembatan terbaru (*up to date*) untuk keperluan pengelolaan lebih lanjut.
- d) Penataan kembali jaringan jalan nasional dan provinsi sesuai dengan fungsi dan hirarkinya menurut undang-undang dan volume lalu-lintasnya, sehingga setiap ruas jalan berada pada kewenangan yang tepat untuk keperluan pembinaan selanjutnya.
- e) Tersedianya sistem manajemen yang dapat berfungsi sebagai alat untuk membuat kebijakan penanganan jalan dan jembatan di tingkat provinsi.
- f) Pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi jalan dan jembatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mensyaratkan kepemilikan sertifikat keahlian dari asosiasi atau lembaga yang berwenang.

Sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 dan PER/20/M.PAN.RB/11/2008. Ada 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan capaian sasaran atau kegiatan telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung selama tahun 2019, yaitu:

- a) Jumlah Pembangunan Jalan;
- b) Jumlah Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan.

Dari hasil analisis capaian kinerja berdasarkan evaluasi diatas, pelaksanaan program dan kegiatan telah sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat dilihat dari peningkatan kondisi jalan provinsi di Provinsi Lampung dalam beberapa tahun terakhir (2015-2019)

DAFTAR KONDISI JALAN PROVINSI LAMPUNG 2019

KONDISI JALAN	%	BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
MANTAP	74.414	66.250	8.164		
TIDAK MANTAP	25.586			5.335	20.250

Hasil Survey Ruas Jalan Status Provinsi Bulan Desember 2019

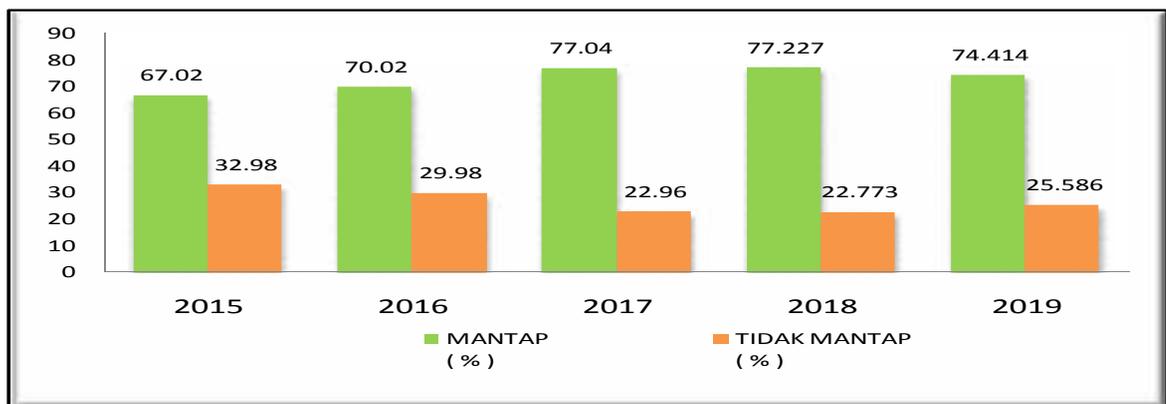


DAFTAR KONDISI JALAN PROVINSI LAMPUNG 2015-2019

TAHUN	MANTAP (%)	TIDAK MANTAP (%)	KENAIKAN (%)
2015	67.02	32.98	-
2016	70.02	29.98	3.00
2017	77.04	22.96	7.02
2018	77.227	22.773	7.21
2019	74.414	25.586	-2.63

Perbandingan kondisi Mantab dan Tidak Mantab jalan Ruas Provinsi di Provinsi Lampung kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada diagram chart dibawah ini :

Grafik Time Series Kondisi Ruas Jalan Provinsi



Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung

1. Prioritas Urusan Wajib

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di Provinsi Lampung Tahun 2019 dilaksanakan oleh **Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung**.

2. Program dan Kegiatan

Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2019 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah melaksanakan **14 program** dan **86 kegiatan**, yaitu:

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 9) Penyediaan makanan dan minuman,
- 10) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 11) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
- 12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
- 13) Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD
- 14) Penatausahaan Aset Daerah

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kegiatan :

- 1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Mobil Dinas/Operasional
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan Gedung Kantor
- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Kegiatan :

- 1) Analisa jabatan (ANJAB) SKPD
- 2) Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja
- 3) Penyusunan dan Updating Sistem Informasi Kepegawaian
- 4) Penyediaan Sarana Kelompok Kerja Pengadaaan Barang dan Jasa
- 5) Analisa Beban Kerja (ABK)

d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.

Kegiatan :

- 1) Penyusunan laporan keuangan semesteran
- 2) Penyusunan Laporan Bulanan
- 3) Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun
- 4) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- 5) Penyusunan Renstra
- 6) Penyusunan RENJA dan RKA SKPD
- 7) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- 8) Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD)
- 9) Pembayaran Retensi
- 10) Penyusunan Perjanjian Kinerja



e) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya.

Kegiatan :

- 1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)
- 2) OP Irigasi/Rawa 1,000-3,000 Ha (swakelola)
- 3) OP Waduk Sungai (swakelola)
- 4) Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Irigasi
- 5) Pengelolaan Pos Hidrologi
- 6) Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Bangunan Pelengkapannya
- 7) Peningkatan Sistem Informasi Sumber Daya Air
- 8) Manajemen Sistem Irigasi
- 9) Perencanaan Teknis Bidang Operasi dan Pemeliharaan
- 10) Monitoring dan Pelaporan Bidang Pengairan

f) Program Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya.

Kegiatan:

- 1) Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya.
- 2) Rehabilitasi Embung, Waduk, Situ dan Bangunan Penampung air lainnya
- 3) Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Semangka
- 4) Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Seputih-Sekampung
- 5) Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Mesuji - Tulang Bawang
- 6) Pembangunan Irigasi Desa (PID)
- 7) Pembangunan/Revitalisasi Bendung dan Bangunan Air Lainnya
- 8) Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- 9) Perencanaan Teknis Bidang Konservasi

g) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Kegiatan :

- 1) Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dan Persampahan.
- 2) Koordinasi dan Pendampingan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS).
- 3) Koordinasi dan Pendampingan Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

h) Program Pengendalian Banjir.

Kegiatan :

- 1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
- 2) Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa dalam Rangka Pengendali Banjir
- 3) Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai



- 4) Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali
- 5) Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Pengaman Pantai

i) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kegiatan :

- 1) Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pedesaan Potensial
- 2) Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Agropolitan/Minapolitan
- 3) Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Strategis

j) Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

Kegiatan :

- 1) Pembangunan Sarana & Prasarana Air Bersih Pedesaan
- 2) Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan
- 3) Perencanaan Teknis Infrastruktur Perdesaan dan Wilayah Strategis
- 4) Koordinasi dan pendampingan kota tanpa kumuh

k) Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan :

- 1) Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan
- 2) Pengembangan Permukiman dan Bangunan
- 3) Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Bidang Permukiman dan Bangunan

l) Program Lingkungan Sehat Perumahan

Kegiatan :

- 1) Pengendalian Banjir Kawasan Lingkungan Perumahan (wilayah utara)
- 2) Pengendalian Banjir Kawasan Lingkungan Perumahan (wilayah selatan)
- 3) Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan (wilayah utara)
- 4) Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan (wilayah selatan)
- 5) Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi (wilayah utara)
- 6) Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi (wilayah selatan)
- 7) Perencanaan Teknis Bidang Permukiman
- 8) Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur Cipta
- 9) Monitoring dan Pelaporan Bidang Pemukiman

m) Program Prasaran dan Sarana Bangunan Gedung dan Lingkungan

Kegiatan:

- 1) Pembangunan Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung dan Lingkungan
- 2) Rehabilitasi Prasarana dan Sarana bangunan Gedung dan Lingkungan
- 3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pelestarian Cagar Budaya
- 4) Pembangunan dan Rehabilitasi Relief, Ornamen, Tugu, Monumen, Taman
- 5) Perencanaan Teknis Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan



n) **Program Pengembangan Data/Informasi**

Kegiatan:

- 1) Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
- 2) Pengelolaan dan Pengembangan Website Dinas

3. **Realisasi Program dan Kegiatan**

a) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 14 (Empat Belas) kegiatan dengan realisasi fisik 91,13%.

Capaian :

Program ini diperuntukkan untuk kegiatan kegiatan penunjang proses pelayanan kepada masyarakat sehingga kesesuaian realisasi dengan rencana operasional sangatlah krusial. Di dalam program ini terdapat kegiatan-kegiatan antara lain:

- 1) Jasa surat menyurat, bertujuan membantu proses komunikasi SKPD Ke SKPD lain ataupun instansi2 terkait yang mempunyai hubungan pekerjaan.
- 2) Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, bertujuan membantu SKPD dalam hal menyiapkan sarana dan prasarana utama pelayanan seperti telepon, listrik dan lain-lain.
- 3) Jasa Administrasi Keuangan, bertujuan menyediakan satuan khusus terhadap pelayanan terhadap masyarakat maupun pegawai dalam hal pembiayaan dan penerimaan barang dan jasa.
- 4) Jasa Kebersihan Kantor, bertujuan untuk menyediakan alat-alat penunjang perawatan kebersihan lingkungan kantor sehingga pelayanan lebih kondusif dan optimal.
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor, bertujuan untuk pembelian alat-alat tulis dan perlengkapan perkantoran.
- 6) Barang Cetakan dan Penggandaan, bertujuan menyediakan komponen penunjang perbanyak dokumentasi atau berkas perkantoran.
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, bertujuan mendukung dan mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam hal penunjang sumber daya penerangan dalam proses pelayanan.
- 8) Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, bertujuan menyediakan sarana bacaan untuk pegawai maupun masyarakat tentang informasi-informasi terkait.
- 9) Penyediaan Makanan dan Minuman, bertujuan menyediakan makanan dan minuman jika ada kegiatan dalam internal SKPD.



- 10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, bertujuan memfasilitasi kunjungan kerja atau survey atas nama SKPD dengan tujuan Luar daerah
- 11) Jasa Administrasi Teknis Perkantoran, bertujuan Menyediakan Sumber Daya Manusia sebagai pendukung Struktur Pelaksana Pelayanan.
- 12) Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, bertujuan memfasilitasi kunjungan kerja atau survey atas nama SKPD dengan tujuan Dalam daerah.
- 13) Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD, bertujuan untuk menyediakan Provider dan pelaksana pengelolaan keuangan SKPD.
- 14) Penatausahaan Aset Daerah, bertujuan untuk mendata dan merekapitulasi barang-barang yang dikuasai SKPD.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 4 (Empat) kegiatan dengan realisasi fisik 96,86%.

Capaian :

- 1) Tersedianya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, bertujuan menyediakan perawatan dan pemeliharaan transportasi yang dikuasai SKPD.
- 2) Terpeliharanya rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor, bertujuan memelihara aset kantor dan perlengkapannya.
- 3) Terpeliharanya rutin/ berkala peralatan gedung kantor, bertujuan memelihara aset kantor.
- 4) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, bertujuan merehabilitasi gedung-gedung sebagai perbaikan pelayanan terhadap masyarakat.

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan realisasi fisik 91,97%.

Capaian :

- 1) Terlaksananya Analisa jabatan (ANJAB) SKPD
- 2) Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja
- 3) Terlaksananya Penyusunan dan Updating Sistem Informasi Kepegawaian
- 4) Terlaksananya Penyediaan Sarana Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
- 5) Terlaksananya Analisa Beban Kerja (ABK)

d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan dengan realisasi fisik 99,53%.



Capaian :

- 1) Penyusunan Keuangan Semester, bertujuan membuat laporan pertanggung jawaban keuangan periode semester.
- 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, bertujuan membuat laporan pertanggung jawaban keuangan selama setahun.
- 3) Penyusunan Laporan Bulanan, bertujuan melaporkan progres kinerja dan keuangan tiap bulannya selama satu tahun.
- 4) Penyusunan LAKIP, bertujuan melaporkan jalannya pemerintahan SKPD dengan format tertentu, terlapor satu tahun sebelumnya.
- 5) Penyusunan Renstra, bertujuan menyusun rencana strategis
- 6) Penyusunan RENJA, bertujuan memberikan penjelesan tentang rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.
- 7) Penyusunan LPPD, bertujuan untuk melaporkan pertanggungjawaban tentang pekerjaan yang dilaksanakan SKPD pada tahun sebelumnya.
- 8) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- 9) Pembayaran Retensi, bertujuan untuk melaksanakan pembayaran retensi kegiatan tahun lalu.
- 10) Penyusunan Perjanjian Kinerja

e) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya, terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan dengan realisasi fisik 97,07%.

Capaian:

- 1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK), bertujuan melaksanakan kegiatan rehabilitasi pada jaringan irigasi kewenangan Provinsi.
- 2) Pengoptimalan Jaringan Irigasi.Rawa 1.000-3.000, bertujuan memelihara jaringan irigasi kewenangan provinsi secara prioritas dan periodik.
- 3) Pengoptimalan Waduk Sungai, bertujuan melakukan pemeliharaan di 2 bangunan pelengkap irigasi .
- 4) Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Irigasi, bertujuan mensosialisasikan pengelolaan pada daerah sekitar 19 Daerah Irigasi kewenangan Provinsi.
- 5) Pengelolaan Pos Hidrologi, bertujuan memperbaiki dua pos hidrologi yang mengalami kerusakan.
- 6) Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Bangunan Pelengkap, bertujuan memelihara 19 Jaringan Irigasi kewenangan Provinsi.
- 7) Peningkatan Sistem Informasi Sumber Daya Air, bertujuan menyediakan akses informasi jaringan dan dokumen sistem informasi SDA.



- 8) Manajemen Sistem Irigasi, bertujuan merehabilitasi Konstruksi serta membuat desain Partisipatif.
- 9) Perencanaan Teknis Bidang Operasi dan Pemeliharaan, bertujuan membuat 1 Dokumen DED jaringan Irigasi, study telusur Way Semangka, Study Potensi Irigasi Provinsi Lampung.
- 10) Monitoring dan Pelaporan Bidang Pengairan, bertujuan menyediakan fasilitas kegiatan survey dan laporan di bidang pengairan.

f) Program Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya.

Program Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya, terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dengan realisasi fisik 93.09%.

Capaian :

- 1) Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya, bertujuan melakukan pembangunan 2 embung.
- 2) Rehabilitasi Embung, Waduk, Situ dan Bangunan Penampung air lainnya, bertujuan melakukan rehabilitasi 3 embung.
- 3) Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Semangka, bertujuan memelihara SDA wilayah bersangkutan.
- 4) Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Seputih-Sekampung, bertujuan memelihara SDA wilayah bersangkutan.
- 5) Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Mesuji - Tulang Bawang, bertujuan memelihara SDA wilayah bersangkutan.
- 6) Pembangunan Irigasi Desa (PID), bertujuan membangun 3 Irigasi Desa.
- 7) Pembangunan/Revitalisasi Bendung dan Bangunan Air lainnya, bertujuan membangun Sarana & prasarana Teknologi tepat guna.
- 8) Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi lampung, bertujuan mensosialisasikan pengelolaan sungai, danau dan SDA lainnya.
- 9) Perencanaan teknis Bidang Konservasi, bertujuan membuat Dokumen Teknis pada Bidang Konservasi.

g) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik 100%.

Capaian :

- 1) Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dan Persampahan, bertujuan menyediakan prasarana dan sarana penampung air limbah dan persampahan



- 2) Koordinasi dan Pendampingan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), bertujuan untuk melaksanakan koordinasi pendampingan program air minum.
- 3) Koordinasi dan Pendampingan Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), bertujuan untuk melaksanakan koordinasi pendampingan program air minum.

h) Program Pengendalian Banjir

Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai, terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan realisasi fisik 100%.

Capaian :

- 1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai, bertujuan melaksanakan 2 kegiatan rehabilitasi bantaran dan tanggul.
- 2) Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa dalam Rangka Pengendalian Banjir, bertujuan membangun 1 tanggul Penahan Tanah Braja Slebah Kab. Lampung Timur.
- 3) Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan-Badan Sungai, bertujuan melaksanakan pembangunan 1 Talud/bronjong.
- 4) Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/kali, bertujuan melaksanakan 3 kegiatan normalisasi sungai/kali
- 5) Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Pengamanan Pantai, bertujuan membangun 2 pengaman pantai di Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan

i) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik 100%.

Capaian :

- 1) Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pedesaan Potensial, bertujuan melaksanakan pembangunan di desa.
- 2) Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Agropolitan/Minapolitan, bertujuan melaksanakan pembangunan jalan usaha tani.
- 3) Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Strategis, bertujuan melaksanakan pembangunan di kawasan yang strategis.

j) Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan realisasi fisik 100%.

Capaian :

- 1) Pembangunan Sarana & Prasarana Air Bersih Pedesaan, bertujuan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air bersih di pedesaan.



- 2) Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan, bertujuan membangun balai desa.
- 3) Perencanaan Teknis Infrastruktur Perdesaan dan Wilayah Strategis, bertujuan membuat dokumen perencanaan teknis infrastruktur pedesaan
- 4) Koordinasi dan pendampingan kota tanpa kumuh, bertujuan melaksanakan koordinasi dan pendampingan untuk kota tanpa kumuh

k) Program Pengembangan Perumahan

Program Pengembangan Perumahan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik 95,39%.

Capaian :

- 1) Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan,
- 2) Pengembangan Permukiman dan Bangunan
- 3) Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Bidang Permukiman dan Bangunan, bertujuan melaksanakan keikutsertaan dalam pameran pembangunan.

l) Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dengan realisasi fisik 100%.

Capaian :

- 1) Pengendalian Banjir Kawasan Lingkungan Perumahan (wilayah utara), bertujuan membangun drainase
- 2) Pengendalian Banjir Kawasan Lingkungan Perumahan (wilayah selatan) , bertujuan membangun drainase
- 3) Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan (wilayah utara), bertujuan membangun jalan di lingkungan perumahan.
- 4) Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan (wilayah selatan), bertujuan membangun jalan di lingkungan perumahan.
- 5) Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi (wilayah utara), bertujuan membangun sarana air bersih dan sanitasi (sumur bor).
- 6) Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi (wilayah selatan), bertujuan membangun sarana air bersih dan sanitasi (sumur bor).
- 7) Perencanaan Teknis Bidang Permukiman, bertujuan membuat dokumen perencanaan pembangunan bidang permukiman.
- 8) Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur Cipta Karya, bertujuan melaksanakan koordinasi di bidang infrastruktur cipta karya
- 9) Monitoring dan Pelaporan Bidang Pemukiman, bertujuan melaksanakan monitoring/pengawasan pembangunan di bidang pemukiman



m) Program Prasaran dan Sarana Bangunan Gedung dan Lingkungan

Program Prasaran dan Sarana Bangunan Gedung dan Lingkungan, terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan realisasi fisik 99,72%.

Capaian :

- 1) Pembangunan Prasarana dan sarana bangunan gedung dan lingkungan, bertujuan membangun 36 gedung dan bangunan
- 2) Rehabilitasi prasarana dan Sarana bangunan Gedung dan Lingkungan, bertujuan merehabilitasi 6 gedung dan lingkungan.
- 3) Pembangunan, rehabilitasi dan Pelestarian Cagar Budaya, bertujuan membangun Balai Adat.
- 4) Pembangunan dan Rehabilitasi Relief, Ornamen, Tugu, Monumen, Taman dan Lansekap, bertujuan merehab 1 Gedung
- 5) Perencanaan Teknis Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan, bertujuan membuat dokumen Perencanaan Teknis Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan.

n) Program Pengembangan Data/Informasi

Program Pengembangan Data/Informasi, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan realisasi fisik 100%.

Capaian :

- 1) Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
- 2) Pengelolaan dan Pengembangan Website Dinas

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 444	S3 : -	IV/d : 1	Ess IV = 20	
L : 331	S2 : 28	IV/c : -	Ess III = 8	
P : 113	S1 : 102	IV/b : 5	Ess II = 1	
	D4 : -	IV/a : 13		
PTHL : 394	D3 : 16	III/d : 36		
	D2 : -	III/c : 25		
	D1 : -	III/b : 29		
	SLTA : 267	III/a : 80		
	SLTP : 18	II/d : 125		
	SD : 17	II/c : 94		
		II/b : 23		
		II/a : 7		
		I/d : 4		
		I/c : 2		
		I/b : -		
		I/a : -		



5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

APBD Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung 2019 (per 31 Desember 2019)

Alokasi	Rp.	183.544.048.000,-
Realisasi	Rp	169.705.903.850,-
Anggaran untuk urusan Pekerjaan Umum:	Rp.	159.587.898.000,-
Realisasi untuk urusan Pekerjaan Umum :	Rp.	146.949.214.359,- (92.08%)

6. Proses Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mekanisme sebagai berikut :

- Sosialisasi program tahun berjalan dan rencana program tahun berikutnya ke kabupaten/kota dan instansi terkait;
- Rapat koordinasi teknis;
- Penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD);
- Musrenbang Provinsi;
- Fasilitasi dan koordinasi Musrenbang kab/kota dan pusat/nasional;
- Penyusunan RKPD;
- Penyusunan KUA dan PPAS;
- Finalisasi dan Penetapan PPA;
- Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	Meja Kerja	146			
2	Meja Rapat	16			
3	Kursi Putar Tangan	170			
4	Kursi Tamu Spfa	3			
5	Kursi Lipat	85			
6	Kursi Rapat	100			
7	Pesawat Telp.	3			
8	Lemari Kayu	8			
9	Lemari Kayu/Kaca	3			
10	Lemari Besi	7			
11	Foto Gubernur	7			



No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
12	Foto Wakil Gub	7			
13	AC	46	40	6	
14	Foto Presiden	7	7		
15	Foto Wakil Presiuden	7	7		
16	Lambang Garuda	7	7		
17	Peta Lampung	1	1		
18	Exhaus Fan	18	16	2	
19	Mesin Faximile	2	2	2	
20	Filling	6	6	6	
21	White Bord	1	1	1	
22	Kipas Angin	-	-	-	
23	PC	64	60	4	
24	Handy Cam	3	3		
25	Printer	136	134	2	
26	Lap Top	32	30	2	
27	Note Book	7	7	7	
28	External Hard Disk	5	5	5	
29	Mesin Penghancur Kertas	5	3	2	
30	Meja Loby	1	1	1	
31	Pinger Print	4	4		
32	Alat Pemadam Portable	5	5		
33	CCTV	5	5		
34	Handy Talkie	5	5		
35	Orgen	1	1		
36	GPS	6	6		
37	Vakum	5	5		
38	Server	1	1		
39	Rol Meter	5	5		
40	Mesin Tik	5	5		
41	Mesin Ptng Rumput	5	5		
42	Camera	4	4		
Jumlah		954	381	40	

8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Ketidaksesuain target MDG's dengan aggaran tahun berjalan;
- Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah pada beberapa lokasi pekerjaan tentang penentuan lokasi, sehingga menghambat mulai nya pekerjaan;
- Kendala cuaca pada pekerjaan di ruang terbuka
- Ahli fungsi persawahan

Solusi

- Penambahan anggaran pada tahun berikutnya
- Musyawarah antar perangkat daerah dan pemerintah sehingga didapat lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan;



- c) Sosialisasi tentang pentingnya irigasi untuk kelangsungan pangan jangka panjang di Provinsi Lampung.

9. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung

1. Prioritas Urusan Wajib

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Wajib yang Berkaitan dengan pelayanan dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Lampung Tahun 2019 dilaksanakan oleh *Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung*.

Program prioritas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung tahun 2019 meliputi:

- a) Program Pengembangan Perumahan;
- b) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan; dan
- f) Program Pengembangan Data / Informasi.

2. Program dan Kegiatan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung tahun 2019 telah melaksanakan **6 program** dan **48 kegiatan**, yaitu:

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
- 2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
- 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 5) Penyediaan alat tulis kantor;
- 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;



- 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 9) Penyediaan makanan dan minuman;
- 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- 11) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran;
- 12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;
- 13) Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD;
- 14) Penatausahaan Aset Daerah.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- 1) Pengadaan peralatan gedung kantor;
- 2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- 4) Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor.

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

- 1) Pendidikan dan pelatihan formal;
- 2) Analisa Jabatan (ANJAB) SKPD;
- 3) Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja;
- 4) Penyusunan dan Updating Sistem Informasi Kepegawaian;
- 5) Penyediaan Sarana Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
- 6) Analisa Beban Kerja (ABK);
- 7) Peningkatan Kompetensi Stakeholder Perumahan dan Kawasan Permukiman.

d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

- 1) Penyusunan laporan keuangan semesteran;
- 2) Penyusunan laporan bulanan;
- 3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
- 4) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- 5) Penyusunan Renstra;
- 6) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD;
- 7) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- 8) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- 9) Penyusunan Perjanjian Kinerja.



e) **Program Pengembangan Perumahan**

Kegiatan :

- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan;
- 2) Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Pemanfaatan Pertanahan;
- 3) Fasilitasi Perumahan Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- 4) Fasilitasi Pengembangan Perumahan di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
- 5) Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 6) Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan dan Pertanahan;
- 7) Penyelenggaraan Rumah Swadaya;
- 8) Penyelenggaraan Rumah Susun dan Rumah Khusus;
- 9) Pemberdayaan Masyarakat Pada Pembiayaan;
- 10) Penyelenggaraan Rumah Umum dan Rumah Komersil;
- 11) Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Kawasan;
- 12) Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
- 13) Perencanaan Pemanfaatan Pertanahan.

f) **Program Pengembangan Data/Informasi**

Kegiatan :

Pengelolaan dan Pengembangan Website Dinas

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal/Pencapaian Program dan Kegiatan

a) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.

Capaian :

- 1) Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan;
- 2) Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 12 bulan;
- 3) Terpenuhinya dana administrasi keuangan selama 12 bulan;
- 4) Terpenuhinya biaya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan;
- 5) Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan;
- 6) Terpenuhinya dana untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan;
- 7) Tersediannya dana untuk pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan;
- 8) Terpenuhinya dana untuk penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-



undangan selama 12 bulan;

- 9) Terpenuhinya pelaksanaan makan dan minum selama 12 bulan;
- 10) Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan;
- 11) Terpenuhinya honorarium PTHL sebanyak 50 orang selama 12 bulan;
- 12) Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 12 bulan;
- 13) Tersedianya biaya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan selama 12 bulan;
- 14) Terlaksananya peningkatan pengelolaan aset daerah.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.

Capaian :

- 1) Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor selama 12 bulan;
- 2) Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebanyak 5 unit;
- 3) Tersedianya dana pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor selama 12 bulan;
- 4) Terpenuhinya rehabilitasi sedang / berat gedung kantor.

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian :

- 1) Terpenuhinya dana kebutuhan pendidikan dan latihan sebanyak 2 kali untuk 6 orang aparatur;
- 2) Terpenuhinya analisa jabatan SKPD;
- 3) Tersedianya hasil evaluasi pengembangan budaya kerja;
- 4) Tersedianya updating sistem informasi kepegawaian;
- 5) Tersedianya dana untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- 6) Tersedianya dokumen analisa beban kerja;
- 7) Terlaksananya kursus singkat/pelatihan untuk stake holder.

d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.

Capaian :

- 1) Tersedianya laporan keuangan semesteran;



- 2) Tersedianya laporan bulanan;
- 3) Tersedianya laporan keuangan akhir tahun;
- 4) Tersedianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Tersedianya dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2018-2019;
- 6) Tersedianya dokumen Rencana Kerja dan RKA SKPD;
- 7) Tersedianya Rencana Kerja Tahunan;
- 8) Tersedianya dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 9) Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja.

e) **Program Pengembangan Perumahan**

Program Pengembangan Perumahan, terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.

Capaian :

- 1) Terkoordinasinya kebijakan pengembangan perumahan;
- 2) Terkoordinasinya kebijakan pengembangan pertanahan;
- 3) Terpenuhinya fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 100 unit;
- 4) Terpenuhinya fasilitasi pengembangan perumahan di Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh;
- 5) Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 6) Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan bidang perumahan dan pertanahan;
- 7) Terpenuhinya fasilitasi kegiatan Rumah Swadaya;
- 8) Terpenuhinya fasilitasi kegiatan Rumah Susun dan Rumah Khusus;
- 9) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat pada kegiatan pembiayaan;
- 10) Terselenggaranya kegiatan Rumah Umum dan Rumah Komersial;
- 11) Terselenggaranya kegiatan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 12) terselesaikannya masalah dan pengendalian kegiatan pertanahan;
- 13) Tersedianya dokumen perencanaan pemanfaatan pertanahan.

f) **Program Pengelolaan dan Pengembangan Website Dinas**

Program Pengelolaan dan Pengembangan Website Dinas, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100,00%, dengan capaian terlaksananya pengelolaan dan pengembangan Website Dinas.



4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional

Pegawai		Pendidikan		Pangkat / Gol		Jumlah Pejabat			
Status	Jumlah	Kualifikasi	Jumlah	Pangkat	Jumlah	Esselon	Jumlah	Jabatan	Jumlah
PNS	49	S3	-	IV/e	-	IV	15		
PTHL	60	S2	22	IV/d	1	III	5		
		S1	14	IV/c	-	II	1		
		D4	1	IV/b	5				
		D3	4	IV/a	9				
		D2	-	III/d	12				
		D1	-	III/c	8				
		SMA	7	III/b	3				
		SMP	1	III/a	3				
		SD	-	II/d	1				
				II/c	5				
				II/b	2				
				II/a	-				
				I/d	-				
				I/c	-				
				I/b	-				
				I/a	-				
	109		49		49		21		-

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2019 sebesar:

Alokasi : Rp. 40.492.787.000,-

Realisasi : Rp. 30.695.472.802,-

Persentase Realisasi : 75,8 %

6. Proses Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mekanisme sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi program tahun berjalan dan rencana program tahun berikutnya ke kabupaten/kota dan instansi terkait;
- 2) Rapat koordinasi teknis;
- 3) Penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD);
- 4) Musrenbang Provinsi;
- 5) Fasilitasi dan koordinasi Musrenbang kab/kota dan pusat/nasional;
- 6) Penyusunan RKPD;
- 7) Penyusunan KUA dan PPAS;
- 8) Finalisasi dan Penetapan PPA;
- 9) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- 10) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Kurang
1	AC	16		
2	Almari Kayu	2		
3	Almari Besi	4		
4	Kursi Putar/biro	28		
5	Kursi Tamu	2 set		
6	Kursi Chitose	37		
7	Laptop/Note book	8		
8	Meja Komputer	4		
9	Meja Rapat	14		
10	Meja 1/2 dan 1 Biro	30 & 5		
11	Mesin Absen Elektronik	1		
12	Mesin Penghancur Kertas	4		
13	Mesin Pompa Air	1		
14	Komputer PC	17		
15	Minibus (Terios)	5		
16	Alat Pemadam	4		
17	Printer	13		
18	Exhaust Fan	2		
19	Vacuum Cleaner	2		

8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Masih banyak jabatan yang kosong sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- Kurangnya pegawai yang memiliki kompetensi untuk menjalankan tupoksi Dinas.
- Belum sinkronnya data perumahan yang akan digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman

Solusi

- Diperlukan pengisian kekosongan jabatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung.
- Diperlukan penambahan jumlah pegawai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung.
- Melakukan koordinasi dengan Dinas/Badan/Instansi dan stakeholder terkait updating data yang akan dijadikan acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

9. Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung

1. Prioritas Urusan Wajib

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Provinsi Lampung Tahun 2019 dilaksanakan oleh *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung*. Program prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung, antara lain :

Program Perencanaan Tata Ruang

2. Program dan Kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman telah melaksanakan sebanyak **1 program** dengan **5 (lima) kegiatan** pada tahun 2019, yaitu :

Program Perencanaan Tata Ruang

- 1) Pembinaan Teknis Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penataan Bangunan dan Lingkungan
- 3) Pengawasan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
- 4) Fasilitasi dan Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
- 5) Fasilitasi Legislasi Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/ Kota

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal/Pencapaian Program dan Kegiatan

Program Perencanaan Tata Ruang

Program Perencanaan Tata Ruang Ke PU-PR terdiri dari 5 (lima) kegiatan. Dengan Realisasi fisik sebesar 90,67%

Capaian :

- 1) Pengaturan ruang dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Realisasi 95,00%
- 2) Penataan Bangunan dan Lingkungan yang efektif dan sesuai peraturan. Realisasi 100%
- 3) Pengawasan dan pengendalian dan pemanfaatan ruang Provinsi Lampung. Realisasi 78,33%
- 4) Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Lampung dengan baik dan berdasarkan peraturan yang berlaku Realisasi 80,00%
- 5) Legalisasi rencana rinci tata ruang kabupaten/kota. Realisasi 100%



4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/GOL.	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 16	S3 : 0	I/a : 0	Ess IV = 3	Non Eselon = 0
	S2 : 10	I/b : 0	Ess III = 1	
	S1 : 3	I/c : 0		
	D4 : 0	I/d : 0		
	D3 : 0	II/a : 0		
	D1 : 0	II/b : 0		
	SMA : 2	II/c : 1		
	SMP : 0	II/d : 0		
	SD : 0	III/a : 1		
		III/b : 1		
		III/c : 3		
		III/d : 3		
		IV/a : 5		
		IV/b : 1		
		IV/c : 0		
Jumlah PNS	PNS = 15	PNS = 15		

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Desember 2019

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2019 adalah :

Alokasi Anggaran	Rp. 7.288.576.474,-
Dengan rincian :	
Belanja Langsung	Rp. 5.917.397.000,-
Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.371.179.474,-
Realisasi Anggaran (Desember 2019)	Rp. 6.111.637.647,- (83,85%)
Realisasi Kinerja (Desember 2019)	Rp. 6.111.637.647,- (90,67%)
Dengan rincian :	
Belanja Langsung	Rp. 4.740.458.173,-
Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.371.179.474,-

6. Proses Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mekanisme sebagai berikut :

- Sosialisasi program tahun berjalan dan rencana program tahun berikutnya ke kabupaten/kota dan instansi terkait;
- Rapat koordinasi teknis;
- Penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD);



- d) Musrenbang Provinsi;
- e) Fasilitasi dan koordinasi Musrenbang kab/kota dan pusat/nasional;
- f) Penyusunan RKPD;
- g) Penyusunan KUA dan PPAS;
- h) Finalisasi dan Penetapan PPA;
- i) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- j) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

No.	Item	Jumlah	Kondisi
1.	Mobil dinas	22 Unit	Baik
2.	Sepeda Motor	5 Unit	Rusak ringan
3.	Motor Tossa	20 Unit	Rusak berat
4.	Laptop & Komputer	23 Unit	Baik
5.	Printer	13 Unit	Baik
6.	Kursi kerja	21 Unit	Baik
7.	Air Conditioner	18 Unit	Baik
8.	Lemari Arsip	10 Unit	Baik
9.	Filling Cabinet	12 Unit	Baik
10.	Meja kerja	Tersebar	Baik
11.	Meja Rapat	Tersebar	Baik

Sumber : Sub Bagian Umum Desember 2019

8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Perencanaan pembangunan pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung adalah berdasarkan ketersediaan anggaran pemerintah Provinsi Lampung. Oleh karena itu, pola dan sistem perencanaan menyesuaikan pada skala prioritas pembangunan.

Disamping itu, pengalokasian anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung kurang konsisten mengingat anggaran secara menyeluruh APBD Provinsi Lampung pada SKPD lain perlu terpenuhi juga. Hal ini sangat berkaitan dengan kemantapan kondisi jalan status Provinsi yang tidak tercapai secara maksimal bila alokasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak konsisten.

Solusi

Alokasi anggaran pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung agar dapat dengan konsisten besarannya atau seiring dengan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung, sehingga dapat tercapai kemantapan kondisi jalan status provinsi sesuai rencana strategi Provinsi Lampung.



9. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

No	Urusan Wajib	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung			Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%	Ket
			Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Belanja Modal (Rp)				
1.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.371.179.474,-	335.000.000,-	5.582.397.000,-	-	7.288.576.474,-	6.111.637.647,-	83,85 %	

Sasaran dari Program Perencanaan Tata Ruang adalah Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka keterpaduan program. Sasaran Strategis ini dicapai melalui Program Perencanaan Tata Ruang, dengan Indikator Kinerja Tertib pemanfaatan ruang wilayah yang selaras sesuai arah pengembangan wilayah Provinsi Lampung. Adapun Narasi Program Perencanaan Tata Ruang Tahun 2019 sebagai berikut :

- a) **Pembinaan Teknis Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**
Bimtek dan sosialisasi rencana rinci tata ruang dilakukan sebagai bentuk pembinaan penataan ruang kepada seluruh Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang handal serta sesuai dengan peraturan perundangan. Bimtek dan sosialisasi dilakukan juga dalam rangka menambah kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia penyelenggara penataan ruang di Provinsi Lampung
- b) **Penataan Bangunan dan Lingkungan**
Penataan Bangunan dan Lingkungan, berupa Penyusunan DED Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah
- c) **Pengawasan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang**
Kegiatan pengendalian penataan ruang dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Lampung serta sebagai langkah preventif atau pencegahan timbulnya penyimpangan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah
- d) **Fasilitasi dan Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)**
Kegiatan yang dilakukan berupa memfasilitasi Rapat Rutin dan Rakor TKPRD se-Provinsi Lampung
- e) **Fasilitasi Legislasi Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/ Kota**
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendorong percepatan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang rencana rinci tata ruang Kabupaten/Kota. Hal tersebut juga dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan percepatan dan kemudahan izin berusaha di Provinsi Lampung melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana peruntukan ruang	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana peruntukan ruang	Sesuai/ tidak sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai



Analisis Penyebab keberhasilan :

- 1) Dukungan Anggaran yang memadai dan serapan anggaran yang cukup tinggi
- 2) Tercapainya Pembinaan Teknis Penataan ruang Daerah kabupaten/kota
- 3) Tercapainya Penataan Ruang Serta Pengembangan Kawasan Strategis, Perkotaan dan Kabupaten Kota

Analisis Permasalahan Kinerja :

Penyelenggaraan penataan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada T.A. 2019, yang sebelumnya berada pada Dinas Pemukiman Kawasan Perumahan dan PSDA Provinsi Lampung dan Bappeda Provinsi Lampung sehingga SDM yang tersedia belum memadai dan masih terbatas

Solusi Atas Permasalahan :

Perlu adanya support dari pengambil kebijakan dalam hal program pembinaan, pendanaan

Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) tata ruang dengan adanya pelatihan dan bimbingan teknis.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

1. Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Provinsi Lampung Tahun 2019 dilaksanakan oleh *Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung*.

Program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, meliputi:

- a) Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
- b) Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas)

2. Program dan Kegiatan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah melaksanakan **8 Program** dan **43 Kegiatan** pada Tahun 2019, yaitu:

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik
- 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan



- 4) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- 5) Penyediaan alat tulis kantor
- 6) Penyediaan barang cetak dan penggandaan
- 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 8) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 9) Penyediaan peralatan rumah tangga
- 10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 11) Penyediaan makanan dan minuman
- 12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 13) Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran
- 14) Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- 15) Penyediaan jasa publikasi
- 16) Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD
- 17) Penyediaan peralatan dan perlengkapan informasi teknologi

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- 1) Pengadaan Mebeleur
- 2) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 2) Pembinaan Pegawai
- 3) Pendidikan dan Pelatihan PPNS
- 4) Rapat Koordinasi Pol PP

e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

- 1) Penyusunan Renstra
- 2) Penyusunan laporan capaian kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD.



f) Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan :

- 1) Penyuluhan perda bagi masyarakat dan badan usaha
- 2) Penindakan penegakan perda
- 3) Koordinasi dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi PPNS

g) Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat

Kegiatan :

- 1) Pendataan dan Monitoring Kesiapan Anggota Perlindungan Masyarakat Se- Provinsi Lampung
- 2) Bimtek Kesiagaan Linmas Pencegahan dan Penanggulangan
- 3) Pemberdayaan SDM Linmas Kab/Kota
- 4) Peningkatan Peran Pol PP dalam rangka pengawasan penanggulangan kesehatan masyarakat.

h) Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas)

Kegiatan :

- 1) Penegakan Disiplin Tri Budaya GDN Provinsi Lampung
- 2) Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Trantibum
- 3) Pengamanan Unjuk Rasa dan Pengamanan Di Lingkup Pemprov Lampung
- 4) Pengamanan dalam rangka pelaksanaan pemakaman pejabat dan mantan pejabat
- 5) Tertib administrasi pelaksanaan upacara di lingkup Pemprov Lampung
- 6) Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- 7) Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
- 8) Pengendalian keamanan lingkungan
- 9) Pengawasan dan pengamanan pimpinan daerah dan tamu jabatan/VIP, aset-aset daerah Provinsi Lampung

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal/Pencapaian Program dan Kegiatan

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 17 (Tujuh belas kegiatan) kegiatan dengan realisasi fisik 97,29%

Capaian :

- 1) Tertibnya administrasi surat menyurat (100%),
- 2) terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (88%),
- 3) meningkatnya kelancaran tugas bidang adm keuangan (100%),
- 4) Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja (99%)



- 5) Terpenuhinya alat tulis kantor (100%),
- 6) Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan (99%)
- 7) Tersedianya Komponen Instalansi Listrik (97%)
- 8) tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (64%),
- 9) Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (100%)
- 10) Tersedianya bahan bacaan (100%) ,
- 11) terpenuhinya uang makan anggota Satpol PP (96%),
- 12) terpenuhinya undangan rapat ke luar daerah (85%)
- 13) Terbayarnya gaji tenaga kontrak (99%),
- 14) Terpenuhinya undangan rapat di Dalam Daerah (99%)
- 15) Tersedianya sarana Lampung Fair dan Pelaksanaan HUT Pol PP dan Linmas (91%),
- 16) Terlaksananya Laporan Keuangan sesuai dengan Permendagri (99%) ,
- 17) Tersedianya sarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) (100%),

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik 94%.

Capaian :

- 1) Jumlah Mebel yang dibeli (87%)
- 2) Jumlah Unit Gedung Kantor Yang Terpelihara dan Terawat (98%)
- 3) Jumlah sarana mobilitas yang terpelihara (85%)

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik 100 %.

Capaian :

Tersedianya Seragam dan Atributnya bagi Seluruh Anggota Pol PP (99%)

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur terdiri dari 4 (Empat) kegiatan dengan realisasi fisik 86%.

Capaian :

- 1) Menambahnya wawasan anggota di bidang Mental dan Spiritual (93%)
- 2) Bertambahnya Anggota Pol PP menjadi PPNS (67%)
- 3) Tersedianya Info dan Kerjasama Antar Satpol PP (100%)
- 4) Meningkatnya pendidikan formal anggota Pol PP (70%)



e) **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan realisasi fisik 96 %.

Capaian :

- 1) Tersedianya Dokumen Renstra 2020-2024 (100%)
- 2) Jumlah laporan sesuai peraturan yang berlaku (94%).

f) **Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan**

Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari 3 (Tiga) kegiatan dengan realisasi fisik 100 %.

Capaian :

- 1) Jumlah perda yang dikawal (100%);
- 2) Jumlah penindakan pelanggaran perda (97%);
- 3) Terfasilitasinya dan terkoordinasinya antar PPNS Provinsi Lampung (100%).

g) **Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Linmas)**

Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Terdiri dari 4 (empat) Kegiatan dengan realisasi fisik (97%):

Capaian :

- 1) Pendataan dan monitoring Daerah Anggota Linmas Se-Provinsi Lampung (100%)
- 2) Meningkatnya anggota linmas Se-Provinsi Lampung tentang Kesiagaan kelinmasan (98%)
- 3) Peningkatan / Pemberdayaan SDM Linmas Kabupaten/Kota (96%)
- 4) Meminimalisir Penyakit Menular/ Bencana Di Masyarakat (95%)

h) **Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas)**

Program Pemeliharaan Kamtibmas terdiri dari 9 (Sembilan) kegiatan dengan realisasi fisik 97 %.

Capaian :

- 1) Jumlah pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang meningkat disiplinnya (100 %)
- 2) Jumlah Tramtibum di Kabupaten / Kota yang kondusif dan aman (98%).
- 3) Terciptanya Kondisi Kondusif dan aman di Lingkup Pemprov Lampung (71%)
- 4) Terselenggaranya Prosesi Pemakaman Pejabat Pemprov (75%)
- 5) Terselenggaranya Tertib Upacara Baik secara administratif maupun pelaksanaannya Di Lingkup Pemprov Lampung (100%)



- 6) Meningkatnya Kemampuan Anggota Satpol PP Dalam Pengendalian Keamanan Lingkungan (100%)
- 7) Terciptanya Situasi Aman dan Kondusif dalam pelaksanaan ibadah Haji dan Hari Raya serta Hari-Hari Besar Pemprov Lampung (66%)
- 8) Terciptanya Situasi yang aman dan nyaman bagi Kantor- Kantor di Lingkup Pemprov (100%)
- 9) Pengamanan Bagi Pejabat Publik/Tamu Jabatan VIP serta Aset-Aset Daerah (100%)

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (PNS)	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 177	S3 : -	IV/d : -	Ess IV = 15	
	S2 : 7	IV/c : 1	Ess III = 5	108
	S1 : 25	IV/b : 6	Ess II = 1	
	D4 : -	IV/a : 4		
	D3 : 6	III/d : 13		
	D2 : -	III/c : 12		
	D1 : -	III/b : 11		
	SLTA : 136	III/a : 8		
	SLTP : 4	II/d : 5		
	SD : -	II/c : 43		
		II/b : 50		
		II/a : 22		
		I/d : 2		
		I/c : 2		
		I/b : -		
		I/a : -		
		:		

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

APBD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2019, yaitu:

Alokasi Rp 48.165.176.048,00

Realisasi Rp 46.485.052.396,00 (96,51%)

6. Proses Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mekanisme sebagai berikut :

- a) Sosialisasi program tahun berjalan dan rencana program tahun berikutnya ke kabupaten/kota dan instansi terkait;
- b) Rapat koordinasi teknis;



- c) Penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD);
- d) Musrenbang Provinsi;
- e) Fasilitasi dan koordinasi Musrenbang kab/kota dan pusat/nasional;
- f) Penyusunan RKPD;
- g) Penyusunan KUA dan PPAS;
- h) Finalisasi dan Penetapan PPA;
- i) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- j) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		Ket.
		Baik	Kurang Baik	
2	3	4	5	6
Sepeda Motor	3			
Mobil Nissan Druble Cabin	1			
Pick Up Druble Cabin	1			
Pick Up Panther	1			
Truck Dalmas	1			
Lemari Kayu	2			
Meja ½ biro	31			
Kursi Putar	7			
Kursi Lipat Stenlis	65			
Meja Biro / Kerja	23			
Kursi Tamu	3			
Brankas	2			
Filiing Kabinet	10			
Mesin Faksimile	1			
TV	8			
Lemari Dua Pintu	2			
Genset	1			
Vacum Cleaner	1			
Ac	12			
LCD Projector dan Layar	1			
Printer	14			
Komputer	14			
Laptop	6			
Stager	1			
HT	24			
Mesin Rumput	1			
Dispenser	10			
Camera Digital	3			
Kulkas	1			
Mesin Hitung elektronik	2			
Baju PHH	150			
Tongkat kejut	50			
Jas Hujan	100			
Borgol	100			
Lampu Senter Besar	6			
Lampu senter kecil	100			
Tongkat Polri	200			
Rompi	50			
Karpet	1			
Modem	2			
Handycam	1			
Pistol Gas Air Mata	7			
Pistol Peluru Karet	5			
Rig	15			
Link Gunung Reviter	2			
CD Room	2			
Pompa air	1			
Telephone	2			1
Papan Visual Nama	1			
Pintu Detektor	2			
Mirror	1			



8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja belum semua sasaran mencapai target yang ditetapkan, hal ini terutama disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

- a) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Produk Hukum lainnya.
- b) Minimnya sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP dalam menunjang tupoksi Pol PP

Solusi

- a) Memperbanyak jumlah anggota yang memiliki syarat untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penegakan Perda
- b) Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengupayakan penambahan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan Tupoksi Satpol PP.

9. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung

1. Prioritas Urusan Wajib

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Lampung Tahun 2019 dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dalam rangka mencapai misi Provinsi Lampung yang ke-3 yang pelaksanaan kegiatannya diprioritaskan pada program:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d) Program Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- e) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
- f) Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
- g) Program Kedaruratan Dan Logistik
- h) Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi



2. Program dan Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung telah melaksanakan sebanyak **8 Program 34 Kegiatan** pada Tahun 2019, yaitu :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik;
- 2) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- 3) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 4) Penyediaan alat tulis kantor;
- 5) Penyediaan cetak dan penggandaan
- 6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 7) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan;
- 9) Penyediaan makanan dan minuman;
- 10) Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- 11) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran;
- 12) Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
- 13) Pameran dan promosi pembangunan;
- 14) Pengembangan Pengelolaan Keuangan SIPKD

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan:

- 1) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional;
- 2) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor;

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan:

- 1) Laporan pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya kerja;
- 2) Pemetaan formasi jabatan;
- 3) Pelatihan dan pendidikan teknis fungsional.

d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan:

- 1) Penyusunan laporan keuangan;
- 2) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- 3) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD



e) **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan**

Kegiatan:

- 1) Koordinasi PB se Provinsi Lampung;
- 2) Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat terhadap PB.

f) **Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Kegiatan:

- 1) Posko siaga bencana;
- 2) Peningkatan kapasitas pelajar terhadap penanggulangan bencana;
- 3) Pembentukan desa tangguh bencana;
- 4) Penyusunan Kajian Risiko Bencana

g) **Program Kedaruratan dan Logistik**

Kegiatan:

- 1) Pelatihan penataan pergudangan peralatan & logistik PB. Provinsi Lampung;
- 2) Pemantauan dan monitoring penanggulangan bencana di Provinsi Lampung;
- 3) Pelatihan tim reaksi cepat penanggulangan bencana Provinsi Lampung;

h) **Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Kegiatan:

- 1) Pendidikan konseling pasca bencana;
- 2) Identifikasi dan verifikasi pasca bencana;
- 3) Sosialisasi pemulihan fungsi fungsi pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan pasca bencana

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal/Pencapaian Program dan Kegiatan

a) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 97,7 %.

Capaian :

- 1) Terlaksananya pembayaran telpon, speedy, air dan listrik selama 12 bulan;
- 2) Terwujudnya pembayaran honorarium pengurus dan pengelola barang;
- 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- 4) Terlaksananya jasa kebersihan/cleaning service;
- 5) Terpenuhinya alat tulis kantor selama 12 bulan;
- 6) Terlaksananya penyediaan listrik;
- 7) Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor;



- 8) Terlaksananya pembelian surat kabar harian, bulanan dan buku peraturan perundang – undangan;
- 9) Terlaksananya makanan dan minuman rapat dan tamu;
- 10) Terlaksananya perjalanan dinas bagi pejabat struktural dan fungsional serta staf yang terlibat dalam pelaksanaan tugas;
- 11) Terlaksananya pembayaran honorarium jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran;
- 12) Terlaksananya perjalanan dinas bagi pejabat struktural dan fungsional serta staf yang terlibat dalam pelaksanaan tugas;
- 13) Terselenggaranya Pameran Pembangunan dan Pawai Pembangunan Provinsi Lampung;
- 14) Terwujudnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan SIPKD.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri atas 2 (dua) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 98,14 %.

Capaian :

- 1) Terpeliharanya rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional kantor;
- 2) Terpeliharanya rutin/berkala peralatan gedung kantor.

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri atas 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 53,7 %.

Capaian :

- 1) Terlaksananya laporan pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya kerja;
- 2) Terlaksananya pemetaan formasi jabatan;
- 3) Terlaksananya pelatihan dan pendidikan teknis fungsional.

d) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan, terdiri atas 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 99,6%.

Capaian :

- 1) Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD;
- 2) Terlaksananya penyusunan program dan laporan capaian kinerja;
- 3) Terlaksananya penyusunan renja dan RKA SKPD.

e) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, terdiri atas 2 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 98,2%.



Capaian :

- 1) Terlaksananya koordinasi PB se Prov. Lampung



- 2) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan aparat terhadap Penanggulangan Bencana.



f) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas 4 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 99,3%.

Capaian:

- 1) Tersedianya dan Teroperasionalsasinya posko siaga bencana 1 x 24 Jam



- 2) Meningkatnya kapasitas pelajar terhadap Penanggulangan Bencana



- 3) Tercapainya masyarakat dan aparatur desa yang terampil, tanggap dan sigap dalam menghadapi ancaman bencana;



- 4) Terlaksananya penyusunan dokumen Kajian Resiko Bencana Provinsi Lampung;



g) Program Kedaruratan dan Logistik

Program Kedaruratan dan Logistik terdiri atas 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 98,5%.

Capaian :

- 1) Meningkatnya kapasitas aparatur dalam penataan gudang, peralatan dan logistik Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung



- 2) Termonitornya penanggulangan bencana secara efektif dan efisien di Provinsi Lampung



- 3) Terwujudnya tenaga TRC yang siap & terampil dalam menghadapi bencana



h) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas 2 kegiatan dengan realisasi fisik 93,9%.

Capaian :

- 1) Meningkatnya pengetahuan aparaturnya dan masyarakat tentang traumatik pasca bencana;



- 2) Terlaksananya verifikasi kerusakan infrastruktur pasca bencana;





4. Jumlah Pegawai Kualifikasi, Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/ GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
PNS : 51 orang	S2 : 10	IV d : 1	Ess II : 1	
PTHL : 12 orang	S1 : 18	IV b : 4	Ess III : 4	
	D3 : 3	IV a : 8	Ess IV : 9	
	SLTA : 18	III d : 8		
	SD : 2	III c : 4		
		III b : 5		
		III a : 5		
		II d : 2		
		II c : 12		
		II b : 0		
		II a : 1		
		I c : 1		

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URUSAN WAJIB/ Pilihan	Alokasi Belanja Tidak Langsung/ gaji (Rp.Juta)	Alokasi Belanja Langsung (Rp.Juta)			Total Belanja (Rp.Juta)	Realisasi Belanja (Rp.Juta)	%
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal			
1		5.299.761.811	671.770.000	3.058.034.500	55.400.500	3.785.205.000	3.541.901.724	93,6%

6. Proses Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mekanisme sebagai berikut :

- a) Sosialisasi program tahun berjalan dan rencana program tahun berikutnya ke kabupaten/kota dan instansi terkait;
- b) Rapat koordinasi teknis;
- c) Penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD);
- d) Musrenbang Provinsi;
- e) Fasilitasi dan koordinasi Musrenbang kab/kota dan pusat/nasional;
- f) Penyusunan RKPD;
- g) Penyusunan KUA dan PPAS;



- h) Finalisasi dan Penetapan PPA;
- i) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- j) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

NO	SARANA & PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	KURANG
1.	Mobil Ambulance	1	1	-
2.	Mobil Rescue	1	1	-
3.	Mobil Water Treatment	1	1	-
4.	Mobil Rescue Double Cabin	1	1	-
5.	Mobil Dapur Lapangan	1	1	-
6.	Mobil Truck Serba Guna	1	1	-
7.	Mobil Tangki Air	1	1	-
8.	Mobil MCK	1	1	-
9.	Mobil Tangki Air 2012	1	1	-
10.	Mobil MCK 2012	1	1	-
11.	Mobil Komunikasi Satelit	1	1	-
12.	Sepeda Motor Trail Rescue	6	6	-
13.	Mobil Logpal Isuzu Panther	1	1	-
14.	Mobil Rescue B 9221PSD	1	1	-
15.	Perahu Amphibi	1	1	-
16.	Speed Boat	1	1	-
17.	Perahu Karet Kapasitas 8 org	3	3	-
18.	Perahu Karet Kapasitas 10 org	1	1	-
19.	Perahu Karet Kapasitas 6 org	1	1	-
20.	Mesin Perahu 15 PK	2	2	-
21.	Mesin Perahu 25 PK	5	5	-
22.	Mesin Perahu 40 PK	2	2	-
23.	Tenda Posko	1	1	-
24.	Tenda Pleton	3	3	-
25.	Tenda Keluarga	17	17	-
26.	Tenda Gulung Plastik	200	200	-
27.	Tenda Pengungsi	5	5	-
28.	Daun Tenda Keluarga	17	17	-
29.	Tenda Tiup	1	1	-
30.	Tenda WC Darurat	58	58	-
31.	Closet WC Darurat	58	58	-
32.	Leher Angsa	58	58	-
33.	Mesin Pompa Air	1	1	-
34.	Genset	6	6	-
35.	Kompresor	1	1	-
36.	Gergaji Mesin	2	2	-
37.	Light Tower Portable	1	1	-
38.	Solar Handle Lamp	13	13	-
39.	Handy Talkie	35	35	-
40.	SSB	1	1	-
41.	RIG	1	1	-
42.	Pompa Air	3	3	-
43.	Alat Selam Selam	5	5	5
44.	Alat Refling	1	1	-
45.	Pakaian Tahan Api	3	3	-
46.	Ring Buoy	60	50	10
47.	Life Jacket	50	50	-
48.	Velbet	93	93	-
49.	Baju Selam	5	5	-
50.	Helm Damkar	2	2	-
51.	Lampu Senter HD	2	2	-
52.	Fleksibel Tank 1000 Liter	1	1	-
53.	Fleksibel Tank 2000 Liter	1	1	-
54.	Water Treatment Portable	3	3	-
55.	Water Treatment Portable Mini	13	13	-
56.	Peralatan Water Treatment	1	1	-
57.	Sandang	300	300	-
58.	Kids Ware	100	100	-
59.	Selimut	175	175	-
60.	Kelambu	20	20	-
61.	Lauk Pauk	300	300	-
62.	Makanan Tambahan Gizi	200	200	-
63.	Masker	2000	2000	-
64.	Matras	40	40	-



NO	SARANA & PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	KURANG
65	Kantong Mayat	100	100	-
66	Laptop	1	1	-
67	Printer Portable	1	1	-
68	Camera Digital	1	1	-
69	Handycam	1	1	-
70	GPS	1	1	-
71	Handy Talkie	1	1	-
72	Modem Internet Eksternal	1	1	-
73	Projector	1	1	-
74	Telpon Satelit	1	1	-
75	Hardisk	1	1	-
76	Desktop PC	1	1	-
77	Printer Multifungsi	1	1	-
78	SSB	1	1	-
79	UPS	1	1	-
80	Alat Selam	5	-	5
81	Ransel	1	1	-
82	Botol Minum	1	1	-
83	Kopel	1	1	-
84	Lampu Emergency	1	1	-
85	Sepatu Boat	1	1	-
86	Sarung tangan	1	1	-
87	Helm	1	1	-
88	Jas Hujan	1	1	-
89	Tali Rafling	1	1	-

8. Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- 1) Minimnya SDM tenaga teknis yang membidangi pasca bencana;
- 2) Tidak adanya tenaga fungsional yang menangani Penanggulangan Bencana.

b) Solusi

- 1) Mengusulkan kepada Pimpinan untuk dapat menambah tenaga teknis yang membidangi pasca bencana;
- 2) Mengusulkan kepada Pimpinan untuk dapat mengangkat tenaga fungsional yang menangani penanggulangan bencana.

9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

a) Ringkasan Desentralisasi

NO	URUSAN WAJIB/ Pilihan	Alokasi Belanja Tidak Langsung/ gaji (Rp.Juta)	Alokasi Belanja Langsung (Rp.Juta)			Total Belanja (Rp.Juta)	Realisasi Belanja (Rp.Juta)	%
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal			
1		5.299.761.811	671.770.000	3.058.034.500	55.400.500	3.785.205.000	3.541.901.724	93,6%

b) Program Kerja Yang Berkesinambungan

NO	PROG/ KEG	KESESUAIAN MISI PROV. LAMPUNG	HASIL CAPAIAN KINERJA					KET.	
			2014	2015	2016	2017	2019		2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Posko Siaga Bencana	Misi 2 : Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi & pelayanan sosial	99,39	99,87	79,91	99,98	99,90	99,98	



f. Sosial

Dinas Sosial Provinsi Lampung

1. Prioritas Urusan Wajib

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial di Provinsi Lampung Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh *Dinas Sosial Provinsi Lampung*.

Program prioritas Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2019, meliputi:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- e) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
- f) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- g) Program Pembinaan Anak Terlantar
- h) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- i) Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
- j) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
- k) Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- l) Program Keluarga Harapan

2. Program dan Kegiatan

Dinas Sosial Provinsi Lampung telah melaksanakan **12 Program** dan **38 Kegiatan** pada Tahun 2019, yaitu:

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 2) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
- 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- 5) Penyediaan alat tulis kantor;
- 6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 7) Penyediaan peralatan rumah tangga;
- 8) Penyediaan bahan logistik kantor;



- 9) Penyediaan makanan dan minuman rapat;
- 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- 11) Penyediaan jasa pendukung/administrasi/Teknis perkantoran;
- 12) Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD;
- 13) Pemeliharaan Taman Kantor;
- 14) Penata usahaan aset daerah.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- 1) Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor;
- 2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pegawai/Aparatur

d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi dan kinerja SKPD;
- 2) Penyusunan KUA PPAS dan Program/Kegiatan;
- 3) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
- 4) Penyusunan pelaporan dan pembinaan keuangan.

e) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Kegiatan:

Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin Perkotaan;

f) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan :

- 1) Perlindungan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah
- 2) Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada UPTD Insan Berguna;
- 3) Perlindungan sosial Korban Bencana Sosial.



g) Program Pembinaan Anak Terlantar

Kegiatan :

- 1) Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak putus sekolah terlantar pada PSBR Raden Intan;
- 2) Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar pada PSAA Harapan Bangsa;
- 3) Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar pada PSAA Budi Asih;
- 4) Pelayanan dan perlindungan sosial anak.

h) Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma

Kegiatan :

- 1) Asistensi dan perlindungan sosial disabilitas.
- 2) Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas pada UPTD PRSPD;

i) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Kegiatan :

Peningkatan Pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia terlantar pada PSLU Tresna Werdha Lampung.

j) Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)

Kegiatan :

Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada gepeng pada PRSTS Mardi Guna;

k) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan :

- 1) KSN EXPO dan pameran pembangunan (Lampung Fair)
- 2) Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Dan Kesetiakawanan Sosial;
- 3) Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional
- 4) Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial

l) Program Keluarga Harapan

Kegiatan :

Penanggulangan kemiskinan (pelaporan dan tindak lanjut program).



3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal/Pencapaian Program dan Kegiatan

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan. Realisasi 2019 sebesar 100%.

Capaian :

- 1) Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 2) Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
- 3) Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
- 4) Tersedianya jasa administrasi keuangan;
- 5) Tersedianya alat tulis kantor;
- 6) Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 7) Tersedianya peralatan rumah tangga;
- 8) Tersedianya bahan logistik kantor;
- 9) Tersedianya makanan dan minuman;
- 10) Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- 11) Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran;
- 12) Terlaksananya Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD;
- 13) Terlaksananya pemeliharaan taman kantor;
- 14) Terlaksananya Penata usahaan aset daerah.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 2 (dua) kegiatan. Realisasi 2019 sebesar 100%.

Capaian :

- 1) Terpeliharanya gedung kantor;
- 2) Terpeliharanya perawatan kendaraan dinas.

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri atas 1 (satu) kegiatan. Realisasi 2019 sebesar 80%.

Capaian :

Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya pegawai/aparatur.

d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan. Realisasi 2019 sebesar 100 %.

**Capaian :**

- 1) Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD yang tepat waktu dan sasaran;
- 2) Terselenggaranya penyusunan KUA PPAS dan program/kegiatan penyelenggaraan kesos;
- 3) Termonitoringnya program dan kegiatan penyelenggaraan kesos;
- 4) Tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu dan sasaran.

e) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, terdiri dari 1 (satu) kegiatan. Realisasi 2019 sebesar 100 %.

Capaian:

Tercapainya Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin Perkotaan;

f) Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan. Realisasi 2019 sebesar 100%.

Capaian :

- 1) Terlaksananya Perlindungan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
- 2) Tercapainya Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak yang berhadapan dengan hukum pada UPTD Insan Berguna sebanyak 15 anak;
- 3) Terlaksananya perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.

g) Program Pembinaan Anak Terlantar

Program Pembinaan Anak Terlantar, terdiri dari 4 (empat) kegiatan. Realisasi 2019 sebesar 100%.

Capaian:

- 1) Meningkatnya keterampilan sosial dan keterampilan kerja anak putus sekolah terlantar di PSBR Raden Intan dengan jumlah anak sebanyak 40 orang;
- 2) Terbinanya dan terlindunginya anak yatim piatu terlantar di PSAA Harapan Bangsa dengan jumlah anak sebanyak 50 orang;
- 3) Terbina dan terlindunginya anak yatim piatu terlantar di PSAA Budi Asih dengan jumlah anak sebanyak 50 orang;
- 4) Terlaksananya pelayanan dan perlindungan sosial anak.



h) Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma

Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma, terdiri dari 2 (dua) kegiatan. Realisasi 2019 sebesar 100%.

Capaian :

- 1) Terlaksananya asistensi dan perlindungan sosial disabilitas
- 2) Meningkatnya pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas pada UPTD PRSPD dengan jumlah penyandang disabilitas sebanyak 50 orang;

i) Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, terdiri dari 1 (satu) kegiatan. Realisasi 2019 sebesar 100%.

Capaian :

Terpenuhinya kebutuhan fisik dan mental lansia di PSLU Tresna Werdha dengan jumlah lansia/jompo sebanyak 85 orang;

j) Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)

Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya), terdiri dari 1 (satu) kegiatan. Realisasi 2019 sebesar 100%.

Capaian :

Terpenuhinya kebutuhan fisik dan mental Tuna Sosial di PRSTS Mardi Guna dengan jumlah kelayan sebanyak 25 orang.

k) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial lainnya), terdiri dari 4 (empat) kegiatan. Realisasi 2019 sebesar 100%.

Capaian :

- 1) Terlaksananya KSN EXPO dan pameran pembangunan (Lampung Fair)
- 2) Tercapainya Penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial;
- 3) Terlaksananya Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional
- 4) Meningkatnya jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial;

l) Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan. Realisasi 2019 sebesar 100%.

Capaian :

Meningkatnya efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan.



4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT GOLONGAN	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
DINAS SOSIAL				
PNS : 183	S3 : 53	0 IV d : 1	Eselon II : 1	Fungsional Peksos : 9
L : 95	S2 : 33	33 IV c : 1	Eselon III : 11	UFU : 125
P : 88	S1 : 52	52 IV b : 10	Eselon IV : 35	
	D4 : 9	9 IV a : 23		
PTHL : 26	D3 : 4	4 III d : 47		
L : 12	D2 : 0	0 III c : 18		
P : 14	D1 : 0	0 III b : 41		
	SLTA : 6	6 III a : 5		
	SLTP : 11	11 II d : 6		
	SD : 6	6 II c : 8		
		II b : 8		
		II a : 9		
		I d : 1		
		I c : 2		
		I b : 0		
		I a : 0		
JUMLAH DINSOS	181	181	47	134

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

- a. Alokasi anggaran APBD Dinas Sosial Provinsi Lampung TA 2019 adalah:

Alokasi	: Rp. 28.568.682.940,-
Terdiri atas :	Belanja Tidak Langsung : Rp. 18.490.031.490,-
	Belanja Langsung : Rp. 10.078.651.450,-

- b. Realisasi Anggaran APBD Dinas Sosial Provinsi Lampung T A 2019 adalah:

Realisasi	: Rp. 27.992.624.827,- (97,98%)
Terdiri atas :	Belanja Tidak Langsung : Rp. 18.240.922.341,-
	Belanja Langsung : Rp. 9.751.702.486,-

6. Proses Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mekanisme sebagai berikut :

- a) Sosialisasi program tahun berjalan dan rencana program tahun berikutnya ke kabupaten/kota dan instansi terkait;



- b) Rapat koordinasi teknis;
- c) Penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD);
- d) Musrenbang Provinsi;
- e) Fasilitasi dan koordinasi Musrenbang kab/kota dan pusat/nasional;
- f) Penyusunan RKPD;
- g) Penyusunan KUA dan PPAS;
- h) Finalisasi dan Penetapan PPA;
- i) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- j) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI		KETERANGAN
			BAIK	KURANG BAIK	
1	2	3	4	5	6
1	Gedung kantor				
	a. kantor dinas	3	3	-	Baik
	b. rumah dinas	25	25	-	Baik
	c. gudang	2	2	-	Baik
2	Kendaraan				
	a. roda 4	21	17	-	Baik
	b. roda 2	10	6	-	Baik
3	Peralatan kantor				
	a. meja	407	367	-	Baik
	b. kursi	504	476	-	Baik
	c. Lemari	57	42	-	Baik
	d. filing cabinet	86	72	-	Baik
	e. mesin tik	32	15	-	Baik
	f. computer/PC	88	77	-	Baik
	g. Rak kayu	32	17	-	Baik
	h. kursi rapat	154	121	-	Baik
	i. Printer	49	36	-	Baik
	j. mesin potong rumput	1	1	-	Baik
	k. Faximilie	1	1	-	Baik
	l. Jam dinding	45	45	-	Baik
	m. Kamera	2	2	-	Baik
	n. Brangkas	4	4	-	Baik
	o. Air Conditioner	35	31	-	Baik
	p. Layar proyektor	1	1	-	Baik
	q. CCTV	4	4	-	Baik

8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- a) Data PMKS dan PSKS di kab/kota belum dapat disajikan secara detail *by name by adres* dan tersistemisasi.



- b) Tidak sinkronnya data yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya dengan data riil tahun ini. Kondisi ini disebabkan oleh diberlakukannya kebijakan bahwa **Basis Data Terpadu (BDT)** Kementerian Sosial sebagai satu-satunya sumber data kesejahteraan sosial.

Solusi

Upaya koordinasi, asistensi, tahapan untuk perencanaan sudah dilakukan baik untuk aparatur maupun masyarakat sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial, tetapi pengalokasian dana program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial belum signifikan baik dari pemerintah, dunia usaha dan pelaku-pelaku pembangunan kesejahteraan sosial. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta menghadapi tantangan dan perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk, sudah tertuang dalam UU dan peraturan pemerintah yang saat ini memasuki tahap proses penyempurnaan dan pengesahan, sehubungan dengan hal tersebut sangat urgen untuk dipersiapkan peraturan daerah yang merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari UU dan peraturan pemerintah tentang pembangunan kesejahteraan sosial.

9. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

- a) Program Kerja Berkesinambungan

NO	Program/Kegiatan	Kesesuaian Misi Provinsi Lampung	Hasil Capaian Kinerja				
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Peningkatan Pembinaan Pelayanan Kesos Kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada UPTD Insan Berguna	Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas			Target : 15 orang Realisasi : 15 orang	Target : 15 orang Realisasi : 15 orang	Target : 15 orang Realisasi : 15 orang
2.	Program Pembinaan Anak Terlantar						
	a. Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada anak putus sekolah terlantar pada PSBR Raden Intan		Target : 70 orang Realisasi : 70 orang	Target : 70 orang Realisasi : 70 orang	Target : 40 orang Realisasi : 40 orang	Target : 50orang Realisasi : 50 orang	Target : 40 orang Realisasi : 40 orang
	b. Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar pada PSAA Harapan Bangsa		Target : 60 orang Realisasi : 60 orang	Target : 60 orang Realisasi : 60 orang	Target : 50 orang Realisasi : 50 orang	Target : 50 orang Realisasi : 50 orang	Target : 50 orang Realisasi : 50 orang
	c. Peningkatan pembinaan dan						



NO	Program/Kegiatan	Kesesuaian Misi Provinsi Lampung	Hasil Capaian Kinerja				
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
3.	<p>pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar pada PSAA Budi Asih</p> <p>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</p> <p>Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang cacat netra pada PSRPD</p>		<p>Target : 86 orang</p> <p>Realisasi : 86 orang</p>	<p>Target : 86 orang</p> <p>Realisasi : 86 orang</p>	<p>Target : 50 orang</p> <p>Realisasi : 50 orang</p>	<p>Target : 50 orang</p> <p>Realisasi : 50 orang</p>	<p>Target : 50 orang</p> <p>Realisasi : 50 orang</p>
	<p>Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo</p> <p>Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia terlantar pada PSLU Tresna Werdha</p>		<p>Target : 50 orang</p> <p>Realisasi : 50 orang</p>	<p>Target : 50 orang</p> <p>Realisasi : 50 orang</p>	<p>Target : 50 orang</p> <p>Realisasi : 50 orang</p>	<p>Target : 50 orang</p> <p>Realisasi : 50 orang</p>	<p>Target : 50 orang</p> <p>Realisasi : 50 orang</p>
5.	<p>Program Pembinaan Ex. Penyandang Penyakit Sosial (ex narapidana, PSK dan penyakit sosial lainnya)</p> <p>Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis pada PRSTS Mardi Guna</p>		<p>Target : 100 orang</p> <p>Realisasi : 100 orang</p>	<p>Target : 100 orang</p> <p>Realisasi : 100 orang</p>	<p>Target : 80 orang</p> <p>Realisasi : 80 orang</p>	<p>Target : 85 orang</p> <p>Realisasi : 85 orang</p>	<p>Target : 85 orang</p> <p>Realisasi : 85 orang</p>
			<p>Target : 85 orang</p> <p>Realisasi : 85 orang</p>	<p>Target : 80 orang</p> <p>Realisasi : 80 orang</p>	<p>Target : 25 orang</p> <p>Realisasi : 25 orang</p>	<p>Target : 25 orang</p> <p>Realisasi : 25 orang</p>	<p>Target : 25 orang</p> <p>Realisasi : 25 orang</p>

b) Program Unggulan

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
1	Gerakan <i>Ayo Kuliah</i> bagi Anak KPM PKH
2	Tagana Masuk Sekolah (TMS)
3	Mendorong penggunaan Aplikasi <i>e-kasir (e-barcode)</i> pada e-Warong
4	<i>Sistem Penjualan Konsinyasi</i> pada KUBE (Kelompok Usaha Bersama)



c) Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Provinsi Lampung

No	JENIS PSKS	BANDAR LAMPUNG	METRO	LAMPUNG SELATAN	LAMPUNG LINGGAEH	LAMPUNG TIMUR	LAMPUNG BARAT	TANGGAMUS	TULANG BAWANG	WAY KANAY	LAMPUNG UTARA	PESAWARAN	PRINGSEWU	MESUJI	PESISIR BARAT	TUBA BARAT	JUMLAH
1	Pekerja Sosial Profesional	17	4	-	-	-	-	-	-	119	-	-	-	-	46	-	188
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	206	1	19	636	2	2	5	4	227	269	165	13	14	118	19	1.001
3	Tanah Sbagi Benteng (TANAM)	51	10	40	51	41	34	52	18	39	20	30	13	9	15	8	426
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial	60	3	7	56	-	1	1	1	20	17	24	-	1	8	6	112
5	Karang Taruna	46	72	70	85	10	20	5	10	14	247	144	13	10	57	10	708
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	-	1	2	8	1	1	2	1	1	-	1	1	1	1	1	23
7	Keluarga Pionir	23	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	54	-	112
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Berkeadilan Masyarakat Warita Pemimpin	3	-	15	355	7	4	-	-	-	-	-	2	-	15	-	408
9	Kesejahteraan Sosial (WKS)	161	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	2	-	67	-	258
10	Penyakit Sosial	45	-	5	-	-	5	2	2	1	-	1	5	5	12	-	83
11	Tanaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)	70	5	17	28	34	15	20	15	14	23	-	4	2	11	8	214
12	Dunia usaha yang melibatkan usaha kesejahteraan sosial	11	-	-	141	-	10	7	-	14	-	-	24	-	411	5	677
		673	46	125	1.412	80	137	99	51	445	576	374	73	47	824	57	

d) Data PMKS Provinsi Lampung

No	JENIS PMKS	Bandar Lampung	METRO	LAMPUNG SELATAN	LAMPUNG TENGGAH	LAMPUNG TIMUR	LAMPUNG UTARA	LAMPUNG BARAT	TANGGAMUS	TULANG BAWANG	WAY KANAY	Pesawaran	Pringsu	MESUJI	PESISIR BARAT	TUBA BARAT	JUMLAH RIBU	JUMLAH KK	
1	Anak Balita Rentan (ABR)	221	17	368	45	570	38	38	38	601	170	496	622	368	399	25	1.806	Ribu	
2	Anak Rentan (AR)	1.307	106	4.065	395	1.147	1.165	208	1.165	2.007	185	1	25	542	367	103	11.431	Ribu	
3	Anak Yang Berkebutuhan Dengan Khusus	-	43	25	28	624	149	18	149	6	39	1	5	18	58	1	1.343	Ribu	
4	Anak Jalanan	1	-	350	19	72	28	-	28	21	11	-	138	-	8	-	669	Ribu	
5	Anak Dengan Kebutuhan LK3	162	99	37	387	282	431	99	431	301	285	76	-	304	92	4	1.880	Ribu	
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan/ Dipertukarkan Sabah	2	7	97	-	222	12	1	12	15	7	-	5	-	47	-	432	Ribu	
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1	1	-	17	-	-	-	-	11	6	-	4.904	11	38	27	5.084	Ribu	
8	Korban Ura Berdarah	1.604	1.724	11.623	2	-	1.124	675	1.124	2.117	7.144	5	1.514	1.625	683	683	31.805	Ribu	
9	Korban Yang Disabilitas	767	102	1.869	875	-	736	396	736	417	2.434	1	1.178	512	312	461	11.088	Ribu	
10	Tuna Sosial	33	-	137	-	-	18	-	18	26	7	9	-	-	18	58	318	Ribu	
11	Kelambatan	2	3	26	1	-	18	-	18	-	10	3	-	6	26	152	249	Ribu	
12	Prognosis	5	-	83	1	32	16	-	16	67	17	1	-	1	7	-	247	Ribu	
13	Penyalah	245	48	-	58	293	-	18	-	100	120	26	-	21	58	18	949	Ribu	
14	Kelompok Minoritas	33	-	-	46	-	-	-	-	-	13	-	120	148	4	-	365	Ribu	
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (WBP)	18	29	140	27	-	41	12	41	38	55	55	-	18	68	3	545	Ribu	
16	Anak Dengan HIV/AIDS (ANAM)	2	26	41	1	-	53	1	53	-	-	-	25	-	8	-	202	Ribu	
17	Korban Penyusutan BPJS	41	10	21	5	286	46	4	46	83	27	4	1	6	7	-	588	Ribu	
18	Korban Traficking	-	-	-	-	-	2	-	2	-	5	4	1	-	14	-	28	Ribu	
19	Korban Tidak Berkecukupan	1	27	-	18	-	110	1	110	29	7	-	48	2	52	38	432	Ribu	
20	Pelajar migran (Pemasabah Sosial/PPMS)	-	21	27	77	-	1	1	1	-	1	86	1.101	-	-	-	1.321	Ribu	
21	Korban Bencana Alam	12	20	578	-	1.085	443	18	443	25	18	786	7	22	38	2	2.456	Ribu	
22	Korban Bencana Sosial	1	-	1.813	-	1.085	11	3	11	-	33	11	1.812	2	66	-	5.128	Ribu	
23	Penerimaan rumah sosial-ekonomi	418	421	18.378	158	2.232	1.568	471	612	459	944	1	21.417	824	337	46	48.284	Ribu	
24	Wajar Hidup	48.711	4.212	118.182	131	63.026	61.743	8.637	61.743	35.596	54.331	52.625	38.193	78.846	12.694	22.379	-	662.253	KK
25	Ky masalah sosial-pelaksana	34	41	218	47	141	78	2	-	11	46	-	-	28	4.022	-	-	4.881	KK
26	Kontribusi adat tradisional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KK
	Jumlah	4.798	2.925	31.708	1.868	8.080	5.996	1.944	5.948	6.733	11.563	1.486	35.308	4.893	1.508	1.639	128.693	Ribu	
		49.745	4.151	119.398	178	63.187	61.813	8.639	48.530	35.611	54.377	52.625	38.193	78.296	16.716	22.379	-	653.921	KK



BAB III

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

A. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD)

1. Catatan Hasil Validasi EKPPD Timda dan Evaluasi Terhadap LPPD Provinsi Lampung Tahun 2018

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120.04/2345/SJ tanggal 8 Mei 2019 perihal Pedoman Pelaksanaan EKPPD Tahun 2019 terhadap LPPD Tahun 2018. Untuk pelaksanaannya berdasarkan Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor T.120.04/3756/OTDA tanggal 15 Juli 2019 tentang Pelaksanaan Validasi terhadap hasil EKPPD Kabupaten/Kota oleh Timda dan Evaluasi LPPD Provinsi, terdapat beberapa catatan hasil evaluasi terhadap LPPD Provinsi Lampung Tahun 2018 oleh Tim Validasi dan Evaluasi (Sekretariat Tim Teknis Nasional EPPD) sebagai berikut:

- a. Evaluasi meliputi kesesuaian materi yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 dan tingkat capaian kinerja baik pada Tataran Pengambil Kebijakan, Tataran Pelaksana Kebijakan, maupun Urusan Pemerintahan;
- b. Hasil validasi EKPPD Timda dan Evaluasi terhadap LPPD Provinsi Lampung Tahun 2018 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan EKPPD, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Terhadap validasi hasil EKPPD Timda (template individu dan gabungan kabupaten/kota), sebagai berikut:
 - a) Tim Validasi dan Evaluasi telah melaksanakan validasi terhadap hasil EKPPD Kabupaten/Kota oleh Timda dari tanggal 7 s.d 9 Oktober 2019, yang dilaksanakan oleh Tim Daerah sebanyak 13 Kabupaten dan 2 Kota di wilayah Provinsi Lampung;



- b) Selanjutnya secara bersama-sama dilakukan penggabungan untuk mendapatkan peringkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan untuk mendapatkan kinerja provinsi yang diperoleh melalui agregasi;
- 2) Hasil evaluasi terhadap LPPD Provinsi Lampung Tahun 2018, sebagai berikut:
- a) Pengambil Kebijakan
 - Elemen data yang disajikan dalam LPPD telah didukung rincian data yang memadai sebanyak 39 IKK dan tidak didukung rincian data yang memadai/tidak ada informasi (TDI) sebanyak 0 IKK;
 - Terdapat 5 IKK (12,5%) yang capaian kinerjanya berbeda antara data yang disajikan dalam LPPD dengan hasil evaluasi.
 - b) Pelaksana Kebijakan (OPD yang melaksanakan urusan wajib dan pilihan);
 - Elemen data yang disajikan dalam LPPD telah didukung rincian data yang memadai sebanyak 714 IKK dan tidak didukung rincian data yang memadai/tidak ada informasi (TDI) sebanyak 0 IKK
 - Terdapat 141 IKK (20,98%) yang capaian kinerjanya berbeda antara data yang disajikan dalam LPPD dengan hasil evaluasi
 - c) Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
 - Elemen data yang disajikan dalam LPPD telah didukung rincian data yang memadai sebanyak 78 IKK dan tidak didukung rincian data yang memadai/tidak ada informasi (TDI) sebanyak 0 IKK
 - Terdapat 17 IKK (20,73%) yang capaian kinerjanya berbeda antara data yang disajikan dalam LPPD dengan hasil evaluasi
 - Terdapat 35 IKK data capaian kinerja provinsi yang ditentukan oleh agregasi data capaian kinerja kabupaten/kota berbeda dengan yang disajikan dalam LPPD
- c. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami mengharapkan Gubernur untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai berikut:
- 1) Dalam penyusunan LPPD yang akan datang, agar terus dilengkapi dengan data pendukung yang memadai sebagaimana telah ditetapkan dalam Manual Tata Cara EKPPD terhadap LPPD. Dokumen rincian dan data pendukung tersebut agar disimpan atau diarsipkan di Biro Pemerintahan dan Daerah
 - 2) Untuk mendukung validitas data yang disajikan dalam LPPD pada tahun yang akan datang, perlu dilakukan self assesment (evaluasi kinerja mandiri) sebelum Provinsi/Kabupaten/Kota difinalkan



- 3) Hasil pemeringkatan kiranya bukan tujuan utama, namun sebaiknya lebih menekankan kepada peningkatan kinerja pada seluruh OPD dengan menjaga validitas data yang memadai karena proses yang benar akan menentukan hasil yang baik
- 4) Terhadap urusan wajib dan pilihan yang ditentukan berdasarkan hasil agregasi kinerja kabupaten/kota agar terus ditingkatkan koordinasi antara dinas teknis tingkat provinsi dengan kabupaten/kota
- 5) Pemerintah provinsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, diharapkan lebih meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (terhadap capaian kinerja yang sangat rendah) untuk pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

2. Review EKPPD Tim Daerah Provinsi Lampung Terhadap LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2018

Dalam rangka pelaksanaan EKPPD Tahun 2019 terhadap LPPD Tahun 2018, berdasarkan Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor: T.120.04/3756/OTDA tanggal 15 Juli 2019 tentang Pelaksanaan Validasi terhadap Hasil EKPPD Kabupaten/Kota oleh Timda dan Evaluasi LPPD Provinsi, terdapat beberapa review atas hasil EKPPD Tim Daerah Provinsi Lampung terhadap LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

- a. Tim Daerah Provinsi Lampung telah melaksanakan EKPPD terhadap LPPD Tahun 2018 di seluruh kabupaten/kota wilayah Provinsi Lampung, dengan rincian sebagai berikut:

1	Lampung Barat	9	Way Kanan
2	Lampung Selatan	10	Tulang Bawang Barat
3	Lampung Tengah	11	Mesuji
4	Lampung Timur	12	Pringsewu
5	Lampung Utara	13	Pesisir Barat
6	Pesawaran	14	Bandar Lampung
7	Tanggamus	15	Metro
8	Tulang Bawang		
- b. Terdapat capaian kinerja IKK yang Tidak Diperoleh Informasi (TDI) pada Kabupaten/Kota yang perlu diklarifikasi
- c. Terdapat capaian kinerja IKK yang Tidak Wajar (extreme) pada kabupaten/kota yang perlu diklarifikasi
- d. Terdapat capaian kinerja IKK yang “value” dalam template (kesalahan teknis penginputan/sistem), perlu diperbaiki dan di cek kembali sehingga tidak mengganggu proses penggabungan pemeringkatan sementara



- e. Terdapat capaian kinerja IKK yang “salah tolong cek” dalam template (kemungkinan salah penginputan elemen data/lebih besar pembilang daripada penyebut), perlu diperbaiki dan dicek kembali
- f. Terdapat capaian kinerja IKK sebagaimana dimaksud huruf b, c, d dan e, diharapkan kepada Tim Daerah Provinsi untuk dapat mengklarifikasi disertai dengan dokumen/data pendukung IKK, dan dapat menghadirkan Tim Penyusun LPPD Kabupaten/Kota yang terkait (jika perlu)
- g. Diharapkan kepada Tim Daerah (evaluator kabupaten/kota) menggunakan template individu sesuai dengan kesepakatan Bimtek Timda di Jakarta
- h. Adapun pemeringkatan sementara 15 kabupaten/kota, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Kabupaten/Kota	Skor	Prestasi
1	KOTA METRO	3,3481	ST
2	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	3,3173	ST
3	KABUPATEN WAY KANAN	3,2471	ST
4	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	3,1820	ST
5	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	3,1810	ST
6	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	3,1659	ST
7	KABUPATEN PRINGSEWU	3,1162	ST
8	KOTA BANDAR LAMPUNG	3,0940	ST
9	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	3,0407	ST
10	KABUPATEN MESUJI	2,8962	T
11	KABUPATEN TULANG BAWANG	2,8798	T
12	KABUPATEN PESISIR BARAT	2,8575	T
13	KABUPATEN PESAWARAN	2,8003	T
14	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	2,7450	T
15	KABUPATEN TANGGAMUS	2,6964	T



B. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Lampung bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

3. Tanggung Jawab BPK

Tanggungjawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Lampung. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh



Pemerintah Provinsi Lampung, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

4. Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

5. Laporan Hasil Pemeriksaan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 30B/LHP/XVIII.BLP/05/2019 dan Nomor 30C/LHP/XVIII.BLP/05/2019 tanggal 24 Mei 2019.



BAB V

INOVASI DAERAH

DATA INOVASI DARI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG SAMPAI DENGAN TAHUN 2018

NO	NAMA OPD	INOVASI YANG DILAKUKAN	SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
1.	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan kredit Daerah Provinsi Lampung. Rencana Pengembangan PT BUMRA (Badan Usaha Milik Rakyat) Padi di Kabupaten Lampung Selatan.	Sudah dikukuhkan pada Tahun 2015. Sudah dilakukan MOU dengan Tanry Abeng University pada tahun 2016.	Perda Prov.Lpg No.8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kredit Daerah Provinsi Lampung. Sudah dilakukan Study Kelayakan tentang Pengembangan PT BUMRA Padi di Kabupaten Lampung Selatan. Sedang dalam Proses Implementasi Pendirian PT Bumra Padi.
2.	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Pelayanan Kesehatan dalam bentuk Rumah Sakit Keliling. Pemberian Stimulasi Pengadaan Peralatan Fiberglas Reforncce Plastik (FRP) dan On Job Training untuk dukungan percepatan Universal Akses tahun 2019 : 1. Akses Air Minum bagi Masyarakat 100%. 2. Kawasan Kumuh 0%. 3. Akses Sanitasi yang Layak 100%. Agar Masyarakat dapat melaksanakan : Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Sudah dikukuhkan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tahun 2016. Telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan.	Mendapat penghargaan padaTahun 2016 1. OJT bagi Petugas Sanitarian. 2. OJT WUSAN. 3. OJT bagi kader Kesehatan Lingkungan.



NO	NAMA OPD	INOVASI YANG DILAKUKAN	SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
		(STBM). Cara Pemanfaatan Peralatan Cetakan FRP Untuk mencetak Sarana Sanitasi sesuai dengan kebutuhan Masyarakat		
		Stimulant Peralatan pengadaan Bahan Komunisasi Informasi Edukasi (KIE) Kits Hygine Sanitasi Pangan di sekolah peralatan pemicu STBM di Sekolah, diharapkan Anak Sekolah dapat Menjadi Kader Sanitasi dilingkungan Sekolah dan lingkungan tempat tinggalnya.	Telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan.	1. Orientasi bagi petugas Puskesmas. 2. Pemicuan di Sekolah Bagi Anak Sekolah.
3.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.	Pelayanan dalam bentuk perizinan yang lebih sederhana diterbitkan oleh Bupati/Walikota melalui Camat/Lurah/Kades pada tiap daerah.	Sudah dikukuhkan pada Tahun 2015.	<ul style="list-style-type: none"> • Pada Tahun 2015 penerbitan IUMK berjumlah 6.823 di Kota Bandar Lampung. • Blm semua Kabupaten yang menerbitkan IUMK.
4.	Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.	Promosi Pariwisata Lampung dalam bentuk Aplikasi Augmented Reality untuk brosur Pariwisata Lampung berbasis Android. (Aplikasi Pariwisata Lampung Berbasis Android).	Sudah dikukuhkan pd. Kegiatan Promosi Branding Pariwisata Provinsi lampung “Lampung The Treasure of Sumatera” di Bali pd tanggal 29 April s/d 1 Mei 2016 di Beachwalk,Kuta-Bali oleh Gubernur Lampung .	Aplikasi dapat diunduh di Play Store dengan nama “Lampung Tourism”. 2018 *)
5.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.	Pelayanan Sertifikasi/Registrasi dalam bentuk penerbitan Sertifikat Prima 2 dan Prima 3.	<ul style="list-style-type: none"> • Mulai dilakukan sejak Th.2010 (sertifikat Prima 3) dan dilakukan tiap tahun. • Mulai dilakukan sejak Th.2010 (sertifikat Prima .2) dan dilakukan tiap tahun. 	Telah diverifikasi oleh Kementerian Pertanian (OKKP) No.OKKP-LSP-007 Tgl. 8 Maret 2010 dan OKKP-LSP-007 tanggal 6 Oktober 2014.



NO	NAMA OPD	INOVASI YANG DILAKUKAN	SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
		Pelayanan Registrasi dalam bentuk penerbitan nomor registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk beras.	Mulai dilakukan sejak tahun 2014 dan dilakukan setiap tahun.	Telah diverifikasi oleh Kementerian Pertanian (OKKP) No.OKKP-LSP-007 Tgl. 8 Maret 2010 dan OKKP-LSP-007 tanggal 6 Oktober 2014.
		Pelayanan Sertifikasi/Registrasi dalam bentuk Penerbitan Health Certificate (HC) untuk Komoditas Pala.	Dilakukan sejak tahun 2016.	Diterbitkan oleh Health Certificate (HC) ke Uni Eropa untuk Komoditas Pala.
		Teknologi Pengelolaan Beras Siger.		2018 *)
		Pelayanan Sertifikasi Produk Pangan Segar Berbasis Website.		2018 *)
6.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (UPT PKTK RSUAM). 	Dibentuk pada tanggal 4 Mei 2002 berada di RSU Abdoel Moeloek.	Merupakan salah satu unsur penilaian dalam evaluasi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (APE) sehingga Provinsi Lampung selama 3 tahun berturut-turut mendapatkan AnugerahParahita Ekapraya tingkat Utama.
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan terhadap perempuan pra dan pasca menopause (Klinik Menopause RSUAM). 	Dibentuk pada Tahun 2006 berada di RSU Abdoel Moeloek.	Merupakan salah satu unsur penilaian dalam evaluasi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (APE) sehingga Provinsi Lampung selama 3 tahun berturut-turut mendapatkan AnugerahParahita Ekapraya tingkat Utama.
7.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung : - Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik.	Pengelolaan Informasi melalui Komunikasi Dua Arah.	Penyampaian Informasi melalui Film Pendek.	Workshop, Dialog, Talkshow.



NO	NAMA OPD	INOVASI YANG DILAKUKAN	SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
		Pengadaan penunjang kegiatan Media Luar Ruang seperti penambahan Titik Lokasi Media Ruang.	Publikasi Melalui Media Luar Ruang Publikasi Pembangunan Melalui pemutaran Film.	Baleho, Backdrop, Videotron.
		Peliputan Agenda Gubernur.	Publikasi Melalu Media Elektronik.	Pengambilan Dokumentasi di Lapangan.
		Penataan Ruang Informasi Khusus Pelayanan Publik.	Penguatan Tugas PPID.	TV, Radio dan Media sosial Menjadikan Ruangan sebagai Pusat Pelayanan Informasi di Dinas.
8.	Dinas Perdagangan Provinsi Lampung : - Bidang Perdagangan Luar Negeri.	- Pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA). - Pelayanan Angka Pengenal Impor (API).	<ul style="list-style-type: none"> • Proses telah sesuai dengan Permendag No.33/M-DAG/PER/8/2010. • UU Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009. <p>Telah diserahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhitung tanggal 3 April 2017.</p>	
	UPTD Verifikasi Standard dan Kalibrasi Metrologi.	Verifikasi dan Interkomparasi Standard.	Sudah dikukuhkan pada tahun 2017.	Peraturan Gubernur Lampung No.3 Tahun 2017.
	UPTD DPK.	Memfasilitasi petani dan Pengepul dengan Pembeli komoditi dengan membentuk jejaring sosial.	Sedang dilakukan Tahun 2017.	
9.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung : Bidang Perikanan Tangkap.	Sistem Pelayanan Kartu Nelayan terpadu.	Pendataan dan Pencetakan kartu Nelayan sebagai Database dalam pemberian bantuan dan Asuransi nelayan.	



NO	NAMA OPD	INOVASI YANG DILAKUKAN	SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
	Bidang Perikanan Budidaya dan PenanganPasca Panen.	Sistem Pelayanan online kartu pembudidayaan ikan (Aquacard)	Pendataan dan Pencetakan kartu pembudidaya ikan sejak tahun 2012 sebagai database dalam pemberian batuan dan asuransi pembudidaya	
		Pelayanan penilaian cara berbudidaya ikan yang baik (CBIB) sesuai Permen Kelautan dan Perikanan	Juara I kinerja penilaian CBIB terbaik se Indonesia (tahun 2014 dan 2015)	
		Pelayanan Sertifikasi kelayakan Pengolahan (SKP) bagi unit Pengolahan Ikan (UPI) skala besar dan UMKM secara gratis	Sejak tahun 2017 dilakukan secara terpadu di Kantor Perizinan satu Atap Provinsi Lampung	
	UPTD Laboratorium Pengujian dan Pengembangan Hasil Perikanan (LPPHP).	Pelayanan Pengujian Mutu Produk Hasil Perikanan sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008.	Sudah mendapat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor : LP 664 IDN sejak 21 November 2012.	Dalam Prose Re-akreditasi (4 Tahunan).
		Pelayanan Inspeksi tipe A terhadap Penerapan HACCP di unit Pengolahan Ikan (UPI) sesuai SNI ISO/IEC 17020:2012.	Sudah mendapat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor : LI 067 IDN sejak 25 Februari 2015.	
	UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I (Pelabuhan Perikan Pantai/PPP Lempasing).	Pelayanan Jasa kepelabuhan sesuai dengan standar pelayanan pelabuhan perikanan pantai.	Penghargaan Adi Bhakti Mina Bahari Bidang Perikanan Tangkap sebagai juara II Katagori Pelabuhan Perikanan Teladan tahun 2015.	
	UPTD Balai Benih Ikan (BBI).	Pelayanan Penilaian Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) sesuai Permen Kelautan dan Perikanan.		
10.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.	Percepatan Pelayanan Rekomendasi Penelitian/Survey yang semula berdasarkan Peraturan Meteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2011 ditetapkan selama 6 (enam) hari kerja, dipangkas menjadi 3 (tiga) hari.	Sudah dilaksanakan sejak tahun 2015.	-
		Menerbitkan Surat Keterangan terdaftar (SKT) Ormas/LSM.	Sudah dilaksanakan sejak tahun 1985	470 SKT yang telah diterbitkan (masih berlaku).



NO	NAMA OPD	INOVASI YANG DILAKUKAN	SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
11.	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.	Membuat aplikasi Indeks Kemajuan Desa (IKD) yg merupakan Aplikasi untuk mengukur Kemajuan Desa di Prov.Lampung berdasarkan 5 Aspek dan 29 Indikator bekerjasama dgn Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga dihasilkan Kriteria Desa yaitu Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Kurang berkembang dan Desa Tertinggal. Jumlah Desa Tertinggal di Prov.Lampung adalah 380 desa Tertinggal berdasarkan IKD dan akan menjadi lokus kegiatan Unggulan Prov.Lpg yaitu kegiatan Gerbang Desa.	Sudah dikukuhkan sejak tahun 2015.	
		Melaksanakan program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Rua Jurai (Gerbang Desa Saburai), yang merupakan Program bantuan Provinsi Lampung untuk Desa2 Tertinggal di Prov.Lampung berdasarkan IKD sebanyak 380 desa tertinggal dgn mengintegrasikan Program Kegiatan OPD Provinsi dilokus Desa2 tertinggal tersebut serta dengan mensinergikan Program Kegiatan dgn Kab/Kota se-Provinsi Lampung dapat menjadi desa yang mandiri dan sejahtera.	Sudah dikukuhkan sejak tahun 2015.	Dilaksanakan pada 13 Kabupaten se-Provinsi Lampung dengan indikator capaian pengentasan desa tertinggal 20 desa setiap tahun.
12.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Lampung.	Pelayanan Pemutaran Film Keliling.	Sudah tahun 2017.	Penghargaan dari Komisi Informasi Publik Peringkat 3 Tahun 2016.
		Pameran Seni Lukis Tingkat Nasional.		
		Rekrutmen Guru Daerah Terpencil (Lampung Mengajar).		
13.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.	Pelayanan Kepegawaian Berbasis 1 (satu) pintu kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.	Belum dikukuhkan.	-
14.	Dinas Tanaman Pangan dan	Distribusi Pupuk bersubsidi dengan pola “ Billing	• Telah diterbitkan Peraturan Gubernur	



NO	NAMA OPD	INOVASI YANG DILAKUKAN	SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
	Hortikultura Provinsi Lampung.	<p>System” .</p> <p>Klinik Pertanian Keliling Kerjasama antara Dinas Tanaman Pangan dan Holtokultura dengan Fakultas Pertanian Unila</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai pelayanan kepada petani dalam memberikan solusi pemecahan masalah2 yang dihadapi oleh para petani, melalui call center untuk menanggapi keluhan petani , misalnya masalah organisme pengganggu Tanaman, aplikasi pupuk, pemanfaatan pupuk, hingga manajemen pemasaran. • Nomor call center: 0852-4896074. • Setelah laporan ditanggapi serius, Tim akan identifikasi masalah dan terjun langsung ke lapangan. • Selanjutnya masalah yang teridentifikasi oleh Tim dari Fakultas Pertanian Unila akan melakukan penyuluhan hingga Praktik Pertanian. 	<p>Lampung No. 99 Tahun 2016 tentang Pola Distribusi pupuk bersubsidi sektor pertanian di Provinsi Lampung tanggal 30 Desember 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan ujicoba (model) di Kabupaten Lampung Selatan di 5 (lima) Kecamatan pada tahun 2016a • Telah dilaksanakan peresmian (Grand Launcing) distribusi pupuk bersubsidi dengan pola “Billing System” di Provinsi Lampung, dan oleh Gubernur Lampung tanggal 14 Maret 2017 di Metroa <p>MOU (Nota Kesepakatan) antara Provinsi Lampung dengan Universitas Lampung Nomor : 6/349/II.02/HK/2013 dan nomor : 1785/UN26/DT/2013 tentang Pelaksanaan Kerjasama dalam rangka Mendukung Pembangunan di Provinsi Lampung.</p>	



NO	NAMA OPD	INOVASI YANG DILAKUKAN	SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung : Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>1. Kependudukan : Pelaksanaan Perekaman yang Semula di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kecamatan, saat ini sdh dapat dilaksanakan melalui sistem jemput bola sampai ketinggian Desa dan RT dengan menggunakan mobil keliling sebagai sarana perekaman KTP-elektronik.</p> <p>2. Bidang Pencatatan Sipil: Pelaksanaan pembuatan Akta Kelahiran juga dilakukan melalui sistem jemput bola dengan mendatangi sekolah² dan Rumah Sakit setempat, terkait kepemilikan akta perkawinan, perceraian dan akta kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota sudah melaksanakan kerja sama dgn KUA, Lurah dan Penjaga Makam</p>	<p>• Pelaksanaan Perekaman di Provinsi Lampung saat ini sudah mencapai 85 %.</p> <p>• Pengukuhan Kartu Identitas Anak (KIA) di kota Metro dilaksanakan tahun 2016.</p> <p>• Rencana pada tahun 2017 akan dilaksanakan di Kabupaten Way Kanan.</p> <p>-</p>	<p>Terkait penetapan Kabupaten/Kota sebagai salah satu Daerah yang akan ditetapkan sebagai pelaksanaan Kartu Indonesia Anak (KIA) adalah apabila Daerah dimaksud Akte Kelahiran sudah melampaui Target Nasional yaitu sebesar 77%.</p>
16.	Dinas Sosial Provinsi Lampung.	Rumah Perlindungan dan Trauma Center bagi korban tindak kekerasan.	Sudah dikukuhkan.	Lokasi di Bandar Lampung.



NO	NAMA OPD	INOVASI YANG DILAKUKAN	SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
		Rumah Singgah bagi pasien tidak mampu asal Provinsi Lampung yang berobat ke RS Cipto Mangunkusumo Jakarta.	Sudah dikukuhkan.	Lokasi di Jakarta.
		Pelayanan kepada Orang Terlantar dalam Perjalanan yang akan kembali ke Daerah asal.	Sudah dikukuhkan.	Pemberian Bantuan berupa uang Transpot Rp 100.000,-.
17.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.	Pembayaran Retribusi Layanan Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Lampung saat ini dapat langsung dilakukan oleh Pengguna Layanan ke Kas Negara melalui Bank Lampung, dimana sebelumnya hanya melalui Bendahara Penerima OPD.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2016.	



**DATA INOVASI
DARI KABUPATEN/KOTA DI SE PROVINSI LAMPUNG
SAMPAI DENGAN TAHUN 2018**

NO	KABUPATEN/KOTA	INOVASI YANG DILAKUKAN	SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
1.	Kabupaten Tanggamus : 1. Dinas Peternakan dan Perkebunan.	Posyandu Hewan Ternak.	Sudah dilakukan sejak Tahun 2013.	TOP 35 Sinopik Nasional, KEMENPAN RB.
	2. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sudut Baca Tanggamus.	Sudah dilakukan sejak Tahun 2015.	
	3. Pengadilan Agama Tanggamus dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.	Tanggamus Mobil Court (TMC).	Sudah dilakukan sejak Tahun 2015.	
	4. Dinas Lingkungan Hidup.	School My Darling.	Sedang dilakukan Tahun 2017.	
2	Kabupaten Lampung Tengah : 1. Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil.	Laboratorium Inovasi.	Sudah dilaksanakan.	
	2. Dinas Pendidikan dan Kesehatan dan Dinas Pertanian.	Bunda Siterkaya (Budaya Ronda Sebagai Sistem Terpadu Keamanan dan Pelayanan.	Sudah dilaksanakan.	
3.	Kabupaten Lampung Timur : 1. Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).	Telah diresmikan secara simbolis berlakunya PATEN di 24 Kecamatan se-Kab.Lampung Timur. Peresmian PATEN dimaksud telah dilaksanakan pada 17 Desember 2015, dikantor Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.	Memberikan kemudahan pelayanan publik dibidang perizinan usaha Mikro dan non perizinan dgn memperpendek rentang kendali pelayan dikarnakan rentang kendali pelayanan menjadi pendek, tanpa dipungut biaya (gratis) serta tepat waktu sehingga perekonomian usaha Mikro masyarakat dapat bergerak. Belum ada penghargaan.



NO	KABUPATEN/KOTA	INOVASI YANG DILAKUKAN	SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
		Nemuy Nyimah, yaitu menampung dan memberikan solusi yang disampaikan masyarakat yang mempunyai permasalahan di tingkat desa dan kecamatan yang bila bisa terealisasi di kecamatan. Kegiatan itu diadakan setiap hari kamis.	Dimulai pertengahan tahun 2017.	
	2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan pengendalian Penduduk.	Pembentukan Kampung KB, 1 Kampung KB.	Sudah di Canangkan/dikukuhkan oleh Bupati Lampung Timur tahun 2016 di Desa Pakuan Aji Kec.Sukadana.	Desa Pakuan Aji Kec. Sukadana.
		23 Kampung KB.	Akan dikukuhkan.	23 Desa di 23 kecamatan.
		Pembentukan Desa Ramah anak , 1 Desa.	Sudah dicanangkan/dikukuhkan oleh Bupati Lampung Timur tahun 2016 di Desa Labuhan Ratu VII Kec. Labuhan Ratu.	Sudah dikukuhkan.
		23 Desa.	Akan dikukuhkan.	23 Desa di 23 Kecamatan.
	3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenga Kerja Bidang : - Penempatan, Perluasan Kerja dan Pelatihan Tenaga Kerja.	Fasilitasi pembentukan Koperasi konsumen TKI Purna dalam rangka pemberdayaan perekonomian TKI Purna di Kabupaten Lampung Timur.	Sedang dalam proses tahapan pembentukan koperasi primer sejak akhir bulan Maret 2017 di Kecamatan Purbolinggo.	Kerjasama dengan BP3TKI Lampung (APBN).
		Fasilitasi Pembentukan Desa Migran Produktif (Desmigratif) dalam rangka pemberdayaan Daerah kantong TKI menjadi desa yang mandiri secara perekonomian.	Sedang dalam proses persiapan pelaksanaan tahap survey telah selesai pada bulan Februari 2017 di Desa Jepara Kec. Way Jepara dan Desa Bandar Agung kec. Bandar Sribhawono.	Kerjasama dengan Dirjen Bina Penda dan PKK Kemenaker RI (APBN).



NO	KABUPATEN/KOTA	INOVASI YANG DILAKUKAN	SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
		Monitoring proses penempatan CTKI pada PPTKIS yang melaksanakan perekrutan CTKI dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur.	Sedang dalam proses persiapan pelaksanaan yang direncanakan pada bulan Juli 2017.	APBD.
	4. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.	Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) sistem pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Kabupaten Lampung Timur.	Launcing pada tanggal 17 November 2016 dan sudah berjalan sampai sekarang.	
4.	Kabupaten Tulang Bawang : 1. Badan Pendapatan Daerah.	Sistem Pelayanan Pajak Terpadu satu pintu. Pembayaran PBB secara Online.	Sudah dilaksanakan awal Januari 2017. Sudah dilaksanakan sejak Januari 2014.	MOU dengan Bank Lampung.
	2. Dinas Perdagangan.	Pos Ukur Ulang.	Sedang dalam Proses.	Ditempat2 tertentu/pasar disediakan timbangan digital yang bertujuan untuk menciptakan tertib ukur/uji ulang alat ukur.
	3. Dinas Koperasi dan usaha kecil Menengah .	Membuka Pelayanan Konsultasi untuk Koperasi dan UMKM. Penggunaan E-Commerce dalam pemasaran Produk UMKM, untuk memperpendek jarak distribusi produk. Melaku publikasi produk UKM ditempat yang banyak dikunjungi calon pembeli potensial.		



NO	KABUPATEN/KOTA	INOVASI YANG DILAKUKAN	SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
	4. Dinas Perhubungan.	Penilaian dalam bidang tertib lalu lintas.	Sudah terlaksana pada tahun 2014 dan tahun 2015.	Mendapat penghargaan dan plakat WTN (Wahana Tata Nugraha) dari Kementerian Perhubungan RI pada Tahun 2014 dan tahun 2015.
	5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.	Pelayanan perizinan Keliling di Kecamatan.	Sedang dilakukan pada tahun 2017.	Telah dilaksanakan di kecamatan Banjar Agung tanggal 15 s/d 17 Maret 2017 jadwal selanjutnya terlampir.
	6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Terpadu SIAP.	Sudah dilaksanakan pada tahun 2015.	SIAP (Sigap, Ikhlas, Amanah dan Peduli) merupakan Slogan pelayanan terpadu di bidang Administrasi Kepegawaian yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan secara lebih mudah, cepat, sederhana, efektif, efisien dan bebas pungutan liar.
		Pemanasan Modul Sistem Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala.	Sudah dilaksanakan pada tahun 2016.	Kenaikan gaji berkala otomatis setiap 2 (dua) tahun bagi PNS yang bebas dari hukuman disiplin tanpa mengajukan usulan.
	7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Melakukan Sosialisasi Peraturan PerUndang-undangan dibidang ke Tenagakerjaan secara langsung ke perusahaan ² di Kabupaten Tulang Bawang.		Sebelumnya sosialisasi dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau di 1 lokasi saja. Dirasa kurang efektif karena



NO	KABUPATEN/KOTA	INOVASI YANG DILAKUKAN	SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
				sosialisasi tidak tersampaikan secara merata.
		Pelayanan Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disebut BKK dalam bentuk bursa kerja yang berkerjasama dengan satuan pendidikan Menengah dan dilembaga pelatihan kerja.	Sudah berkoordinasi dengan satuan pendidikan menengah dan di lembaga pelatihan kerja yang ada di Kab.Tulang Bawang untuk pendirian bursa kerja khusus yang nantinya ditindak lanjuti ke kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI.	Memberikan kemudahan untuk pelayanan bursa kerja khusus disebut BKK kepada pencari kerja yang akan mendapatkan pekerjaan pada perusahaan sehingga data penempatan tenaga kerja dapat mudah terpantau.
	8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Pelayanan Perekaman KTP-el Keliling (Mobile).		
		Sosialisasi tentang persyaratan pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kartu keluarga, KTP-el, SKPWI (surat pendah Warga Negara Indonesia), Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Perceraian, P3A (Akte Pengangkatan Anak, Akte Pengakuan Anak, Pengesahan Anak).		
5	Kabupaten Lampung Utara : 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Pelayanan cepat lima (5) menit selesai dalam pembuatan pelayanan Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan.	Sudah dikukuhkan.	
		ISO 9001 Penerapan Bursa Kerja Online (BKOL) dan Informasi Pasar Kerja Online (JPKOL).	Sedang dikukuhkan.	Proposal ke Kementerian Tenaga Kerja RI sedang diproses.
		Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL) masyarakat bias mencari secara Online	Sedang berlangsung.	



NO	KABUPATEN/KOTA	INOVASI YANG DILAKUKAN	SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
		bursa kerja diseluruh Indonesia.		
	2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Pemutihan IMB rumah tinggal dengan usia bangunan minimal 3 tahun dengan membayar 50 % dari nominal yang dibayarkan.		
	3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.	Mobil Pajak Keliling.	Sedang dikukuhkan.	
		Mobil Pajak Keliling.	Sudah dikukuhkan.	
6.	Kabupaten Pesisir Barat : - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Pelayanan Perekaman KTP-EL ke Daerah yang jauh dan sulit dijangkau.	Telah dilaksanakan sejak awal tahun 2017.	Sudah ada SK Tim Pelaksana Kegiatan yang ditandatangani Kepala Disdukcapil Kab. Pesisir Barat.
		Bekerja sama dengan UPTD Dinas Pendidikan untuk melaksanakan Pelayanan Perekaman KTP-EL bagi Siswa/Pelajar yang telah berumur 17 tahun keatas.	Telah dilaksanakan sejak awal tahun 2017.	Sudah ada SK Tim Pelaksana Kegiatan yang ditandatangani Kepala Disdukcapil Kab. Pesisir Barat.
		Bekerjasama dengan UPTD Kesehatan untuk pencatatan kelahiran dan kematian.	Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan mulai tahun 2018.	Tahun 2017 masih dalam tahap sosialisasi.
7	Kota Bandar Lampung.	Kegiatan pemeliharaan rutin jalan dengan pola mantri jalan dan pendekatan pemberdayaan masyarakat.	Sudah ditetapkan dan dilaksanakan sejak tahun 2016.	Upaya2 yang sudah dilakukan : - Penerbitan SK Mantri Jalan Dinas Bina Marga Prov.Lampung di tahun 2016. - Penebitan Juklak, SOP serta Juknis pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan di tahun 2016. - Penambahan jumlah



NO	KABUPATEN/KOTA	INOVASI YANG DILAKUKAN	SEDANG ATAU SUDAH DIKUKUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	UPTD dari 3 menjadi 6 buah UPTD. - Penerbitan SPT Mandor dan pekerja dari unsur masyarakat. - Pelaksanaan Kegiatan Swakelola pemeliharaan rutin jalan .